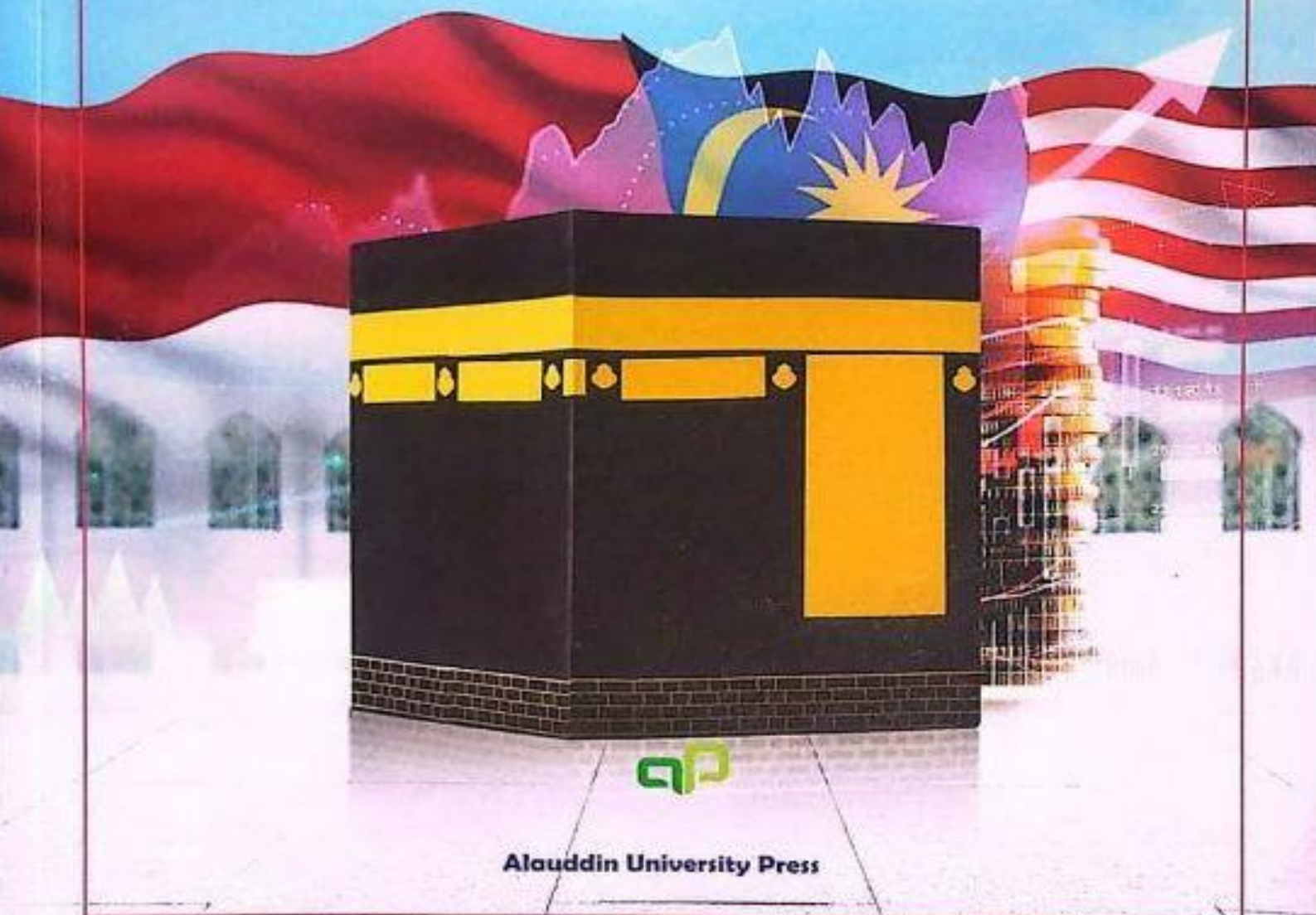




Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.

Editor
Muhammad Majdy Amiruddin

Pengelolaan **Dana Haji** Indonesia-Malaysia



Alauddin University Press



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN ALAUDDIN
MAKASSAR – INDONESIA

Pengelolaan Dana Haji

Indonesia-Malaysia

**Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.**

**Editor
Muhammad Majdy Amiruddin**



**RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK**

H. Rahman Ambo Masse dan H. Andi Aderus.

Pengelolaan Dana Haji Indonesia-Malaysia/H. Rahman Ambo Masse dan
H. Andi Aderus.—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

x, 152 hlm: 23 cm.

Bibliografi: hlm. 145

ISBN 978-623-372-541-5

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3682 RAJ

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.

PENGLOLAAN DANA HAJI INDONESIA-MALAYSIA

Cetakan ke-1, Oktober 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Muhammad Majdy Amiruddin

Copy Editor : Findi Daraningtyas

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

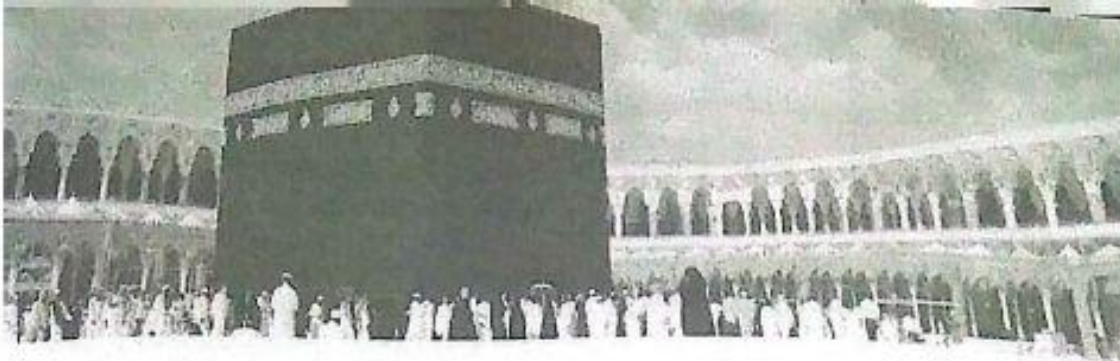
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block 88 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah wa Syukurillah, atas segala rahmat Allah Swt. beserta selawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu di-*update* dan di-*upgrade*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 2 Mei 2021

Rektor UIN Alauddin Makassar
Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D.



Pengelolaan Dana Haji Indonesia-Malaysia

PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA- MALAYSIA

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA

Alauddin University Press



DIV KOMINFO 2025

Selamat atas

Pengukuhan Guru Besar
Ilmu Teologi Wasathiyah
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA

Wakil Rektor II Bidang AUPK UIN Alauddin Makassar



hmjsi.uinam



hmjsiuinam.org



hmjsiuinam

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُبْعُوْثِ رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْآمِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَمَنْ تَبَعَ هَذَاهُمْ إِلَى
يَوْمِ الدِّيْنِ.

Puji syukur kehadirat Allah swt. atas nikmat hidayah dan anugrah ilmu yang terbatas dalam pusaran lautan ilmuNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “ ***Pengelolaan Dana Haji Indonesia-Malaysia***”

Salam dan salawat terkirim kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang mentahbiskan dirinya sebagai “*ummi*”, namun mampu membawa peradaban baru dalam kehidupan umat manusia, mencerahkan dunia dengan ilmu dan peradaban.

Pasca diundangkannya UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kewenangan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji menjadi relative. Amanah Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengharuskan pengelolaan dana haji dikelola oleh suatu badan hukum public mandiri dan independen bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan ini dinamakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tugas dan fungsi badan ini adalah mengelola dan mengembangkan dana haji yang bersumber dari setoran awal jemaah haji dan dana abadi umat (DAU) secara optimal untuk dipergunakan pada peningkatan pelayanan haji, efisiensi dan rasionalitas dalam penggunaan biaya pelaksanaan ibadah haji, dan kemanfaatan bagi umat Islam

Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk memperdalam bidang kajian ekonomi dan hukum ekonomi syariah.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak akan terbit tanpa bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makassar, 2022

Penulis

Daftar Isi

PENGANTAR REKTOR	ii
BAB I PRANATA SISTEM EKONOMI SYARIAH.....	1
A. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional.....	1
B. Formalisasi Prinsip Syariah.....	9
C. Akad Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah.....	18
 BAB II	 34
PROFIL LEMBAGA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI INDONESIA DAN TABUNG HAJI MALAYSIA.....	34
A. Profil Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia.....	34
Visi BPKH	42
Misi BPKH	43
B. Profil Lembaga Tabung Haji Malaysia.....	43
BAB III.....	47
PENGELOLAAN DANA HAJI	47
1. Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.....	47
2. Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah	50
3. Pengelolaan Dana Haji pada Lembaga Tabung Haji Malaysia	99
3. Pelayanan Haji Lembaga Tabung Haji Malaysia.....	119
BAB IV	125
Aspek Maqashid dalam Pengelolaan dan Pelayanan Haji	125
1) Ar-Rawāj	125
2) Transparansi	127

3) Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan.....	130
4) Jaminan Hukum.....	138
5) Keadilan.....	141
Implikasi Investasi Dana Haji Terhadap Pelayanan Haji.....	143
A. Pelayanan Haji oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji Kemenag RI	143
1) Menjaga Agama	144
2) Menjaga Jiwa.....	145
3) Menjaga Akal.....	147
4) Menjaga Harta	147
BAB VI PENUTUP	167
A. Simpulan.....	167
B. Saran	168
Daftar Pustaka.....	169

BAB I

PRANATA SISTEM EKONOMI SYARIAH

A. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

Sistem perbankan syariah di Indonesia diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia, khususnya berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan, yakni menerapkan *dual banking system* (mengakomodir penerapan bank syariah dalam sistem perbankan konvensional). Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.10/1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kemudian dipertegas dengan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Payung hukum tersebut telah mendorong penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.¹ Yang kemudian diikuti dengan berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga inilah yang berwenang menjustifikasi kesyariahan produk lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Secara formal, eksistensi perbankan syariah di Indonesia diakui melalui Undang-undang No. 7/1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi keberadaan bank bagi hasil. Secara sosiologis, pengaturan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dilandasi oleh pemikiran bahwa bank syariah sebagai suatu system lembaga *intermediary* yang terintegrasi dalam system perbankan nasional merupakan bank alternative yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan keyakinan sebagian masyarakat Indonesia. secara sosiologis-empiris, aktualisasi nilai-nilai Islam di bidang ekonomi dan keuangan merupakan

¹ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.2. Lihat juga, Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Erlangga, 2010), h. i

bentuk akomodatif terhadap konsep pemikiran bahwa ajaran Islam dapat diimplementasikan di Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai (value) Islam dalam kehidupan sosiologis masyarakat. Bukan melalui formalisasi ajaran dalam bentuk mendirikan Negara Islam. Disisi lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa ajaran Islam hanya dapat diaktualisasikan secara sistematis dan melembaga apabila diformalkan melalui suatu lembaga yang dipanyungi oleh peraturan perundang-undangan.

Awal beroperasinya perbankan syariah di Indonesia hanya dipanyungi oleh UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diiringi dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang mengatur mengenai ketentuan usaha kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Respon masyarakat terhadap kehadiran perbankan syariah sangat signifikan, sehingga untuk mengkomodir dan mengatur lebih lanjut perbankan syariah, maka Pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara formal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan ruang gerak dan peluang yang lebih besar terhadap tumbuh dan berkembangannya bank yang berdasarkan pada prinsip syariah. undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pilihan operasional perbankan nasional yang dapat didasarkan kepada system bunga atau system syariah dan prinsip syariah, yang pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh bank konvensional atau bank syariah. bank konvensional diperkenankan menganut *dual banking system* dalam system operasionalnya, yang sebelumnya dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992.²

Ekspektasi masyarakat terhadap kehadiran perbankan syariah sangat tinggi, hal ini berimplikasi pada regulasi sebagai payung

² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 52

hukumnya. Karena itu, laju pertumbuhan perbankan syariah tidak cukup hanya diatur dalam suatu Bab atau Pasal tertentu dalam suatu perundang-undangan. Tetapi diperlukan Undang-undang khusus yang mengatur karakteristik perbankan syariah. berdasarkan realitas empiris dan desakan dari masyarakat muslim Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang Undang-undang tentang Perbankan Syariah yang resmi diundangkan oleh Presiden pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dasar pertimbangan atau konsideran lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu, *pertama*, bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, dan untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. *kedua*, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. *Ketiga*, bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. *Keempat*, bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.³

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Atas

³ M. Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1455

dasar itu, demokrasi ekonomi yang dikembangkan oleh perbankan syariah adalah demokrasi yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu demokrasi kerakyatan yang menganut prinsip pemerataan, keadilan dan keseimbangan.

Perbankan syariah bagian dari lembaga perantara keuangan (*intermediary finance*) dengan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada Pasal 4 UU Perbankan Syariah ditetapkan fungsi-fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi penyelenggara zakat.
- (3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah dalam system Undang-undang Perbankan Nasional adalah sebagai *lex specialis*, karena UU Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, sedangkan UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Karena itu, jika dalam UU Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Perbankan,

maka bagi Perbankan Syariah undang-undang yang digunakan adalah UU tentang Perbankan Syariah.⁴

Kehadiran Undang-undang Perbankan Syariah mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia, sekaligus memperkuat dasar pengaturan hukumnya, sehingga segala hal yang berkaitan dengan dasar hukum operasional perbankan syariah mengacu pada UU Perbankan Syariah, baik berkaitan dengan eksistensi dewan pengawas syariah, penyelesaian sengketa, dan acuan dalam dokumentasi dan legitimasi, serta pengaturan sanksi apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat progresif dan signifikan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi. Pada tahun 2013, tercatat sudah ada 11 bank umum syariah, dan 23 unit bank umum yg membuka unit syariah, dan 160 bank BPRS, sehingga total jaringan kantor perbankan syariah mencapai 2.496 kantor. Dalam lima tahun terakhir industri perbankan syariah tumbuh sebanyak 38% per tahun, melampaui pertumbuhan industri perbankan syariah di dunia yg hanya tumbuh sebesar 10%-20% per tahun menurut data tahun 2009, sedangkan pada tahun 2013 industri perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 47% pertahun.⁵

Data menunjukkan pada kuartal II tahun 2017 tercatat pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai 5,38%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pangsa pasar bank syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai 5,44%.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 74

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *"Statistik Perbankan Syariah"*, Situs Resmi OJK. www.OJK.go.id. (3 April 2014)

Agustus 2017 total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 387,74 triliun, sementara perbankan konvensional Rp 7.158,4 triliun.⁶ Pertambahan aset perbankan syariah disebabkan karena dikonversinya bank umum Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Bank Umum Syariah NTB, factor ini memicu naiknya aset perbankan syariah secara nasional.⁷

Perbankan syariah sebagai lokomotif industry keuangan syariah di Indonesia menjadi pilar pengembangan keuangan syariah di masa depan. Dengan total aset 431,4 triliun pada tahun 2018. Secara umum kondisi CAR 20.41 persen, ROA 1.35 persen, dan NPF mencapai 3.92 persen. Kondisi ini menjadikan bank syariah termasuk kategori sehat dan mampu kompetitif dalam industry perbankan di Indonesia.

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan secara progresif, pertumbuhan ini didukung beberapa faktor:

1. Populasi penduduk Muslim Indonesai sangat besar, berdasarkan survei nasional pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesai kurang lebih 208 juta jiwa, 88% diantaranya adalah penduduk Muslim.
2. Dukungan dari pemerintah, tahun 2018 dana haji diinvestasikan pada perbankan syariah. Dana haji yang jumlahnya beberapa triliun akan didepositokan pada perbankan syariah.
3. Dukungan dari parlemen dan legislatif. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya sistem perundang-undangan yang khusus

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Statistik Perbankan Syariah*", Situs Resmi OJK. www.OJK.go.id. (3 September 2018)

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Statistik Perbankan Syariah*", Situs Resmi OJK. www.OJK.go.id. (3 April 2014)

mengatur legalitas hukum perbankan syariah di Indonesia. Aspek hukum dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum bagi praktisi perbankan syariah, menjamin terimplementasinya prinsip-prinsip syariah, dan melindungi nasabah sebagai konsumen akhir dari produk-produk perbankan syariah.

Kedudukan perbankan syariah adalah merupakan *lex specialis* dari Undang-undang perbankan. Karena undang-undang perbankan syariah dikategorikan sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, sedangkan undang-undang perbankan adalah undang-undang yang mengatur secara umum perbankan nasional di Indonesia. Dengan menggunakan asas tersebut, maka produk hukum dari kedua undang-undang tersebut tidak saling kontradiktif.⁸

4. Kontribusi ulama. Karakteristik perbankan syariah adalah adanya dewan pengawas syariah yang anggotanya terdiri dari ulama yang menguasai hukum ekonomi syariah dan memahami bidang keuangan dan perbankan. Fungsi dewan pengawas syariah adalah memastikan prinsip-prinsip syariah terimplementasi dengan baik dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Karena itu, opini dan keputusan hukum dewan pengawas syariah dapat menjadi salah satu bahan hukum bagi pembentukan peraturan perbankan yang lebih mengikat dan memiliki kepastian hukum.
5. Kinerja dan komitmen perbankan syariah untuk menarik nasabah berafiliasi pada perbankan syariah. Tiap tahun nasabah perbankan syariah, utamanya dana pihak ketiga mengalami peningkatan. Nasabah memilih berafiliasi pada perbankan syariah tidak saja karena faktor emosional, tapi juga karena faktor rasional, yaitu rasionalisasi bagi hasil terhadap tabungan

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 74

dan deposito atau margin keuntungan yang kompetitif dengan perbankan konvensional.⁹

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional telah mencanangkan enam program inisiatif yang dilaksanakan dalam kurung waktu 10 tahun, mulai tahun 2005-2015, keenam program prioritas pengembangan dan penguatan perbankan syariah, yaitu, *pertama*, meningkatkan tingkat kepatuhan syariah, *kedua*, meningkatkan tingkat kehati-hatian bank syariah, *ketiga*, meningkatkan daya efisiensi dan daya saing, *keempat*, meningkatkan sumber daya manusia perbankan syariah, *kelima*, meningkatkan stabilitas perbankan, *keenam*, mengoptimalkan peran sosial bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah.¹⁰

Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di bidang sektor jasa keuangan. Pada Pasal 6 disebutkan tugas OJK yang meliputi:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹¹

⁹ Rifki Ismal, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, (cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. ; Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 3 data per desember 2013, tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah terhadap deposito dan tabungan mudharabah jika di ekuivalen berada dikisaran 5–6%, angka ini tidak jauh berbeda dengan bunga pada perbankan konvensional yang berada pada kisaran 6% perbulan.

¹⁰ Rifki Ismal, *The Indonesian Islamic Banking, Theori and Practise*, h. 2

¹¹ Team Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan*, (cet. I; Surabaya: Anfaika Perdana, 2012), h. 8

Berdasarkan pasal 6 di atas, tentang tugas OJK yang turut serta mengatur dan mengawasi sektor perbankan nasional termasuk perbankan syariah, namun undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan akan prinsip syariah merupakan wewenang OJK. Karena itu, pengaturan tentang pengawasan prinsip syariah pada OJK masih menunggu peraturan pemerintah selanjutnya. Pengaturan akan kepatuhan terhadap *shariah compliance* untuk sekarang ini masih berkordinasi dengan Bank Indonesia.

B. Formalisasi Prinsip Syariah

Pada awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992 yang ditandai dengan kehadiran Bank Muamalat mendapat legitimasi dari undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua Undang-undang ini belum mengatur perbankan syariah secara spesifik dan sifatnya masih umum. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan hanya menyebutkan kalimat “pembagian hasil keuntungan” pada Pasal 1 angka 12 yang menjelaskan tentang ketentuan umum. pada Pasal 6 huruf m tentang jenis usaha bank umum, salah satunya adalah tentang penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan Pasal 13 huruf c tentang jenis usaha bank perkreditan rakyat, diantaranya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.¹²

Pengaturan perbankan syariah berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan hanya didasarkan pada kalimat “prinsip bagi hasil” yang tercantum dalam ketentuan umum perbankan dan jenis usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Padahal sistem

¹² M. Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1393-1398

operasional perbankan syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi juga dilandasi dengan semangat membumikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sarat akan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*) dengan berpatokan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari transaksi berbasis riba, maisir, garar, dan zalim.

Sebagai tindak lanjut pengimplementasian Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri atas 9 Pasal yang meliputi 15 ayat. Dalam Peraturan Pemerintah itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam.

- (a). Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat.
- (b). Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
- (c). Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank.¹⁴

Mencermati Peraturan Pemerintah di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip bagi hasil merupakan karakteristik perbankan syariah menjadi landasan sistem operasional, baik dalam aspek pendanaan, pembiayaan, dan usaha bank lainnya. Padahal akad-akad perbankan syariah merupakan hasil transformasi dari akad-akad fikih muamalah

¹³ M. Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1357

¹⁴ M. Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1357

yang bersumber dari fikih dengan ciri dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.

Term “bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil” yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengalami perubahan menjadi “bank berdasarkan prinsip syariah” sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 3,4,12, dan 13. Perubahan ini untuk mempertegas dan mengkhususkan (*lex specialist*) terhadap makna prinsip bagi hasil yang cenderung ambiguitas dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Karena itu, UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan berlaku sebagai UU yang datang belakangan, sehingga mengesampingkan UU yang datang sebelumnya. Asas yang dipedomani ketika terjadi konflik hukum dan konstitusi adalah “*Lex posterior derogat legi priori*”.¹⁵

Term “prinsip syariah” yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 bermakna “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁶

¹⁵ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, h. 96. Lihat juga, Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 129

¹⁶ M Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1415

Implikasi diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 berdampak pada dicabutnya beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan bank yang didirikan berdasarkan UU yang dinyatakan tidak berlaku, maka secara yuridis formal harus mengikuti ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 sesuai dengan kaedah "*Lex posterior derogat legi priori*". Suatu hal yang patut dicermati bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tidak mencantumkan pengertian perbankan syariah, sehingga secara yuridis-formal pengertian perbankan syariah belum baku dalam tata hukum perbankan nasional. Karena itu, pengertian perbankan syariah hanya mengacu pada definisi yang diutarakan oleh para akademisi dan pakar perbankan syariah.

Menurut Miranda S. Gultom, terdapat lima faktor yang mendukung eksistensi dan perkembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Pertama*, dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank adalah riba dan haram. *Kedua*, trend kesadaran umat Islam kelas menengah ke atas yang semakin meningkat untuk bermu'amalah secara Islami. *Ketiga*, Sistem ekonomi syariah yang dimotori oleh perbankan syariah mampu survive dan menunjukkan eksistensinya saat terjadi krisis ekonomi Asia Tenggara, yang berdampak pada runtuhnya sebagian perbankan konvensional. *Keempat*, Pemerintah terus-menerus memperbaharui regulasi di bidang perbankan nasional, termasuk mengakomodir perbankan syariah. *Kelima*, Tuntutan integrasi lembaga keuangan syariah yang saling menopang.¹⁷

Diktum pertimbangan diundangkannya UU Perbankan Syariah didasari atas tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai

¹⁷ Miranda S. Gultom, *Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"* dalam Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 65

keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸ Mencermati materi diktum pertimbangan tersebut, pada prinsipnya sistem ekonomi Islam yang diwujudkan melalui sistem perbankan syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 45 sebagai norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau norma fundamental yang menjiwai sistem perundang-undangan di Indonesia. Termasuk UU perbankan syariah.

Teori hierarki norma hukum yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan teori *von stufenaufbau der rechtsordnung* mengemukakan susunan norma teori. Pertama, Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*). Kedua, Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*). Ketiga, Undang-undang formal (*formall gesetz*). Keempat, Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). Susunan teori norma ini menurut A. Hamid S. Attamimi dijabarkan dalam struktur hierarki tata hukum Indonesia, sehingga memiliki struktur sebagai berikut:

1. Norma *Staatfundamentalnorn* tercantum dalam Pancasila atau Pembukaan UUD 1945
2. Norma *staatsgrundgesetz* tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Konvensi Ketatanegaraan
3. Norma *formal gesetz* tercantum dalam Perundang-undangan
4. Norma *verordnung en Autonome satzung* terlihat pada peraturan pemerintah pusat maupun daerah.¹⁹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan ditransformasi dalam bentuk perundang-undangan nasional. Nilai-nilai tersebut tidak

¹⁸ M. Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1455

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, h. 384

bertentangan dengan prinsip Pancasila sebagai norma *staatsfundamentalnorn*, bahkan sejalan dengan prinsip norma Pancasila yang fundamental itu. Struktur nilai yang tercantum dalam Pancasila memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip syariah sebagai muara dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila Pertama Pancasila. Nilai keadilan yang bermakna suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di depan hukum (*equal before law*), kesamaan hak kompensasi, mendapatkan hak hidup secara layak, hak untuk menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Teori *mudharabah* secara filosofis mengindikasikan bahwa suatu transaksi harus didasarkan atas prinsip kesetaraan. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah menempatkan kedua belah pihak yang bertransaksi sebagai mitra, sehingga masing-masing pihak memiliki *bargaining position* yang sama. Pembagian keuntungan didasarkan atas kondisi riil usaha, sedangkan resiko ditanggung secara bersama secara proporsional. Dari sudut pandang ekonomi, ketika penyerahan risiko usaha hanya dibebankan kepada salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.

Menurut Said Sa'ad Marthon,²⁰ sistem bagi hasil (*mudharabah*) dibangun atas empat karakteristik. *Pertama*, dialektika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Bahwa orientasi kegiatan ekonomi dan bisnis tidak hanya untuk mendapatkan nilai kepuasan maksimum semata, seperti ajaran ekonomi konvensional, tetapi juga ada unsur spritualisme ibadah, yaitu kekayaan hak milik merupakan amanah dan titipan Tuhan untuk didayagunakan bagi kepentingan kehidupan agar mencapai kesejahteraan bersama. *Kedua*, Kebebasan dalam aktifitas ekonomi. Konsep perbankan syariah tidak hanya mengakomodir ekspektasi

²⁰ Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhal li al-Fikri al-Iqtisad fi al-Islamy*, dalam, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 33

masyarakat muslim untuk bertransaksi sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Tetapi juga bersifat universal sesuai ajaran *rahmatan lil 'ala>min*.

Ketiga, Menjaga kemaslahatan. Salah satu unsur manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah terpenuhinya kepemilikan harta sebagai kebutuhan mutlak (*d}aruriyah*).²¹ Salah satu asas kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah asas manfaat, yaitu bahwa kepemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mud}ara>t.²²

Ketentuan tentang prinsip syariah juga ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Khususnya pada Pasal 2 ayat 2 dan 3, bunyi Pasal itu sebagai berikut:

“ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Ayat (3) berbunyi: Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*'alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram”.²³

²¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Us}ul al-Ahkam*, Jilid II, h. 3-4

²² Team Penyusun Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 12

²³ Team Penyusun, *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Bidang Umum dan Operasional Bank Muamalat*, (Jakarta: Bank Muamalat Tbk, 2011), h. 108

Adanya ketentuan Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional bertujuan melengkapi dan sekaligus menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syariah. Karena itu, fungsinya sebagai *taqyid* dan *takhsis* terhadap hal yang sifatnya umum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sehingga kedua aturan ini menjadi sumber dan rujukan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Keengganan mematuhi ketentuan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sumber dan bahan baku pembentukan norma prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang kemudian diserap dan ditransformasi menjadi peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa.

Term prinsip syariah disebutkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang perbankan syariah dengan pengertian prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁴ Kewenangan penentuan dan kepatuhan akan prinsip syariah (*syariah compliance*) berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk pada masing-masing bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), dan unit usaha syariah pada bank konvensional. Maupun pada lembaga keuangan syariah secara umum, seperti BMT, asuransi syariah, dan reksadana syariah.

Pada penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2 disebutkan bahwa:

²⁴ M. Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1457

“Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur. (a). Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil). (b). *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. (c). *Garar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. (d). Haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah. (e). Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya”.²⁵

Pada penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah diuraikan tentang pengertian item-item prinsip syariah. *Pertama*, term “*adl*” berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. *Kedua*, term “*tawazun*” berarti keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. *Ketiga*, term “*maslahat*” berarti segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur kepatuhan syariah, yaitu halal, bermanfaat, dan membawa berkah (*taqyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. *Keempat*, term “*alamiyah*” berarti sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai

²⁵ M. Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 1487

dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).²⁶ Sedangkan term “*garar, maisir, zalim, haram, dan riba*” memiliki pengertian yang sama seperti pada penjelasan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

C. Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur implementasi yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c. Adanya pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat

Pada unsur implementasi ini, akad *mudharabah* merupakan program yang akan dilaksanakan, yang dimana sasarannya merupakan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan bebas riba. Program ini dilaksanakan pada produk pembiayaan. Untuk melihat Implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan dapat di lihat di kontrak atau akad atau biasa disebut dengan akad pembiayaan. Akad ini merupakan bukti pemberian pembiayaan kepada nasabah yang berisi dengan klausula-klausula yang telah dibuat secara standar oleh pihak bank dan biasanya nasabah membaca dan membubuhi tanda tangan apabila sepakat dengan perjanjian dan isinya.

Akad pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah memiliki ketentuan yang dtuangkan dalam akta akad pembiayaan sebagaimana berikut:

²⁶ Team Penyusun. *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Bidang Umum dan Operasional Bank Muamalat*, h. 115

- a. Akad pembiayaan *mudharabah* (pasal ini memuat identitas para pihak dan kesepakatan para pihak untuk melakukan akad pembiayaan *mudharabah*)
- b. Definisi (pasal ini memuat definisi dan pengertian akad *mudharabah*, bagi hasil, nisbah, proyeksi bagi hasil, tunggakan, prinsip syariah, dan kewajiban)
- c. Tujuan (pasal ini memuat tentang tujuan dan kedudukan pihak nasabah dalam akad pembiayaan ini)
- d. Bentuk dana pembiayaan (pasal ini memuat jenis dana yang dikucurkan berdasarkan akad *mudharabah*)
- e. Nisbah (pasal ini memuat ketentuan nisbah untuk bank dan nasabah yang diprosentasikan sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan nisbah dapat diubah dan direview. Pasal ini juga memuat tentang perhitungan bagi hasil dan kewenangan nasabah menunjuk pihak ketiga sebagai auditor hasil usaha)
- f. Denda dan ganti rugi (pasal ini memuat tentang teknis dan besaran ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah)
- g. Agunan (pasal ini memuat jenis agunan yang diajukan nasabah sebagai syarat realisasi pembiayaan)
- h. Hak dan kewajiban para pihak (pasal ini memuat tentang hak dan kewajiban para pihak, seperti kewajiban bank merealisasikan dana pembiayaan dan menanggung kerugian usaha sebatas dana yang telah disalurkan, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah, maka seluruh kerugian dibebankan kepada nasabah. Sedangkan kewajiban nasabah mengelola dana pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku, mengelola dan membuat administrasi pembukuan secara jujur, menyerahkan laporan keuangan pada setiap bulan berjalan, mengizinkan bank atau wakilnya untuk memeriksa seluruh kegiatan dan pembukuan nasabah, kesanggupan nasabah menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan wanprestasi nasabah yang dilakukan secara sengaja)

- i. Penyelesaian sengketa (pasal ini memuat teknis dan forum penyelesaian sengketa. Sengketa diselesaikan secara damai dan musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat melimpahkan penyelesaiannya ke pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku)²⁷

Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga *intermediary*, yaitu memberikan fasilitas perantara antara kelompok yang kelebihan dana (*spending unit*) dengan kelompok yang membutuhkan dana (*defisit unit*) melalui fasilitas perhimpunan dana berdasarkan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, sewa menyewa (*ijarah*), *qard*, bagi hasil, fasilitas pelayanan jasa keuangan dengan akad *wakalah*, *kafalah*, *hivalah* ²⁸ maupun fasilitas pembiayaan dengan akad jual beli²⁹ ketentuan jenis dan kegiatan usaha

²⁷ Diola dari akad pembiayaan mudharabah bank BNI syariah Makassar

²⁸ Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uan. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *sahibul maal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Akad *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Akad *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Muhammad Amin Suma, Op.cit., 1491-1492.

²⁹ Akad jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar saling ridha, atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli didefinisikan sebagai akad

bank syariah diatur dalam Pasal 19 undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah dalam akad pembiayaan diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008.³⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari kumpulan ahli hukum Islam yang melakukan ijtihad dan setelah itu mengeluarkan fatwa. Pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari MUI. Dewan Syariah Nasional ini adalah menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. Tugas DSN sendiri adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan syariah.³¹

Ketentuan prinsip syariah diformulasi dari fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam bentuk peraturan bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan nasional, termasuk perbankan syariah. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan kesamaan cara pandang terhadap akad-akad, baik itu akad penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan bank dikalangan pelaku perbankan syariah. Disamping itu, dengan adanya

pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Lihat, team penyusun, Op.cit., 14.

³⁰Divisi Compliance PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah bidang Umum dan Operasional*, 117-118.

³¹Disfa Lidian Handayani, "Hukum Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah" *Jurnal Al-Manahij*, IX, No.2, (2015): 340.

ketentuan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berafiliasi kepada bank syariah.

Seperti diketahui bahwa anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari beberapa ulama, praktisi, maupun pakar ekonomi syari'ah yang sebelumnya ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima (5) tahun. DSN memiliki tanggung jawab dalam memastikan atau mengawal kepatuhan syari'ah, baik dalam produk maupun operasional dari industri keuangan syari'ah itu sendiri. Untuk mendukung para anggota dewan syari'ah dalam menjalankan tugasnya, DSN menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan fatwa yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi dari berbagai pihak.³²

Tugas DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syari'ah. Maka dari itu, DSN membuat aturan dalam bentuk guidelines dengan mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang mana dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syari'ah. Secara rinci, berikut tugas dan wewenang daripada DSN, yaitu:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah;

³²Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'ah," *Jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 3, No.1, (2016): 37.

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.³³

Tugas DSN ini kemudian di delegasikan kepada Dewan Pengawas Syariah pada industry keuangan syariah, baik bank perbankan syariah maupun indutri non bank syariah.

D. Kontribusi Sosial Budaya Terhadap Norma Keagamaan

Karakteristik pemahaman teks keagamaan telah muncul pada masa Bani Umayyah, ketika itu telah berkembang dua model pemikiran, yaitu mazhab ahlu al-Ra'yu di Irak dengan tokohnya Imam Abu Hanifah dan mazhab ahli al-Hadis yang berpusat di Madinah. Corak pemikiran ahlu ra'yi dilatarbelakangi oleh warisan pemikiran Abdullah bin Mas'ud yang terpengaruh dengan cara berfikir Umar bin Khattab yang dikenal sangat terbuka dalam menggunakan logika. Faktor geografis kota Irak yang jauh dari pusat kebudayaan Islam di Madinah dan kondisi sosial merupakan alasan lain tumbuh kembangnya corak pemikiran rasional. Berbagai persoalan keagamaan muncul untuk dicarikan solusinya sementara kapasitas nas cenderung terbatas membuat para ulama menggunakan rasio dan penalaran untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Sementara Madinah yang merupakan pusat kebudayaan Islam dengan segudang ulama yang masih menjaga dan mengembangkan tradisi keilmuaan berdasarkan teks, serta kondisi geografis dan sosial budaya yang masih sederhana membuat corak pemikiran ahlu hadis tetap mempertahankan tradisi tekstual dalam artian sumber-sumber teks masih cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, sehingga pola penyelesaian masalah masih dalam kerangka tekstualis argumentatif.³⁴

³³Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Comlience) Dalam Industri Keuangan Syari'ah", *jurnal ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 3, No. 1, (2016),h. 37-38.

³⁴ Abd. Al-Fattah Husaini Sykeh, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Cet. I; Kairo: Daar al-Jailiy Press, 1993), h. 169

Fakta historis menunjukkan bahwa, karakteristik corak pemikiran itu kemudian melahirkan berbagai Imam Mujtahid dan melahirkan aliran-aliran mazhab yang sangat banyak dan beragam. Dalam sejarah tercatat lebih kurang 89 mazhab yang berhasil dilacak secara empirik. Dan hanya sebagian dari 89 mazhab itu yang dapat dibukukan terutama pada era tadwin atau era kedewasaan hukum. Periode ini berlangsung antara tahun 100-350 H (720-961 M).³⁵

Hampir selama kurang lebih 250 tahun aliran mazhab itu berevolusi secara periodik yang kemudian hanya tersisa lima aliran mazhab dengan corak pemikiran yang berbeda. Mazhab-mazhab itu bertahan karena terus mendapatkan pengikut, juga karena penguasa ketika itu ikut andil dalam mengembangkan aliran mazhab tersebut. Kedekatan pendiri dan ulama mazhab dengan pemerintah menjadi alasan mazhab itu diterima, juga tradisi para imam mazhab yang terus mengembangkan corak pemikiran mereka dalam menyelesaikan persoalan umat yang muncul. Kelima aliran mazhab itu adalah al-Zhahiriyah dengan corak pemikiran tektualis argumentatif, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanbaliyah. Kelima mazhab ini paling sering didapati dalam kajian-kajian fiqh ketika terjadi pro-kontra terhadap suatu persoalan yang diangkat.

Kontribusi fiqh terhadap hukum Islam telah memberikan corak tersendiri perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Selama berabad-abad fiqh telah membentuk cakrawala berfikir bagi para praktisi hukum Islam.³⁶ Sehingga dalam praktiknya muncul istilah *ijtihad intqa'iy* atau ijtihad mazhab. Praktek ijtihadi seperti ini tetap dipertahankan dalam tradisi fatwa Nahdlatul Ulama. Tradisi merujuk kepada berbagai kitab fiqh klasik untuk menyelesaikan persoalan fiqh bahkan persoalan

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, Terj. Abdul Aziz Masyhuri, *Khulasah Tarikh Tayri' Islam*, dalam Roibin, *ibid.*, h. 68

³⁶ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 55

kontemporer sekalipun masih sangat melekat dikalangan para ulama NU yang tegabung dalam Lajnah Bahtsul Masail.³⁷

Kelihatanya, proses ijtihad di atas cukup memberikan jawaban yang memuaskan terhadap sebagian kasus-kasus keagamaan yang muncul, namun untuk persoalan kontemporer akan menimbulkan problem serius, seperti adanya pemaksaan pemberlakuan dogma teks atas realitas yang berkembang, sehingga menimbulkan kesenjangan teoritis-empiris dan tekstual-kultural.

Diantara aspek-aspek sosial budaya yang melatar belakangi corak pemikiran para ulama fiqh adalah:

1. Faktor Sosial

Dinasti Umayyah memerintah sekitar tahun 661-750 M dengan pendirinya Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Kekhalifaan ini berdiri tidak terlepas dari konflik politik sebelumnya yang berakhir dengan terbunuhnya Imam Ali ra.³⁸ Pemerintahan bani Umayyah bercorak monarki, sebuah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan sistem kekhalifaan sebelumnya, yaitu jabatan khalifah dipilih melalui proses pemilihan *ablu abli wa al-aqdi* (semacam parlemen). Corak pemerintahan bani Umayyah dipengaruhi oleh kerajaan Persia dan Bizantium. Pada masa ini perluasan wilayah kekuasaan Islam dilakukan hingga ke Spanyol dan menguasai beberapa kota penting disana. Bani Umayyah berhasil melakukan perluasan wilayah dan memberantas para pemberontak dan kelompok oposisi dikalangan kaum muslimin yang tidak sejalan dengan pemerintahan bani Umayyah yang bercorak monarki. Pusat pemerintahan ditempatkan di Damaskus Syria. Sepanjang sejarah pemerintahan bani Umayyah, konflik internal, berupa hubungan warga Arab dan *mawali* (non Arab) tidak terlalu harmonis.

³⁷ Ahmad Zahro, *Desakralisasi Kitab Fiqh Sebuah Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam...*

³⁸ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Jilid IV, (Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), h. 57

Mawali dianggap sebagai warga kelas dua. Faktor-faktor ini yang menyebabkan hubungan antar anggota masyarakat sangat tidak kondusif dan sering terjadi ketegangan.

Kondisi ini mulai membaik ketika masa pemerintahan khalifah al-Walid bin Abd. Malik (86-97 H/705-715 M), cerminan kemakmuran dan kesejahteraan mulai tampak, meskipun ketegangan antara dua suku Arab yang dikenal sebagai Qay dan Kalb tetap mengancam eksistensi pemerintahan khalifah ini. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abd. Aziz (99-102 H/717-720 M) puncak kemakmuran dan kesejahteraan pemerintahan bani Umayyah dapat dicapai. Konflik-konflik sosial yang terjadi dikalangan masyarakat dapat diredam.³⁹ Pada masa pemerintahan al-Walid, Imam Abu Hanifah (80 H /700 M) salah seorang tokoh penting dalam percaturan mazhab fikih menjalani fase pembentukan karakternya. Lahir dari keluarga Persia yang merupakan keturunan non Arab (*mawali*), yang status sosial keturunan ini dikategorikan warga kelas dua, akibatnya Imam Abu Hanifah juga sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari warga Arab.⁴⁰ Secara sosiologi, kelompok yang senantiasa tertekan dan terintimidasi, maka rasa militansinya akan berkobar. Seperti itu juga yang menjiwai pemikiran Abu Hanifah, sehingga kerangka berfikirnya cenderung rasional kritis. Kerangka berfikir ini selanjutnya yang menjiwai epistemologi *tayri'ya* dalam pengambilan keputusan hukum atas berbagai persoalan fikih.

2. Faktor Politik

Kondisi politik diduga kuat memiliki andil signifikan dalam membentuk corak berfikir para fuqaha dengan analogi bahwa dalam persoalan apapun, politik selalu memiliki andil dan ikut mewarnai gerakan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun fikih

³⁹ Ensiklopedi Oxford, *Dunia Islam Modern*, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002, h. 98

⁴⁰ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, terjemahan al-Hamid al-Husaini, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 237

pada khususnya.⁴¹ Kondisi politik pemerintahan bani Umayyah secara internal sangat tidak mendukung terhadap warga non Arab (*mawali*), dimana mereka dikasifikasikan sebagai warga kelas dua. Hampir dipastikan mereka sulit mendapatkan posisi penting dalam jabatan pemerintahan, hak-haknya kurang diakui sebagai warga negara, sehingga pola interaksinya pun sangat terbatas, hubungan yang kurang harmonis ini sangat mempengaruhi cara pandang para ahli fikih yang berdarah non Arab. Termasuk imam Abu Hanifah, sehingga tingkat kritisnya terhadap pemerintah saat itu sangat tajam dan pedas, untuk meredam padangan kritisnya itu, beliau acap kali ditawarkan jabatan dan posisi pada pemerintahan Tarik bin Ziyad gubernur Irak ketika itu. meskipun beliau juga sering menolak jabatan yang diamanahkan kepadanya, akibat dari keengganannya itu, beliau sering dijembloskan ke penjara. Kondisi-kondisi ini sangat berpengaruh langsung dalam membentuk cakrawala berfikir yang tentunya juga ikut andil dalam penyusunan pemikiran fikihnya. Jabatan Qadhi pada masa pemerintahan bani Umayyah dijabat oleh orang yang spesialis dibidangnya, dan masjid-masjid megah juga banyak didirikan pada saat itu. ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap perkembangan hukum Islam (fikih) tetap eksis. Namun pada periode akhir masa pemerintahan bani Umayyah juga ditandai dengan kehidupan berfoya-foya dan hedonistis, pejabat negara sangat senang menghamburkan uang negara dan cenderung pada kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat.

Berbeda dengan corak pemerintahan bani Abbasiyah, utamanya pada pemerintahan Harun al-Rasyid, karakteristik politiknya ketika itu sangat memberikan respon positif dan penghargaan tinggi terhadap ulama dan para fuqaha, sehingga pemerintahannya dikenal memiliki hubungan harmonis dengan para ahli hukum Islam. hubungan itu dicerminkan melalui kebiasaan menghajikan ratusan para ulama dan para

⁴¹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h.179

fuqaha.⁴² Bukti perhatian Harun al-Rasyid terhadap fuqaha, adalah lahirnya karya kitab *al-Kharaj*, karya Abu Yusuf salah seorang fuqaha mazhab Hanafi, kitab fikih ini termasuk kitab tematis membahas tentang tanah dan hak-haknya yang dipersembahkan khusus kepada khalifah Harun al-Rasyid. Kitab ini disusun atas permintaan khalifah sebagai bahan referensi para qadhi dalam memutuskan persoalan tanah dan pajak serta yang berkaitan dengannya. Hasil ijtihad dalam penyusunan kitab ini tentunya juga memiliki nilai subyektifitas dan keterbatasan, karena berangkat dari sebuah kondisi dan realitas sosio-kultural masyarakat yang masih sederhana dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Unsur pejabat pemerintahan Abbasiyah yang dominan dikuasai oleh warga Parsia merupakan penghalang bagi Imam Syafi'i yang keturunan Quraisy Arab untuk mensosialisasikan ilmunya. Karena kondisi politik yang tidak menguntungkan di Baghdad, dan keberpihakan khalifah al-Ma'mun atas aliran Mu'tazilah untuk menentang kelompok ahlu Sunnah dan ulama hadis dalam berpegang pada pendapat bahwa al-Qur'an itu adalah makhluk, membuat Imam Syafi'i sering mengembara antara Baghdad dan kota Mekkah, dalam kondisi yang tidak kondusif itu, beliau tetap melahirkan pemikiran fikih, namun fatwa-fatwanya itu banyak diralat ketika beliau berdomisili di Mesir, karena kondisi politik, budaya, dan percaturan pemikiran yang lebih moderat ketika menetap di negeri itu, sehingga melahirkan fatwa baru yang sedikit berbeda dengan fatwa sebelumnya.

3. Faktor Budaya

Bangsa Arab bukanlah bangsa yang steril dari berbagai pengaruh budaya luar. Peta geografis menunjukkan bahwa ketika Islam datang telah ada empat kebudayaan besar yang mengitari jazirah Arab. Kebudayaan Yunani, Romawi, Persia, dan India, oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa jazirah Arab pada masa awal Islam telah terjadi

⁴² Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 182

akulturasi budaya Hindu, Kristen, dan Yahudi⁴³ namun karena sikap fanatisme klan yang sangat kental pada masyarakat Arab, sehingga unsur kearaban masih tetap dapat terjaga dari unsur-unsur luar, hal ini tetap terjaga sampai masa pemerintahan bani Umayyah, terlihat unsur kearaban sangat kental mendominasi lapisan elite pemerintahan.

Madinah sebagai kota kedua umat Islam yang juga tidak terlepas dari proses akulturasi budaya Islam, Kristen dan Yahudi, proses akulturasi dan asimilasi itu terlihat dari proses interaksi Nabi dengan beberapa kaum Yahudi, interaksi-interaksi itu sedikit banyak telah memberikan peluang masuknya unsur-unsur kebudayaan Yahudi-Kristen dalam kebudayaan Arab. Fakta-fakta tentang hal itu, dapat dilihat dalam beberapa riwayat yang kadang mengandung unsur israiliyat.\

Imam Malik salah seorang tokoh dalam percaturan mazhab fikih lahir dan dibesarkan ditengah masyarakat Madinah yang sangat prulal, kebudayaan masyarakat yang terpola pada unsur Arab dan kecenderungan kuat pada penghormatan yang tinggi atas ulama menjadikan tradisi keilmuan cenderung bernuansa tekstual-normatif. Kota Madinah menjadi pusat berkembangnya corak pemikiran ahlu al-hadis, banyak ulama yang masih berpegang teguh pada corak pemikiran tersebut ketika Imam Malik memulai pengembaraan keilmuawannya. Oleh karena itu, kontruksi epistemologi keilmuawan Imam Malik didominasi corak pemikiran ahli hadis itu.⁴⁴ bukti akan pengaruh pemikiran tersebut dapat dijumpai pada kitab *al-muattba'*, kitab fikih yang bernuansa hadis-hadis. Imam Malik kemudian memosisikan diri sebagai ulama' *ahlu al-hadis*, yang berpijak kepada tekstualitas dan memasukkan beberapa konsep amal ahlu Madinah serta masalah mursalah. Masuknya dua teori itu dalam landasan metodologinya Imam Malik menunjukkan adanya elaborasi penggunaan teks dengan ketergantungan kepada tradisi

⁴³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008., h. 197

⁴⁴ A. Qadri Azizy, *Reformasi Berma'zba, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik Modern*, cet. IV; Jakarta: P.T. Mizan Publika, 2005), h. 47

yang hidup, sehingga dalam berbagai hal banyak ditemui hasil ijtihad Imam Malik yang sumber legitimasinya dari tradisi masyarakat Madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Kota Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan bani Abbasiyah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Abbasiyah kota Baghdad menjelma menjadi kota metropolitan dengan berbagai kemajuan dan pembangunan disegala bidang. Arabisasi yang semula mendominasi pemerintahan bani Umayyah terganti dengan pola non Arab yang menguasai pemerintahan Abbasiyah. Interaksi antara kebudayaan Arab dan non Arab tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan di kota Baghdad. Imam Syafi'i cukup lama tinggal di kota ini dan berinteraksi dengan kebudayaan setempat, sehingga dalam berbagai fatwa-fatwanya dibidang fikih juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan setempat. Meskipun fatwa-fatwa itu akan mengalami perubahan ketika beliau berdomisili di Mesir yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Baghdad, yaitu kebudayaan Mesir kuno.

E. Pengaruh Sosial Budaya Lahirnya Perubahan Hukum

Pemikiran hukum Islam mengenal empat macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum.⁴⁵ Kitab fikih merupakan kumpulan produk pemikiran ulama klasik yang tetap dijadikan referensi dalam memutuskan kasus-kasus modern, meskipun terjadi kesenjangan teks dengan realitas empiris, dan adanya elaborasi pemikiran dengan kondisi sosial budaya tempat penyusunnya melahirkan suatu produk hukum.

⁴⁵ Atho' Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Editor Budhy Munawar Rachman, cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina,

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perkembangan diberbagai bidang dan juga telah memegaruhi perkembangan sosial-budaya masyarakat. Pertukaran budaya dan percaturan pemikiran semakin intens terjadi dibelahan dunia. Sehingga akibat-akibat positif-negatif yang ditimbulkan dari pola interaksi itu sedikit banyak telah memengaruhi kondisi sosial-budaya suatu masyarakat. Globalisasi telah memberikan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan setiap negara atau bangsa tidak dapat terlepas dari globalisasi yang telah melanda dunia saat ini. Arus globalisasi telah meruntuhkan batas-batas dan sekat-sekat kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga negara manapun yang terbawa arus globalisasi akan berhubungan secara dekat apa yang disebut budaya lokal, pasar global, famili global, dan sebagainya.

Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan permasalahan, baik dibidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial-budaya maupun pola interaksi antara satu orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan pendekatan berbagai aspek pula. Arus globalisasi mengakibatkan perubahan yang terjadi, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Perubahan-perubahan itu tentunya membawa kecenderungan baru, baik langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling bertabrakan dan saling mengganggu.⁴⁶

Bentuk akad yang dikembangkan pada perbankan syariah meliputi. *Pertama*, akad *tijari* yang berorientasi keuntungan. Akad *tijari* melahirkan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. *Kedua*, akad *tabarru'* yang berorientasi sosial dengan prinsip kebajikan. Karena itu bank tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun. Namun dapat meminta

⁴⁶ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Cet. I;

upah sekedar menutupi biaya (*cover the cost*), dan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' tersebut. Akad tabarru' diturunkan dalam bentuk akad *qard al-basan*. Akad-akad tersebut di atas dioperasionalkan berdasarkan standar operasional produk (SOP) sesuai amanah peraturan Bank Indonesia.

F. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Salah satu kewenangan perbankan syariah adalah menerima setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari calon jemaah haji. Penetapan perbankan syariah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) didasarkan atas kriteria, yaitu industri keuangan yang berbentuk Perseroan Terbatas, memiliki program penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), memiliki rasio permodalan yang cukup, dan rasio kesehatan neraca keuangan yang baik.

Pada tahun 2018 BPKH menetapkan 31 industri keuangan bank syariah sebagai BPS-BPIH yang dikategorikan dalam 6 fungsi yang terdiri dari; a) Sebagai bank penerima; b) Sebagai bank operasional; c) Sebagai bank likuiditas; d) Sebagai bank penempatan; e) Sebagai bank nilai manfaat; f) Sebagai bank mitra investasi.⁴⁷

Bank syariah kategori penerima berfungsi menerima setoran calon jemaah haji dengan kewenangan membuka rekening tabungan dan menerima setoran awal dan pelunasan, serta mendistribusikan virtual account. Bank syariah kategori bank operasional berfungsi sebagai pengelola rekening BPKH yang diperuntukkan untuk menempatkan dana operasional BPKH terdiri dari bank syariah Mandiri, bank BRI syariah, dan bank BNI syariah, ketiga bank ini telah merger dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank syariah kategori bank likuiditas berfungsi sebagai bank pengelola likuiditas penyelenggaraan ibadah haji,

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*, Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2019, h. 27-28

yang terdiri dari bank syariah Mandiri, bank BNI syariah, bank BRI syariah (BSI), bank Aceh, Unit Usaha Syariah (UUS) bank Permata, UUS bank Jatim, UUS bank Kepri Riau. Bank syariah kategori penempatan berfungsi mengoptimalkan penempatan keuangan haji di produk tabungan dan deposito. Bank syariah kategori bank nilai manfaat berfungsi mengelola dan mengoptimalkan rekening nilai manfaat yang ada pada kas haji yang bertujuan untuk menampung nilai manfaat dari pengelolaan dana haji. Bank ini terdiri dari bank BTPN syariah, UUS bank BTN, UUS bank OCBC NISP, UUS bank Danamon, UUS bank Maybank, UUS bank Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank syariah kategori mitra investasi berfungsi mengelola rekening mitra investasi pada kas haji yang bertujuan untuk menampung dana investasi langsung dan dapat digunakan untuk investasi pembiayaan syariah. bank ini terdiri dari bank syariah Mandiri, bank BNI syariah, bank BRI syariah (BSI), bank BCA syariah, bank Mega syariah, UUS bank Danamon, UUS bank CIMB, UUS bank Maybank, UUS bank BTN, UUS bank Jateng, dan UUS bank Jatim.

BAB II

PROFIL LEMBAGA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI INDONESIA DAN TABUNG HAJI MALAYSIA

A. Profil Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia

1. Peralihan Pengelolaan Dana Haji dari Kemenag ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Hasil pengawasan komite III DPD menemukan beberapa catatan penting penyelenggaraan ibadah haji di 33 provinsi di Indonesia. Persoalan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji mencakup aspek administrasi yang rumit, penetapan kouta, penataan proses keberangkatan selama di asrama haji dan bandara, transparansi pemanfaatan dana tabungan awal, dan transportasi, akomodasi, dan pemondokan selama di tanah suci.⁴⁸

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.⁴⁹

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi kewenangan absolute Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Kewenangan tersebut mencakup aspek penyelenggaraan haji, pengelolaan dana haji dan dana abadi umat. Sedangkan pada aspek pelaksanaan ibadah haji mencakup, (1) pembinaan

⁴⁸<http://www.dpd.go.id/artikel-komite-iii-dpd-masalah-klasik-ibadah-haji-dan-pendidikan-agama-perlu-segera-diperbaiki>

⁴⁹Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

calon jemaah haji sebelum dan pasca keberangkatan. (2) pelayanan meliputi transportasi, akomodasi, dan pemondokan selama di tanah suci Madinah-Mekkah. (3) perlindungan jemaah haji dari aspek perlindungan hukum dan perlindungan jiwa melalui asuransi jiwa ketika jemaah meninggal dunia dalam masa pertanggunggunaan.

Pasca diundangkannya UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji, kewenangan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji menjadi relative. Amanah Undang-undang tentang Pengelolaan Dana Haji mengharuskan pengelolaan dana haji dikelola oleh suatu badan hukum public mandiri dan independen bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan ini dinamakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tugas dan fungsi badan ini adalah mengelola dan mengembangkan dana haji yang bersumber dari setoran awal jemaah haji dan Dana Abadi Umat (DAU) secara optimal untuk dipergunakan pada peningkatan pelayanan haji, efisiensi dan rasionalitas dalam penggunaan biaya pelaksanaan ibadah haji, dan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat Islam.

BPKH memiliki visi menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Sedangkan misinya, yaitu, (1) Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern. (2) Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis (3) Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas. (4) Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan professional. (5) Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat

2. Alasan Peralihan Kewenangan Pengelolaan Dana Haji Ke BPKH
 - a. Alasan Struktural dan Kultural

Sebelum pendirian badan pengelola keuangan haji, pengelolaan dan penyelenggaraan urusan haji menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Kewenangan ini didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI junto PMA No. 10 Tahun 2010, secara structural susunan organisasi dan tata kerja Ditjen PHU terdiri dari Sekretariat, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah, Direktorat Pelayanan Haji, dan Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

Tugas dan fungsi Dirjen PHU mencakup dua kewenangan, *Pertama*, kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. *Kedua*, kewenangan pengelolaan dana haji. Pada aspek kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah tugas penting Dirjen PHU adalah memberikan pelayanan public kepada masyarakat umum, terutama para calon jemaah haji dan umrah yang disesuaikan dengan tugas pokok yang diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan pada kewenangan pengelolaan dana haji yang orientasi utamanya adalah pengembangan dan optimalisasi dana haji melalui mekanisme investasi seharusnya dikelola oleh sumber daya manusia professional dibidang ekonomi, bisnis, dan keuangan.

Menurut Anggito Abimayu, mantan Dirjen PHU Kemenag periode 2012-2014 menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah perhajian yang seperti benang kusut harus dipisahkan antara penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pembinaan ibadah haji dengan pengelolaan dana haji. Pemisahan kewenangan pelayanan public dan pengelolaan keuangan akan lebih efektif memecahkan persoalan perhajian. Focus Dirjen PHU hanya berkaitan dengan kewenangan

pelayanan public, sehingga pelaksanaan, pelayanan, dan pembinaan haji akan lebih optimal.⁵⁰

Pasca pemisahan kewenangan pelayanan public dan kewenangan bisnis, beberapa tahun terakhir ini, penyelenggaraan dan pelayanan jemaah haji dan umrah semakin membaik. Mulai proses pendaftaran, keberangkatan, proses pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekkah-Medinah, sampai pada perlindungan dan pembinaan jemaah haji sekembalinya ke tanah air mendapatkan pelayanan yang optimal.

Secara kultural, selama beberapa tahun sebelumnya, penyelenggaraan dan pengelolaan haji menjadi kewenangan absolute kementerian agama, banyak problem mendasar yang sulit terurai, masalah proses pendaftaran, penentuan keberangkatan, pemondokan yang jauh dari Haram dan kurang representative, bis angkutan terbatas dan kurang nyaman, akomodasi dan catering sering bermasalah, service pelayanan kurang optimal, sistem perekrutan petugas haji dan team pemantau tidak kompetitif dan transparan, dan pengelolaan dana haji dan dana abadi umat yang tidak transparan dan akuntabel. Masalah-masalah klasik ini sering kali menjadi sorotan public dan lembaga legislative, namun tetap saja musim haji berlalu, masalah dan problem perhajian pun berlalu, dan akan merebak kembali menjelang keberangkatan dan proses pelaksanaan ibadah haji berikutnya.

Pada aspek keuangan, pengelolaan dana haji dan dana abadi umat yang tidak transparan dan akuntabel berdampak pada sejumlah pihak yang menjadi tersangka dan akhirnya masuk bui. Meskipun imbal hasil dari pengelolaan kedua sumber dana ini banyak pihak yang menikmatinya.

⁵⁰ Anggito Abimayu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, dalam webinar syawalan dan Seminar Ikatan Ahli Ekonomi Islam DPW DI Yogyakarta dengan BPKH, *"Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Covid-19, Alokasi Nilai Manfaat 2019*, publish 6 Juni 2020

b. Alasan Pengelolaan Dana Haji dan Bisnis

Salah satu syarat kemampuan menunaikan ibadah haji adalah mampu secara finansial, kemampuan ini diwujudkan dengan menyetor biaya perjalanan ibadah haji atau setoran awal sebesar Rp. 25.000.000 per orang dan biaya pelunasan Rp. 10.000.000 sesuai ketetapan Presiden yang disetujui oleh DPR komisi yang membidangi urusan agama berdasarkan usulan Menteri Agama.⁵¹

Menurut Alam,⁵² Pemerintah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji terdiri dari dua komponen pembiayaan yaitu, *pertama, direct cost* merupakan biaya yang dibebankan secara langsung kepada calon jemaah haji. *Kedua, indirect cost* merupakan nilai manfaat yang bersumber dari akumulasi dana haji yang diproduktifkan. Nilai manfaat ini dikonversi menjadi subsidi atas kekurangan komponen biaya *direct cost*. Unsure-unsur pembiayaan yang bersumber dari komponen *direct cost* terlihat sebagaimana dalam table berikut:

o	Unsur Peruntukan
.	Transportasi Pesawat ke/dari Arab Saudi
.	Sewa Pemonudukan/Hotel di Madinah
	Sewa Pemonudukan/Hotel di Mekkah

⁵¹Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M*, Jakarta: Komisi Pengawas Haji Indonesia, 2013, hlm. 10-11.

⁵²Kementerian Agama RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*, cet. I; Jakarta: Direktorat Haji dan Umrah, 2019, h. 24

.	
.	Living cost diserahkan kepada calon jemaah haji sebelum keberangkatan

Sedangkan peruntukan dana *inderet cost* yang merupakan dana imbal hasil pengelolaan setoran awal jemaah calon haji terlihat dalam table berikut:

	Unsur Peruntukan
	Pelayanan di Arab Saudi yang meliputi: Transportasi bus (kedatangan, kepulangan, transportasi shalawat, dan Armina); Konsumsi; <i>service fee</i> ; jasa bongkar muat danangkutan barang; dan badal haji
	pelayanan di dalam negeri yang meliputi: akomodasi dan konsumsi di Embarkasi; Paspor; DAPIH, gelang identitas; buku manasik dan pelaksanaan manasik; <i>passenger service charge</i> jemaah; asuransi jiwa dan kecelakaan;
	operasional di dalam negeri meliputi: akomodasi dan konsumsi petugas kloter dan PPIH di embarkasi; operasional asrama haji embarkasi; operasional PPIH di tingkat Pusat, PPIH Kanwil Kemenag Provinsi, PPIH embarkasi, PPIH Kakemenag Kabupaten Kota, dan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di KUA Kecamatan; penyediaan fasilitas asrama haji embarkasi dan transit; operasional pemeliharaan, dan sewa jaringan sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT); media center haji; pengendalian, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan ibadah haji; dan biaya cadangan

	(<i>safeguarding</i>)
	operasional di Arab Saudi meliputi: <i>general service fee</i> petugas; akomodasi dan konsumsi petugas haji; sewa kantor; wisma, gudang, dan tempat pelayanan; transportasi petugas haji; perlengkapan dan operasionalkanot misi haji; penasehat hukum, notaris, dan penterjemah' honor dan tunjangan pegawai kantor misi haji;
	Biaya sewa pemondokan di Madinah dan Makkah

Data tahun 2019 jumlah setoran awal calon jemaah haji Indonesia telah mencapai angka 113 triliun rupiah. Angka ini akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah calon jemaah haji yang terus mendaftar secara regular mencapai 600 ribu orang pertahun, sementara itu, sejak tahun 2013 pemerintah Arab Saudi melakukan memangkas kuota haji untuk Indonesia sebanyak 20% sehingga total kouta haji yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Pemerintah Arab Saudi hanya berkisar 168.800 ribu calon jemaah haji pertahun. Jumlah ini termasuk haji regular, onh plus, dan petugas haji. Pembatasan kuota ini mengakibatkan masa tunggu calon jemaah haji rata-rata 10-15 tahun.⁵³

Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya bidang pengelolaan dana haji memiliki kewenangan untuk mengembangkan dana haji pada sector produktif dengan imbal hasil yang dapat menutupi subsidi pembiayaan haji yang terus membengkak setiap tahunnya. Kewenangan ini harus disertai dengan kompetensi sumber daya manusia, yaitu SDM berkompeten dibidang ekonomi, keuangan, dan bisnis, namun faktanya, SDM bidang

⁵³ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, cet. I; Jakarta, 2016), h. 5

pengelolaan dana haji minim kompetensi di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis. Selain itu, tupoksi kementerian Agama adalah pelayanan public yang bersifat administrative, sehingga tidak memungkinkan fokus dalam pengelolaan dan pengembangan dana haji.⁵⁴

Sumber daya manusia merupakan actor penting dalam pengembangan bisnis. Target pertumbuhan pendapatan dapat diperoleh, jika pimpinan dapat mengambil kebijakan terkait perngorganisasian SDM tersebut. Seperti jenis kualifikasi dan kuantitas SDM yang diperlukan, kompetensinya mendukung untuk pengelolaan padat karya atau padat teknologi, kebijakan terkait distribusi fungsi dan tupoksinya, kebijakan terkait budaya dan iklim kerja, serta reward atas pencapaian dari target yang ditentukan.

Factor kualifikasi dan kompetensi SDM pada Direktorat Haji dan Umrah, sehingga pengelolaan dana haji harus dialihkan kepada lembaga yang memiliki unsur SDM berkualifikasi dibidang bisnis dan keuangan. namun perlu dicatat bahwa salah satu prinsip pengelolaan haji harus berbasis syariah, karena itu budaya dan prinsip-prinsip syariah harus menjadi indicator pengembangan SDM pada BPKH. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari, *siddiq* (jujur), *tabligh* (transparansi), *amanah*, dan *fathanah* (bertanggung jawab).

Kompetensi dibedakan dalam dua kategori, yaitu, a) Komptensi Utama. Kompetensi ini sangat berkaitan dengan unsur penghayatan atas visi, misi, dan nilai-nilai organisasi atau perusahaan. Karena itu, setiap perusahaan mempunyai nilai prinsip yang menjadi indicator dan acuan untuk diimplementasikan dan diinternalisasikan pada prilaku karyawannya. b) Tekhnikal Kompetensi. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pengetahuan dan skill yang sangat spesifik. Karena

⁵⁴Sunaryo, *Kasubdit Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji Kementerian Agama RI Pusat*, wawancara, tgl 5 Agustus 2019

itu, kemampuan ini berkaitan erat dengan tupoksi dan kualifikasi pekerjaan pada suatu jabatan dalam suatu perusahaan.

Sumber daya manusia badan pengelola keuangan haji harus memiliki karakter building yang berbeda dengan perusahaan lainnya dibidang fundraising dan nirlaba. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman harus menjadi *way of life* dan menjadi basic dalam sistem kerja perusahaan. Budaya kapitalisme-materialis-hedonistis yang menjadi bagian dari sistem kerja perusahaan konvensional lainnya harus ditekan dan diminimalisir.

2. Alasan Regulasi

Pasca diundangkannya UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji, kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), badan ini dibentuk berdasarkan Peppres Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan ini berfungsi mengelola dan mengembangkan dana haji pada sector-sektor yang diamanahkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji, bahwa investasi dana haji diinvestasikan pada produk perbankan, surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Secara de jure, kewenangan pengelolaan dan pengembangan dana haji beralih dari Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag RI ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kehadiran badan ini menjadi titik tolak pengelolaan dana haji secara mandiri dan professional setelah sekian lama menjadi isu dan perdebatan politik. Kehadiran badan pengelolaan dana haji ini mereduksi peran Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan menempatkannya pada kewenangan administrasi dan pelayanan public.

Visi BPKH

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat

Misi BPKH

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPHH melalui kerjasama strategis
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat

B. Profil Lembaga Tabung Haji Malaysia

Lembaga Tabung Haji (TH) merupakan lembaga berbadan hukum yang tertuang di bawah Akta Lembaga Tabung Haji, 1995 (Akta 535). Tujuan utama TH adalah penyelenggaraan dan pelayanan urusan Haji Malaysia, serta pengelolaan dana haji yang bersumber dari tabungan jemaah calon haji Malaysia. Dana setoran awal tersebut diinvestasikan pada sektor perladangan, hartanah, pembinaan, perbankan, teknologi maklumat, minyak & gas asli, pelancongan atau biro travel, perkhidmatan dan makanan halal. TH mempunyai 119 buah cabang atau cawangan di seluruh bagian negara Malaysia dan terdapat satu cabang atau satu cawangan di Jeddah, Arab Saudi.

Sejarah berdirinya Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) diawali dari gagasan Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz pada tahun

1959 M. Gagasannya muncul akibat kondisi umat Islam Melayu Malaysia yang rela menjual harta bendanya berupa, tanah dan hewan ternak untuk menunaikan ibadah haji, namun ironisnya, sepulang dari tanah suci mereka tidak memiliki bekal ekonomi yang cukup untuk kelangsungan usaha dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, mayoritas umat Islam Malaysia kurang tertarik menyimpan uangnya di perbankan konvensional akibat isu riba yang tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam. Umumnya disimpan di rumah melalui instrumen tradisional seperti dibawah bantal, disimpan ditempatam lalu ditanam di bawah tanah. Gambaran realitas umat Islam Malaysia di tahun 1960-an inilah yang menginspirasi prof. Diraja Ungku Abdul Azis menyarankan pembentukan Perbadanan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji(PWSBH).

Tahun 1963 Badan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji (PWSBH) terbentuk berdasarkan payung hukum Akta Parlimen No. 34 Tahun 1962. Namun resmi beroperasi pada tahun 1963 di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia. Sejak itu PWSBH resmi menerima setoran dana haji dengan membuka kaunter tabungan haji untuk umat Islam Melayu Malaysia. Jumlah jemaah calon haji yang membuka rekening tabungan mencapai 1,281 orang dengan nilai tabungan setoran awal sebesar RM. 46.610, tujuan pembukaan rekening tabungan haji untuk memastikan memastikan simpanan jemaah calon haji bebas dari unsur riba dan belum mengharapkan imbal hasil dari investasi dana setoran awal tersebut.⁵⁵

Tahun 1969 Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH) didirikan dengan konsep penggabungan antara Perbadanan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji (PWSBH) yang berdiri tahun 1963 dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji yang berdiri pada tahun 1951. Lembaga Urusan dan Tabung Haji didirikan berdasarkan payung hukum Malaysia Akta No. 8 tahun 1969 Tentang Lembaga Urusan dan Tabung Haji dan

⁵⁵www.tabunghaji.gov.my, diakses tgl 1 September 2019

di susul dengan Akta A 168 LUTH (Pindaan) 1973, kemudian Akta ini direvisi dengan Akta 535 tahun 1995 dengan mengamanahkan perubahan Lembaga Urusan dan Tabung Haji menjadi Lembaga Tabung Haji (LTH) pada tanggal 28 Agustus 1997 sejak saat itu Lembaga Tabung Haji resmi menjadi nama baru dengan singkatan Tabung Haji (TH) yang digunakan sampai saat ini. Tujuan utama pembentukan LTH adalah, *pertama*, memberikan pelayanan terbaik, sempurna, dan memuaskan kepada jemaah haji Malaysia dalam urusan menunaikan kewajiban haji, *kedua*, Memberikan keuntungan maksimum bagi jemaah calon haji yang menabung atau menyimpan uang di Tabung Haji.

Dualisme kewenangan tabung haji Malaysia, yaitu berfungsi sebagai pengelolaan dana haji dan sekaligus kewenangan pelayanan haji mulai dari proses pendaftaran, sebelum keberangkatan, fase keberangkatan, dan fase kepulangan jemaah haji.⁵⁶

1. Visi

Lembaga tabung haji Malaysia memiliki visi sebagai “Tonggak Kejayaan Ekonomi Ummah dan Pengurusan Haji Terbilang”

2. Misi

Adapun misi LTHM sebagai berikut:

- a. Memperkasakan Ekonomi Ummah
- b. Sentiasa Giat Mencari Pelaburan Strategik Global Dan Lokal Bagi Pertumbuhan Berterusan
- c. Menggembeleng Dan Memperkaya Modal Pendeposit
- d. Memberikan Perkhidmatan Cemerlang Yang Berterusan
- e. Memudah Dan Menyempurnakan Urusan Jemaah Ke Arah Haji Mabrur

⁵⁶Muhammad Khafidz bin Aini, *Eksekutif Hal Ehwal Awam dan Komunikasi Korporat Tabung Haji Malaysia*, wawancara tgl 29 Agustus 2019 di kantor Tabung Haji Malaysia.

- f. Memberi Pulangan Yang Kompetitif, Halal dan Toyyiban

3. Nilai Teras

Lembaga tabung haji memiliki prinsip nilai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji. Berikut nilai-nilai tersebut:

- a. Komited
- b. Profesional
- c. Kerja Berpasukan
- d. Mencrima Perubahan
- e. Prihatin dan Penyayang⁵⁷

⁵⁷www.tabunghaji.gov.my, diakses tgl 1 September 2019

BAB III

PENGELOLAAN DANA HAJI

1. Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji

Secara leksikal, kata manajemen bersumber dari bahasa latin, dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* (melakukan). Kemudian kata ini digabung menjadi manager dengan menangani. Kata “managere” diserap dalam bahasa Inggris dengan berbagai derivasi, “to manage” (kata kerja), “management” (kata benda), dan “manager” untuk subyek atau orang yang melakukannya. Kata “management” diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan perubahan kata menjadi manajemen yang berarti pengelolaan.

Robbin Stephen S dan Cotlter Marry mendefinisikan manajemen sebagai proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁵⁸

Sedangkan Griffin Ricky W dan Ebert Donald J merumuskan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.⁵⁹

Secara terminology, para pakar mendefinisikan manajemen sebagai seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*The art of getting things done through people*). Sapre menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

⁵⁸ Ahnad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah*, cet. I; Jakarta: PT. Salemba Diniyah, 2019, h. 24

⁵⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, h. 19

Menurut Hughes, et al. Manajemen merupakan aktifitas yang berkaitan dengan efisiensi, perencanaan, kertas kerja, prosedur, pelaksanaan regulasi, pengawasan, dan konsistensi. Walaupun demikian, esensi manajemen dapat dipandang, baik sebagai proses (fungsi) yang meliputi POAC.⁶⁰

Kata manajemen dalam bahasa Arab dipedadankan dengan istilah “*idarab*”. Kata “*idarab*” bersumber dari kata “*adartu al-syai’*”. dalam Elias’ Modern Dictionary English Arabic kata management (inggris) sepadan dengan kata “*tadbir*”, “*idarab*”, “*siyasah*” dan “*qiyadab*” dalam Bahasa Arab. Kata “*tadbir*” merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja “*dabbara*” -“*yudabbiru*”-“*tadbiran*”, yang bermakna tertib, teratur, pengurusan, perencanaan dan persiapan.⁶¹

Sedangkan secara istilah, Muhammad Abdul Jawwad memberikan pengertian bahwa manajemen adalah aktivitas menertibkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia mampu mengurutkan, menata dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.⁶²

Secara terminology, manajemen syariah merupakan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan, keikhlasan, dan amal shaleh untuk mengatur organisasi berdasarkan aturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.⁶³

⁶⁰Husaini Usman, *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) h. 6.

⁶¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 13

⁶²Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 119.

⁶³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *{Pengantar Manajemen Syariah}*, cet. 1; Jakarta: Rajawali Press, 2019, h. 3

Berdasarkan definisi para pakar di atas, maka dapat disimpulkan manajemen sebagai suatu proses yang bertujuan mengelola dan melibatkan sumber daya manusia dan lainnya untuk menggapai suatu tujuan. Manajemen jika dikaitkan dengan syariah, maka pengelolaan sumber daya tersebut, mulai dari input, proses, dan output suatu kegiatan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola islami.

Fungsi-fungsi manajemen syariah memiliki ruang lingkup yang sama dengan fungsi-fungsi manajemen secara umum, yaitu memiliki fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengendalian, dan fungsi evaluasi dan pengawasan. Karena itu, salah satu ciri yang membedakan dalam struktur manajemen syariah adalah pada aspek pengawasannya, yaitu wajib mendapat pengawasan dari dewan pengawas syariah.

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas mengamanahkan bahwa semua perusahaan syariah harus memiliki dewan pengawas syariah. Karena itu secara internal, dewan pengawas syariah menjadi bagian internal dalam suatu perusahaan.

Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 47, yaitu, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah, *Pertama*, mengajukan saran dan nasehat untuk dewan Direksi. *Kedua*, Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah agar sejalan berdasarkan prosedur fatwa DSN-MUI dalam pemenuhan prinsip syariah.

Sedangkan implementasi pemenuhan tupoksi dan pertanggung jawaban DPS meliputi: (a) Mengevaluasi dan penilaian serta member kepastian atas terpenuhinya standar Prinsip Syariah pada standar operasional dan produk bank syariah. (b) Melakukan pengawasan

terhadap proses produk-produk baru yang dikembangkan oleh bank syariah dan memastikannya memenuhi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (c) Melakukan permintaan nasehat fatwa kepada DSN-MUI atas produk-produk baru bank syariah yang belum difatwakan. (d) Melaaksanakan proses *review* berkala dan terjadwal untuk memastikan terpenuhinya standar Prinsip Syariah pada sistem penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah (c) Dapat mengajukan permintaan informasi dan big data dalam ruang lingkup aspek syariah pada satuan kerja bank syariah sesuai dengan tupoksinya.⁶⁴

Badan pengelola Keuangan Haji Indonesia memiliki dewan pengawas yang terdiri dari 7 orang. Salah satu dari unsur dewan pengawas BPKH merupakan unsure ormas Islam dan memiliki kompetensi dibidang syariah. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa sistem investasi BPKH memenuhi kriteria dan standar prinsip-prinsip syariah.

Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji berasaskan salah satunya adalah prinsip syariah. adapun yang dimaksud dengan asas prinsip syariah adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kaffah atau menyeluruh.⁶⁵

2. Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah

Pelayanan haji yang dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia dan diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Agama No. 244 tahun 1999

⁶⁴ Rahman Ambo Masse, *Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia*, jurnal Diktum, volume 16 No 2 (2018)

⁶⁵ Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

tentang penyelenggaraan haji dan umrah serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam hal ini Departemen Agama dalam menjalankan pelayanan jamaah haji adalah memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh jama⁶⁶ah haji mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci Makkah, yang bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk oleh pemerintah

a. Kuota Haji

Sesuai dengan hasil keputusan rapat menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 ditentukan bahwa kuota jumlah jamaah haji setiap negara sebanyak 1:1000 dari total jumlah penduduk beragama islam di negara bersangkutan. Sehingga sejak 2013 kouta jamaah haji Indonesia mencapai 211.000 orang yang disesuaikan dengan total jumlah penduduk muslim di Indonesia.

Namun sejak renovasi dan pengembangan kawasan masjid Haram tahun 2013, maka pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jamaah haji untuk seluruh negara yang mengirim calon jamaah haji sebanyak 20%, sehingga kuota jamaah haji Indonesia pada tahun 2013 menyusut menjadi 168.800 jamaah dengan rincian 155.200 (91.94%) haji regular, dan 13.600 (8,06%) haji khusus. Namun pada tahun 2017 Indonesia mendapat tambahan kuota sebanyak 10.000 jamaah haji. Dan pada tahun 2020 dan 2021 pemberangkatan calon jamaah haji ditiadakan akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pelaksanaan haji tetap dilaksanakan dengan kuota haji bagi imigran yang menetap di Arab Saudi dan jalur undangan dengan sistem protocol kesehatan yang ketat.

⁶⁶<http://pelayanan.jamaah.haji.dan.umrah.com> diakses pada Juli 08 2019

b. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terdiri dari BPIH regular dan BPIH khusus. Setoran BPIH regular sebesar Rp. 25.000.000,- dan setoran pelunasan sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan setoran BPIH khusus sebanyak USD 4.000.00 untuk setoran awal. Penyetoran BPIH, baik regular maupun khusus disetor di bank penerima setoran BPIH yang ditunjuk oleh pemerintah.

Besaran biaya perjalanan ibadah haji setiap tahunnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR. Komponen BPIH terdiri dari komponen biaya langsung atau *direct cost*, dan biaya tidak langsung atau *indirect cost*. Biaya langsung adalah biaya yang langsung dibayar oleh jemaah haji, sedangkan biaya tidak langsung adalah BPIH yang berasal dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.⁶⁷

Biaya perjalanan ibadah haji secara riil mencapai Rp. 70-75 juta per orang. Karena itu, melalui pengelolaan keuangan haji yang sehat dan akuntabel, maka sebagian BPIH ini dapat tertutupi dan tidak memberatkan jemaah haji. Subsidi nilai manfaat hasil kelolaan badan keuangan haji setiap tahun mencapai angka 7 triliun rupiah. Karena itu, penempatan dana haji pada berbagai instrument investasi yang sesuai prinsip syariah merupakan perwujudan terhadap tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan ibadah haji yang merata dan berkeadilan.

c. Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan jual beli barang atau jasa.⁶⁸ Menurut Gronroos menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*, cet. I; Jakarta: Direktorat Haji dan Umrah, h. 19

⁶⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ke-3, h. 446.

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan adalah hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan yang memberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.⁶⁹

Sedangkan menurut H.A.S. Moenir, pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapat kepuasan.⁷⁰

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan.

1. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:⁷¹

- 1) Prosedur pelayanan: Prosedur pelayanan yang dibukukan bagi pemberi dan penerimaan pelayanan termasuk pengaduan.

⁶⁹ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 2.

⁷⁰ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 17.

⁷¹ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 24.

- 2) Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- 3) Biaya pelayanan : Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan.
- 4) Produk pelayanan : Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Sarana dan prasarana : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan : Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.⁷²

2. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik

Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada jamaah dengan standar yang sudah ditentukan. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki. Banyak perusahaan yang dianggap selalu yang terbaik dimata jamaah. Karena jamaah akan menjadi setia terhadap produk yang akan ditawarkan. Disamping itu, perusahaan berharap pelayanan yang diberikan kepada jamaah dapat ditularkan kepada calon jamaah lainnya. Hal ini merupakan promosi tersendiri bagi perusahaan yang berjalan terus secara berantai dari mulut ke mulut. Dengan kata lain, pelayanan yang baik akan meningkatkan image perusahaan dimata jamaahnya. Image ini harus selalu dibangun agar citra perusahaan dapat selalu meningkat.

Dengan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

⁷² Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 24.

Sebuah kualitas pelayanan atau sebagai keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan.⁷³

Dalam prakteknya pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Hal yang mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan) yang melalui jamaah secara tepat dan cepat. Disamping itu, karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan tanggung jawab penuh terhadap jamaah.

Pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya sarana serta prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya sarana dan prasarana juga harus dioperasikan oleh manusia yang berkualitas pula. Jadi dapat dikatakan kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama lain.

Berikut ini beberapa ciri pelayanan baik bagi perusahaan dan karyawan yang bertugas melayani jamaah:⁷⁴

- a. Tersedianya karyawan yang baik : Kenyamanan jamaah sangat tergantung pada karyawan yang melayaninya. Karyawan harus ramah, sopan, santun dan menarik. Disamping itu, karyawan harus tetap tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar, karyawan harus mampu memikat dan mengambil hati jamaah sehingga jamaah semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kinerja karyawan harus rapi, cepat dan cekatan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik: pada dasarnya jamaah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani jamaah,

⁷³ Kasmir, *Etika Customer Service*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 150.

⁷⁴ Kasmir, *Etika Customer Service*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 186-187.

salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan selain kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh agen travel adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang penerima tamu harus dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat jamaah merasa nyaman dan betah dalam ruangan tersebut.

- c. Dapat bertanggung jawab: sejak awal hingga selesai dapat bertanggung jawab. Artinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus bisa melayani dari awal sampai selesai. Jamaah akan merasa puas jika karyawan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. Jika terjadi sesuatu karyawan yang dari awal menangani masalah tersebut, secara segera mengambil alih tanggung jawabnya.⁷⁵
- d. Mampu melayani secara cepat dan tepat. Artinya dalam melayani jamaah diharapkan karyawan harus melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Layanan yang diberikan sesuai dengan jadwal untuk pekerjaan tersebut dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar perusahaan dan keinginan jamaah.
- e. Mampu berkomunikasi. Artinya karyawan harus mampu berbicara kepada jamaah. Karyawan juga harus dengan cepat memahami keinginan jamaah. Selain itu, karyawan juga harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh jamaah.
- f. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Untuk menjadi karyawan yang khusus melayani jamaah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Karena tugas karyawan selalu berhubungan dengan jamaah, karyawan perlu dididik

⁷⁵ Kasmir, *Etika Customer Service*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 186-187.

khususnya mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi masalah-masalah jamaah atau kemampuan dalam bekerja. Kemampuan bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan sesuai dengan waktu yang dalam bekerja. Kemampuan bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

- g. Berusaha memahami kebutuhan jamaah. Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh jamaah. Karyawan yang lamban akan membuat jamaah lari. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan jamaah secara cepat.
- h. Mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah. Kepercayaan calon jamaah kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon jamaah mau menjadi konsumen perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga jamaah yang lama perlu dijaga kepercayaannya agar tidak lari. Semua ini melalui karyawan dari perusahaan itu sendiri.⁷⁶

Kotler dan Keller yang dikutip oleh Tjiptono menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, dimana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penelitian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa yaitu perusahaan akan tetapi sudut pandang penilaian persepsi adalah pelanggan. Dalam hal ini, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan nilai menyeluruh atas keunggulan atau jasa.⁷⁷

⁷⁶ Kasmir, *Etika Customer Service*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 186-187.

⁷⁷ Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta: Andi, 2001, h. 10.

Dalam hal tersebut ada lima dimensi kualitas pelayanan yang baik hal tersebut didefinisikan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip oleh Tjiptono, meliputi:

1. Keandalan (*reliability*) yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang disajikan dengan tepat dan terpercaya.
2. Responsive (*responsiveness*) keinginan untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin.
3. Keyakinan (*assurance*) yaitu pengetahuan dan kesopanan santunan para pegawai perusahaan serta kemampuan menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap perusahaan.
4. Empati (*empathy*) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
5. Berwujud (*tangible*) yaitu penampilan fisik, peralatan personil dan media komunikasi.⁷⁸

Pelayanan ibadah haji dan umrah dapat dipahami sebagai segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar calon jamaah haji dan umrah sesuai dengan hak-hak dasarnya atau suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara ibadah haji dan umrah. Manajemen pelayanan ibadah haji dan umrah adalah tanggung jawab pemerintah atau lembaga bimbingan haji, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demokratisasi saat ini, maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik dan peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik tersebut juga semakin kuat dan terbuka. Pada saat ini kinerja manajemen pelayanan ibadah haji dan umrah sudah menjadi ukuran kinerja pemerintah. Dalam berbagai kesempatan ketidakpuasan jamaah haji dan umrah atas kinerja manajemen pelayanan ibadah haji dan umrah ini kian banyak diungkapkan oleh masyarakat secara terbuka. Masyarakat

⁷⁸ Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta: Andi, 2001, h. 14.

menuntut penyelenggaraan manajemen pelayanan lebih responsif atas kebutuhan dan penyelenggara manajemen pelayanan ibadah haji dan umrah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau organisasi harus meningkatkan manajemen pelayanan terhadap konsumen atau jamaah haji dan umrah sehingga jamaah haji dan umrah merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji dan umrah tersebut⁷⁹.

Kriteria penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah harus memegang prinsip antara lain⁸⁰:

- a) Kesederhanaan.
- b) Kejelasan.
- c) Kepastian dan ketepatan waktu.
- d) Akorasi.
- e) Tidak diskriminatif.
- f) Tanggung jawab.
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana.
- h) Kemudahan akses.
- i) Kejujuran.
- j) Kecermatan.
- k) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
- l) Keamanan dan kenyamanan.

Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah meliputi kegiatan di tanah air hingga tiba di tanah suci, dan pemulangan ke tanah air lagi. Mulai dari pengaturan kuota, pendaftaran, pelunasan, penyelesaian administrasi dan dokumen, bimbingan dan manasik haji, penyiapan petugas, pengelompokkan dan penyediaan angkutan,

⁷⁹Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2-4

⁸⁰Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Pola Pembinaan Jama'ah Haji*, (Jakarta, 2007), h. 1

akomodasi, operasional pemberangkatan, pelaksanaan ibadah haji dan pemulangan. Dalam pelayanan ibadah haji dan umrah, antara lain:

- a) Pendaftaran.
- b) Konsumsi.
- c) Kesehatan.
- d) Transportasi darat dan udara.
- e) Penginapan.⁸¹

d. Pembinaan.

Dalam manajemen pembinaan ini terdapat dua komponen pokok, yaitu pembimbing dan calon jamaah haji dan umrah yang akan dibimbing, yaitu:

- a) Pembimbing

Keberhasilan manajemen pelaksanaan ibadah haji dan umrah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga pembimbing dan pembina tersedia di lembaga bimbingan haji dan umrah. Tenaga pembimbing bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pembimbing haji dan umrah secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

- b) Calon jamaah haji dan umrah

Calon jamaah haji dan umrah juga perlu diatur sehingga tujuan bersama akan tercapai dan terlaksana. Manajemen calon jamaah haji dan umrah adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan calon jamaah haji dan umrah, mulai dari pendaftaran sampai dengan kembalinya ke tanah air. Dengan demikian pembinaan haji

⁸¹Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Pola Pembinaan Jama'ah Haji*, (Jakarta, 2007), h. 1

bertujuan untuk mengkoordinasi, mengarahkan, dengan membangun kemampuan secara bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji demi terlaksananya cita-cita ibadah haji.

Tujuan pembimbingan ibadah haji diarahkan tercapainya haji yang sah dan mabrur. Karena itu, melalui proses pembimbingan haji diarahkan kepada unsur-unsur terpenuhinya rukun-rukun haji sehingga tercapai haji yang sah, bukan mengarahkan kepada aspek-aspek keutamaan haji. Selain itu, pembimbingan juga ditekankan kepada hal-hal yang mengedepankan aspek kemudahan.

Metode pembimbingan dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang meliputi, *pertama*, pembimbingan pra keberangkatan. Pembimbingan ini dilaksanakan 8 kali yang terdiri dari 6 kali di kantor KUA dan 2 kali di Kemenag Kabupaten/Kota. Untuk provinsi selain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, maka durasi pembimbingan sebanyak 10 kali, yaitu 8 kali di KUA dan 2 kali manasik missal di Kemenag Kab/Kota.⁸²

Pembimbingan dilaksanakan dengan metode tatap muka, peragaan, praktikum manasik, pemutaran audio/visual manasik, dan pemutaran video manasik di pesawat terbang saat ke keberangkatan dan untuk memudahkan para jemaah mereview kembali terkait manasik haji, maka setiap jemaah haji dilengkapi dengan buku paket manasik yang berisi buku saku bimbingan manasik dan petunjuk perjalanan haji.

e. Perlindungan

Perlindungan adalah harapan yang dimiliki masing-masing jemaah dalam menunaikan ibadah di tanah suci dan semua itu terfasilitasi dengan cara menggunakan asuransi ketika jemaah masih berada di dalam

⁸² Kementerian Agama RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*, cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, h. 32

pesawat, akan tetapi disaat jamaah sudah berada di tanah suci keselamatan jiwa masing-masing sudah menjadi tanggung jawab individu dan perusahaan/lembaga. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap jama'ah haji dan umrah dengan menggunakan asuransi. Adapun pengertian asuransi haji adalah suatu bentuk saling menanggung diantara para jamaah dengan tujuan untuk memberi santunan kepada ahli warisnya jika jama'ah haji meninggal dunia pada saat menunaikan ibadah haji, yaitu sejak jama'ah meninggalkan rumah hingga tiba kembali dirumah.⁸³

Didalam penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif dapat terwujud apabila pihak penyelenggaraan haji mampu memberikan:

1. Pembinaan, meliputi pembimbingan, penyuluhan dan penerangan.
2. Pelayanan, meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan dan akomodasi.
3. Perlindungan, meliputi keselamatan dan keamanan. Kesempatan untuk melaksanakan/menunaikan ibadah haji, serta penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terjangkau oleh calon jamaah haji.

Peran pemerintah di dalam penyelenggaraan haji tidak hanya dalam hal pengendalian langsung maupun tidak langsung, tetapi juga operasi langsung. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama berperan selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan, dan selaku operator yaitu melaksanakan secara langsung manajemen dan operasional penyelenggaraan haji.

⁸³ Muhibb Abdul wahab, *Asuransi dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits* (Jakarta: PBB UIN, 2003), h.1.

Sistem sentralistik membawa konsekuensi terhadap jaminan perlindungan jamaah haji. Pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Arti yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal pelaksanaan ibadah haji.

Undang-undang No.13 Tahun 2008 belum bisa menjamin dan memberikan perlindungan bagi calon jamaah haji karena ketidakjelasan kedudukan hukum oleh calon jamaah haji. Apabila terjadi masalah pada calon jamaah haji atau juga disebut sebagai konsumen bisa meminta pertanggung jawabannya sesuai dengan hak-hak konsumen (jamaah haji) sesuai pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen (jamaah haji) harus mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak atas informasi yang benar dan lain-lain atau juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Jamaah haji dan umrah yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci harus dijamin perlindungannya. Perlindungan yang menyangkut istithaah di sini terkait dengan tiga hal pokok, yaitu kenyamanan, kendaraan dan kesehatan antara lain:

a) Kenyamanan

Kenyamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keadaan yang nyaman, kesegaran, dan kesejukan. Nyaman merupakan kunci pokok dalam setiap keadaan. Oleh karena itu seseorang yang melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah harus dilindungi kenyamannya. Nyaman pada pendaftaran, pembinaan, pemberangkatan ke tanah suci, tempat istirahat, makan dan minum, melakukan ibadah, dan kepulangan ke tanah air. Nyaman dari perampok, pencopet, penilangan dari polisi Arab Saudi, penipuan dan kelaparan.

b) Kendaraan

Kendaraan merupakan syarat utama menuju ke tanah suci. Baik kendaraan udara maupun darat. Kendaraan calon jamaah haji dan umrah harus jelas dan pasti untuk menghindari penundaan pemberangkatan, jamaah terlantar ataupun gagal berangkat

Sistem transportasi darat yang diberikan kepada jamaah haji selama berada di Arab Saudi terdiri dari transportasi antar kota perhajian, transportasi shlawat, dan transportasi Armuzna.

c) Kesehatan

Sehat adalah syarat bagi individu bagi jamaah haji dan umrah. Pemeriksaan dan pengontrolan dari dokter harus tetap dilakukan baik saat pemberangkatan, pelaksanaan, dan kepulangan jamaah haji dan umrah.³⁸ Oleh karena itu tim medis harus siap sedia untuk melayani jamaah haji dan umrah, terutama yang sudah lanjut usia guna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan⁸⁴.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:⁸⁵

1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibukukan bagi pemberi dan penerimaan pelayanan termasuk pengaduan.

⁸⁴Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan, 2009), h.12

⁸⁵ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 24.

2. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan.
4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan : Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.⁸⁶

Haji menurut pengertian bahasa berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu.⁸⁷ Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan haji secara bahasa adalah menuju kemuliaan. Sedangkan pengertian haji secara istilah adalah amalan-amalan tertentu dan cara tertentu pula.⁸⁸ Adapun pengertian umrah, kata umrah berasal dari *Umar* yang berarti ziarah, yakni menziarahi ka'bah dan berthawaf disekelilingnya, kemudian bersa'i antara shafa dan marwa, serta mencukur rambut (*tahalul*) tanpa wukud di arafah.⁸⁹

Pelayanan haji yang dikelola oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan umrah serta Keputusan

⁸⁶ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 24.

⁸⁷ Philip Kotler, h. 108

⁸⁸ Abdul Rahman Al-Zaziri, *Fikih Empat Madzab Bagian Ibadah (Puasa, Zakat, Haji, Kurban)* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), h. 77.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji* (Jakarta: 2003), h. 3.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/296 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam hal ini ini Kementerian Agama menjalankan pelayanan jamaah haji adalah memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh jamaah haji mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci Makkah, yang bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian manajemen pelayanan haji dan umrah adalah serangkaian aktifitas atau dikatakan sebuah manajemen proses, yaitu sisi manajemen mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani.⁹⁰

Badan pengelola keuangan haji Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Pasal 1 angka 4 UU No. 34 Tahun 2014 Tentang {Pengelolaan Dana Haji menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.⁹¹ Lahirnya Undang-undang ini memberikan kewenangan absolut pengelolaan dana haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebelumnya pengelolaan dana haji menjadi kewenangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Secara manajemen, adanya dua kewenangan yang berbeda fungsi pengelolaan berdampak pada inefisiensi, sehingga diperlukan distribusi kewenangan. Pengelolaan dana haji tidak optimal jika dipadukan dengan kewenangan yang berorientasi pelayanan publik, karena itu, kewenangan pengelolaan dana haji ini didistribusikan pada badan yang berorientasi korporasi dan nirlaba.

⁹⁰ A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 186.

⁹¹ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji Pasal 1 angka 4

Organisasi dan tata kelola badang pengelola keuangan haji terdiri dari dua pilar utama, yaitu, *pertama*, Badan Pelaksana (BP), *kedua*, Dewan Pengawas (DP). Badan pelaksana memiliki struktur organisasi yang terdiri dari; 1. Bidang hukum dan kepatuhan, 2. Bidang Renbang, 3. Bidang Keuangan, 4. Bidang Investasi, 5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemaslahatan, 6. Bidang Operasional, 7. Bidang Manajemen Resiko. Sedangkan Dewan Pengawas memiliki perangkat yang terdiri dari; 1. Bidang Audit, 2. Bidang Investasi dan Resiko, 3. Bidang Syariah.⁹² Struktur organisasi BPKH sebagai berikut:

Pasal 22 dan 23 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji, BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Sedangkan fungsinya mencakup Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji; Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji; Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji; dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tersebut, maka BPKH memiliki kewenangan menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji memberikan tugas dan kewenangan Badan Pelaksana dibidang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan fungsi Badan Pengawas diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 34 Tahun 2014, yaitu memberikan

⁹²www.bpkh.co.id, *Struktur Badan Pengelola Keuangan Haji*, diakses Agustus 2019

penilaian dan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Badan pelaksana dan Dewan pengawas diberikan kewenangan pengelolaan dan penginvestasian dana haji dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip syariah dan apabila terjadi resiko yang diakibatkan atas kelalaian dalam pengelolaan dan investasi, maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.⁹³

Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji beraskan enam asas, yaitu, *pertama*, harus sesuai dengan prinsip syariah, *kedua*, mengedepankan prinsip kehati-hatian, *ketiga*, memiliki nilai manfaat, *keempat*, bertujuan nirlaba, *kelima*, dikelola secara transparan, *keenam*, dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji menyebutkan bahwa BPKH berfungsi sebagai badan pengelola dana haji dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, penggunaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang rasional dan efisien, hasil pengelolaan dana haji memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.⁹⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 ini merupakan payung hukum kerangka strategis arah kebijakan BPKH sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

⁹³Pasal 50 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji

⁹⁴Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji

Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan\ Dana Haji:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
2. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH
3. Peningkatan manfaat bagi kemaslahatan umat islam



Rumusan kebijakan didasarkan pada Pasal 11 Perpres No. 110 Tahun 2017, yaitu mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip syariah, optimal, efisien, dan berhati-hati yang bertumpu pada peningkatan kemampuan dan kesehatan keuangan haji, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta literasi dan pertumbuhan keuangan syariah yang inklusif untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji dan kemaslahatan umat.

Pelaksanaan teknis atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH melakukan penyusunan sejumlah peraturan pelaksanaan yang rumuskan oleh BPKH terdiri dari; (1) Penyusunan Peraturan, (2) Kelembagaan, (3) GCG dan Kode Etik, (4) BPS-BPIH, (5) Penempatan, (6) Investasi, (7) Pengadaan Barang dan Jasa, (8) Perencanaan, Penyusunan, Revisi, Pelaksanaan, dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Anggaran, (9) Operasional, Belanja Barang, Belanja Modal, Pengelolaan Kekayaan, (10) Kemaslahatan dan Penggunaan DAU, (11) Pengawasan dan Pemantauan, (12) Whistblowing, (13) Laporan Barang dan Jasa Luar Negeri, (14) Tatacara Pemberian Penilaian dan Persetujuan Penempatan dan Investasi oleh Dewan Pengawas, (15) Tatacara Pemberian Penilaian Persetujuan

Renstra, RKAT, Laporan Pertanggungjawaban BPKH oleh Dewan Pengawas.⁹⁵

Program kerja strategis BPKH bidang investasi meliputi 3 program utama, yaitu, 1) Perencanaan dan Kelayakan, 2) Pelaksanaan Investasi, 3) Pencadangan. Program kerja bidang investasi ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Program Kerja Strategis Bidang Investasi BPKH

No	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1.	Perencanaan dan Kelayakan Investasi	1. Melakukan perumusan Kebijakan Finansial dan Rencana Investasi BPKH	Laporan Studi Aktuarial Tentang Kewajiban BPKH serta Rencana Investasi Ke depan	Memberikan Kepastian Nilai Manfaat Keuangan Haji
		2. Melakukan Studi Kelayakan Bidang Investasi Langsung, Emas, dan Investasi Lainnya	Laporan Studi Kelayakan	Melakukan Investasi yang Layak dan Memberikan Nilai Manfaat Optimal

⁹⁵ Badan Pengelola Keuangan Haji, *Rencana Strategis BPKH 2018-2022*

2.	Pelaksanaan Investasi	1. Melakukan Pemilihan dan Kerjasama dengan Mitra Investasi	Mendapatkan Manajer Investasi sebagai Mitra yang Handal bagi BPKH	Meningkatkan Nilai Manfaat dan Kepercayaan Pelaku Investasi
		2. Melakukan Kerjasama Investasi di Indonesia dan Arab Saudi	Dokumen Kerjasama Investasi yang Menguntungkan	Meningkatkan Nilai Manfaat dan Efisiensi
		3. Melakukan Kerjasama Investasi dengan Tabung Haji Malaysia	Dokumen Kerjasama Investasi yang Menguntungkan	Meningkatkan Nilai Manfaat Kapasitas Kelembagaan
3.	Perlindungan dan Pencadangan Investasi	1. Melakukan Pencadangan risiko Investasi.	Pembentukan Pencadangan Minimal 1% dari Nilai Investasi Langsung	Memberikan Perlindungan dan Kepastian Investasi
		2. Melakukan External Counsel fee Investasi	Kerjasama dengan Jasa Konsultan Hukum untuk	Memberikan Perlindungan dan Kepastian

		Langsung	Pelaksanaan Rencana Investasi Langsung	Investasi
--	--	----------	--	-----------

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan bidang pengawasan BPKH mencakup enam aspek bidang pengawasan dan penempatan yang tergambar dalam table berikut ini:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1.	Pengawasan Bidang Investasi	Pemeriksaan Lapangan Terkait Investasi	1. Pemeriksaan lapangan antara Rencana dan Pelaksanaan 2. Kunjungan Aktifitas Haji dan Investasi di Saudi Arabia	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Dana Haji	1. Pengawasan atas Pelaksanaan dan Pengeluaran Dana dan Investasi Dana Haji

					2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat atas Fungsi dan Tugas BPKH 3. Meningkatkan Pelayanan Jemah
2.	Pengawasan Bidang Investasi	Konsinyering Pembahasan Persetujuan Investasi	Kegiatan Membahas Persetujuan Investasi BPKH	Persetujuan atas Investasi BPKH	Optimalisasi Investasi i BPKH

		BPKH			Prinsip Kehati-hatian atas Investasi
3.	Pengawasan Bidang Investasi	Konsiyering Raker Dewan pengawas Tentang Pemeriksaan Nilai Manfaat	Kegiatan Pengendalian atau Pencegahan Kegiatan Mitigasi Resiko	Laporan Kinerja Penempatan dan Investasi Terhadap Kenaikan atau Penurunan Nilai Manfaat	1. Pengawasan Terhadap Penempatan dan Investasi untuk Mengoptimalkan Nilai Manfaat 2. Mengurangi risiko

					kesalahan pencatatan dan pelaporan nilai manfaat
4.	Pengawasan Bidang Investasi	Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Investasi	1. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko 2. Pembentukan Komite Investasi 3. Kajian dan Mitigasi Risiko Investasi Badan Pelaksana 4. Monitoring Pelaporan Kinerja Investasi	Pemetaan risiko Investasi, Komite Laporan Kinerja Investasi dan Pemetaan Profil Investasi	1. Meningkatkan Orientasi pada Instrumen Syariah 2. Mengembangkan Instrumen Keuangan Syariah

					ah
5.	Pengawas an Bidang investasi	Konsiyering Pembahasan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Investasi Bulanan, Triwulan, dan Semeste dan Tahunan	1. Kegiatan pelaporan dan Evaluasi Kinerja Investasi 2. FGD Opini Investasi (Analisis Pasar Market Upddate selama 9 Kali)	Meningkatk an Dana Kelelaan	Mening katkan Keperc ayaan Menjali n Kerjasa ma dengan Memba ngun Sinergi
6.	Pengawas an Bidang Investasi	Penyusunan Peraturan dan SOP Investasi	1. Penyusunan Kebijakan dan Peraturan dan SOP 2. Penyusunan Pedoman Kerja Komite dibawah Dewan Pengawas	1. SOP Pedoma n Kerja Komite Investasi 2. SO {P Pedoma n Kerja Komite Lainnya	Mening katkan Kualitas Pengaw asan Bidang Investas i

Bidang investasi mengajukan proposal terkait rencana investasi pada aspek-aspek yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait BPKH. Bidang-bidang investasi tersebut meliputi bidang, yaitu (1) Penempatan keuangan pada perbankan syariah pada produk deposito, tabungan, dan giro. (2) Investasi keuangan di bidang investasi surat

berharga syariah (sukuk), investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Proposal investasi ini akan direview oleh bidang pengawasan BPKH. Proposal yang memenuhi unsure prinsip syariah, kehati-hatian, dan memiliki return yang tinggi akan disetujui dalam rapat gabungan bidang pelaksana dan bidang pengawasan.⁹⁶

Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.⁹⁷

Berdasarkan pasal di atas, sumber keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terdiri dari, 1) Setoran biaya biaya penyelenggaraan ibadah haji atau setoran awal yang bersumber dari jemaah calon haji yang disetor ke rekening BPKH, 2) Dana Abadi Umat (DAU), 3) Dana efisiensi penyelenggaraan haji, 4) Dana hasil pengembangan DAU, 5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Laporan keuangan BPKH tahun 2018 tercatat saldo dana keuangan haji mencapai Rp. 112.000.000.000,-, dana ini dikelola untuk mendapatkan nilai manfaat yang digunakan untuk mensubsidi beban operasional haji dan biaya operasional tahunan BPKH, serta penyediaan dana likuid untuk 2 kali musim operasional penyelenggaraan haji, yaitu

⁹⁶Imam Ni'matullah, *Kepala Divisi Investasi Langsung, Emas dan Lainnya Badan Pengelola Keuangan Haji*, wawancara tgl 4 September 2019

⁹⁷Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

sekitar Rp. 15.000.000.000,- dana likuid disimpan pada produk perbankan yang mudah dicairkan sewaktu-waktu untuk operasional 2 musim penyelenggaraan haji. Total dana yang diinvestasikan sekitar kurang lebih Rp. 93.000.000.000,- yang disebarkan pada 5 instrumen investasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. pada tahun 2018 total nilai manfaat dari hasil investasi mencapai Rp. 5,7 T dan beban operasional BPKH selama tahun 2018 mencapai Rp. 67,8 M.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama berdasarkan perspektif finansial dan development, BPKH mencanangkan 4 sasaran strategis berkaitan dengan peningkatan imbal hasil, peningkatan dana kelolaan, ketersediaan likuiditas, dan peningkatan kontribusi bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Perspektive	Strategi Obyektif	KPI	2018	2019	Strategi Program
	Peningkatan Imbal Hasil Keuangan Haji	Imbal Hasil (%)	6,78%	6,78%	1. Menerapkan alokasi pengeluaran investasi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri 2. Kerjasama dengan Kemenkeu mengenai SDHI dan Bappenas
		Imbal Hasil Neto (Rp..T)	7,02 T	7,02 T	
	Meningkatkan Dana Kelola BPKH	Dana Kelolaan (Rp...T)	111,8 T	121,3 T	
	Menjamin ketersediaan likuiditas untuk	Menjaga resiko likuiditas (Biaya			

Finacial dan Developm ent	kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggara an haji	penyelengg araan ibada haji	2 x	2 x	untuk proyek brown field PINA 3. Penjajaka n Investasi di Mekkah dan Medinah 4. Bekerjasa ma dengan manajer investasi untuk melakuka n kontrak pengelola an dana yang sesuai dengan resiko dan kebutuha n likuiditas dana BPKH
---------------------------	--	-----------------------------	-----	-----	--

	Meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat islam melalui pelaksanaan program kemaslahatan	Pembiayaan ibadah haji	20 %	20 %	1. Prioritas program: a. Pendidikan, b. Pelayanan ibadah, c. Prasarana, d. Ekonomi, e. Kesehatan, f. Sosial agama 2. Bekerjasama dengan IDB-Adahi utk pengiriman daging Dam haji
		Pendidikan dan Dakwah	25 %	25 %	
		Keschatan	10 %	10 %	
		Sosial Keagamaan	5%	5%	
		Pemberdayaan Ekonomi umat	20 %	20 %	

		Pembangunan sarana dan prasarana ibadah	20 %	20 %	Tamattu' 3. Bekerjasama dengan MUI, Kemenag, Ormas, BAZNAS, BPS-BPIH dalam menyusun dan pelaksanaan program prioritas kemaslahatan 4. Menyusun pedoman dan SOP serta mengembangkan sistem informasi akses publik dan transpara
--	--	---	------	------	---

					nsi program kemaslah atan BPKH
--	--	--	--	--	--

Diolah dari renstra BPKH 2018-2022

Kebijakan pengembangan penempatan dan investasi haji dilakukan dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah. Pasal 4 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menyebutkan bahwa investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu, *pertama*, surat berharga, *kedua*, emas, *ketiga*, investasi langsung, *kelima*,

investasi lainnya.⁹⁸ Kerangka pengembangan penempatan dan investasi keuangan haji tergambar dalam tabel berikut:

No	Jenis Instrumen	Kebijakan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji
Penempatan Keuangan Haji		Produk Perbankan Syariah dalam bentuk Deposito Berjangka, Giro, dan Tabungan
1.	Penempatan – Deposito di BPS-BPIH Penempatan	Penempatan Paling Banyak sebesar 50% dari Total Dana Kelolaan Pengembangan Keuangan Haji selama 3 Tahun Sejak BPKH Terbentuk
Penempatan Berupa Giro di BPS-BPIH Penerima		Penempatan keuangan haji paling banyak sebesar 30% dari total dana kelolaan keuangan haji
Investasi Keuangan Haji		Dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya
2.	Investasi Keuangan Haji dalam Bentuk Surat Berharga Syariah	1. SBSN yang diterbitkan Pemerintah Pusat 2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia 3. Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
		Efek syariah meliputi (a) Saham syariah di bursa efek.

⁹⁸Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

		(b) Sukuk. (c) Reksadana syariah. (d) Efek beragun aset syariah. (e) Dana investasi real estate syariah. (f) Efek syariah lainnya
3.	Investasi Emas	Investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% dari total penempatan investasi keuangan haji
4.	Investasi Langsung	Total investasi langsung paling banyak 20% dalam bentuk kepemilikan usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi dan investasi langsung
5.	Investasi Lainnya	Hanya 10% dari total penempatan investasi keuangan haji, seperti investasi pada pembiayaan syariah di BPS-BPIH mitra investasi, pembiayaan pelayanan haji dan umrah, dll

Pasal 5 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menyebutkan bahwa investasi keuangan haji dalam bentuk surat berharga meliputi, 1) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat, 2) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, 3) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁹⁹batasan investasi dalam bentuk surat berharga merupakan sisa dari total penempatan keuangan haji setelah dikurangi dengan penempatan investasi dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Pemilihan investasi dalam bentuk surat berharga diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5

⁹⁹Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

1. Optimalisasi tingkat keuntungan yang akan diterima dan analisis resiko yang akan dihadapi pada investasi surat berharga
2. Kesesuaian profil jatuh tempo portofolio surat berharga dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH
3. Ketentuan investasi pada efek syariah dalam bentuk Saham Syariah yang tercatat di Bursa wajib mempertimbangkan;
 - a. Ketentuan saham syariah dalam kelompok LQ45
 - b. Kecuali BPKH membeli saham syariah melalui Pasar Perdana atau Reksadana Syariah.
4. Ketentuan investasi pada Sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib mempertimbangkan;
 - a. Sukuk tersebut memiliki peringkat kredit *investment Grade*
 - b. Pembelian sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, sahamnya harus milik BPKH dengan tetap mempertimbangkan batas kepemilikan per-pihak.
5. Ketentuan investasi pada Reksadana Syariah wajib mempertimbangkan;
 - 1) Jenis reksa dana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari;
 - a. Reksa dana syariah pasar uang
 - b. Reksa dana syariah pendapatan tetap
 - c. Reksa dana syariah saham
 - d. Reksa dana syariah campuran
 - e. Reksa dana syariah terproteksi
 - f. Reksa dana syariah Indeks
 - g. Reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri
 - h. Reksa dana syariah berbasis sukuk
 - i. Reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif

- j. Reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.
- 2) Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh Manajer Investasi *Counterpart*
- 3) Reksa dana syariah yang memuat *underlying* instrument investasi bersifat pendapatan tetap harus memiliki peringkat *investment grade*.¹⁰⁰

Pasal 14 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menyebutkan bahwa investasi keuangan haji dalam bentuk investasi emas terdiri dari, 1) Emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan dijual di dalam negeri, 2) Rekening emas yang dikelola oleh perusahaan yang memiliki peringkat kredit paling kurang *investment grade* dengan bidang usaha; a) Lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK, b) Perdagangan dan pengelolaannya berdasarkan akad serta kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 15 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menetapkan bahwa bentuk investasi langsung terdiri dari, 1) Usaha sendiri, 2) Penyertaan modal, 3) kepemilikan saham, 4) Kerjasama investasi, 5) Investasi tanah atau bangunan, 6) Investasi langsung lainnya.

Pasal 22 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menetapkan bahwa bentuk investasi lainnya meliputi; 1) Investasi pada produk perbankan selain giro, tabungan dan deposito, 2) Produk lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, 3) Investasi di pasar uang, pasar modal, dan investasi di bidang penyediaan jasa seperti penyewaan pesawat, penginapan, catering,

¹⁰⁰Pasal 11 dan 12 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

transportasi, 4) Investasi di bidang sewa tanah, bangunan, dan barang yang dapat dinilai dengan uang. Gambaran model investasi BPKH dapat dipetakan sebagaimana dalam bagan berikut ini:

	Penempatan	Investasi	Perencanaan	Pelaksanaan
Total Dana Haji 2018/2019 = Rp. 113.098.091.343.421,00	3 Tahun Pertama Sejak Terbentuknya BPKH (50%) (2017-2019)	3 Tahun Pertama Sejak Terbentuknya BPKH (50%) (2020 - Seterusnya)		
	Deposito – Tabungan – Giro	Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) = 70%	1. SDHI 2. SBSN 3. Sukuk Korporat 4. Saham Tbk	1. SDHI 2. SBSN 3. Sukuk Korporat 4. Saham Tbk
		Emas Berupa Emas Batangan	Emas Batangan	Belum Terealisasi
		Investasi Langsung = 20%	1. Equity Saham	
			2. Kerjasama Investasi	1. Financing 2. KSO 3. JO
			3. Tanah dan Bangunan	Sementara Penjajakan di beberapa lokasi di ibu

				kota Jakarta
		Investasi Lainnya	Produk Bank Syariah DP3	Produk bank syariah DP3
			Sewa	

Investasi dana haji pada berbagai bidang investasi yang diimplementasikan dalam berbagai produk investasi didasarkan atas peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
2. Peraturan

Pengelolaan investasi dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu, *pertama*, mekanisme penempatan. *Kedua*, mekanisme investasi. Mekanisme penempatan diopersionalkan pada produk perbankan syariah. Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelola Keuangan Haji, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji menyebutkan bahwa tiga tahun pertama sejak terbentuknya BPKH dana haji dapat ditempatkan pada produk perbankan syariah yang terdiri dari Deposito berjangka, Tabungan, dan Giro terakumulasi sebanyak 50% dari total dana haji. Sementara 50% sisanya ditempatkan pada instrument investasi sesuai amanah peraturan perundangan berkaitan dengan BPKH.¹⁰¹

¹⁰¹ Team Penulis, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, cet. I; Jakarta: BPKH Press, 2019, h. 121

Sedangkan mekanisme investasi dioperasionalkan pada berbagai instrument investasi sesuai amanah Undang-undang yang meliputi instrument investasi surat berharga atau sukuk, instrument emas, instrument investasi langsung, dan instrument investasi lainnya. 50% dari total dana haji akan diinvestasikan pada instrument-instrument ini.¹⁰²

Investasi pada instrument sukuk masih dominan saat ini, kurang lebih 70% dari sisa bagian 50% dari total dana haji diinvestasikan pada instrument sukuk. Kategori sukuk yang menjadi pilihan instrument investasi BPKH terdiri dari, Sukuk Pemerintah atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Korporat. Alasan pemilihan ketiga jenis sukuk ini karena resiko investasi relative aman dan tingkat return atau imbal hasil yang ditawarkan cukup tinggi. Selain itu, akad yang digunakan berprinsip syariah yang terdiri dari sukuk berdasarkan akad *mudharabah*, sukuk *ijarah*, sukuk *musyarakah*. Namun yang paling dominan adalah sukuk berdasarkan akad *ijarah*, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah.

Sedangkan syarat pemilihan instrument sukuk korporasi mengacu pada korporasi yang memiliki standar investment grade. Perusahaan-perusahaan yang menjadi pilihan utama BPKH dalam menginvestasikan dana haji pada instrument sukuk korporasi, yaitu, (1) Perusahaan Listrik Negara (PLN), (2) Perusahaan Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Perusahaan CIM Niaga. Pemilihan ketiga perusahaan ini didasarkan atas sukuk atau obligasi perusahaan berkategori rating tinggi.

Investasi pada instrument emas diatur dalam peraturan BPKH No. 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji. Klasifikasi investasi pada emas dibagi dalam dua kategori, yaitu, *pertama*, emas batangan yang bersertifikat dan diproduksi dalam

¹⁰² Team Penulis BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, cet. I; Jakarta: BPKH Press, 2019, h. 122

negeri. *Kedua*, rekening emas yang dikelola oleh perusahaan berkategori investment grade. Perusahaan ini bagian dari ekosistem lembaga keuangan syariah dan landasan operasionalnya berprinsip syariah.

Dana haji yang ditempatkan pada instrument investasi emas maksimal 5% dari total dana haji. Namun jenis investasi emas belum dapat dioperasionalkan oleh BPKH karena return atau imbal hasil yang ditawarkan lebih rendah dari produk perbankan dan lebih rendah dari sukuk, sehingga jenis instrument investasi emas belum direalisasikan.¹⁰³

Kategori emas batangan merupakan jenis investasi paling aman dari sisi resiko, namun secara likuiditas, jenis investasi ini kurang diminati karena dana investasi tidak dapat langsung dicairkan seketika. Padahal BPKH harus menyiapkan dana operasional haji 4 bulan sebelum musim haji tiba. Dana operasional ini akan diberikan kepada kementerian Agama direktorat haji untuk digunakan pada operasional haji.

BPKH selektif memilih dan menginvestasikan dana haji pada instrument investasi yang diamanahkan oleh Undang-undang. Syarat utama pemilihan investasi harus aman, resiko rendah, dan tawaran imbal hasil yang rasional. Target ini harus dicapai, karena BPKH dihadang oleh pajak yang cukup tinggi. Untuk kategori penempatan pada produk perbankan syariah (deposito, tabungan, dan giro) pajak yang dibebankan kepada BPKH mencapai 7,6%, sedangkan kategori investasi pada instrument investasi yang amanahkan peraturan perundangan, beban pajak yang harus dikeluarkan mencapai 8,2%. Tingginya beban pajak ini membuat BPKH selektif dalam menempatkan dan menginvestasikan dana haji pada instrument-instrument investasi yang diamanahkan perundang-undangan.

¹⁰³ Imam Ni'matullah, *Kepala Divisi Investasi Langsung, Emas dan Lainnya di BPKH*, wawancara tgl 4 September 2019

Jenis instrument investasi lainnya yang diamanahkan undang-undang adalah investasi langsung, kouta dana yang diberikan mencapai 20% dari total dana haji. Pasal 15 ayat 1 Peraturan BPKH No. 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menjelaskan kategori investasi langsung, yaitu, (1) usaha sendiri, (2) penyertaan modal, (3) pemilikan saham, (4) kerjasama investasi, (5) investasi tanah atau bangunan, (6) investasi langsung lainnya. Namun pilihan jenis instrument invetasi ini harus sesuai dengan rencana strategis BPKH.

BPKH telah merencanakan investasi langsung pada aspek penyertaan modal atau equity dan pemilikan saham non public. Tahun 20018 BPKH mendalami dan menganalisis bisnis catering jemaah haji di Arab Saudi. Mulai tahapan planning, perencanaan, dan aktualisasi bisnis. BPKH telah memenuhi semua persyaratan administrasi berkaitan bisnis catering, termasuk syarat harus bekerjasama dengan muassasah di Arab Saudi. Target penanaman modal yang direncanakan mencapai 100 juta real, BPKH mendapat 40% komposisi kepemilikan saham. Namun ketika bisnis dalam tahapan negosiasi kontrak, aturan dan kebijakan di Arab Saudi berubah, yaitu kewenangan bisnis catering dialihkan kepada Syarikah (perusahaan persoroan), akibatnya BPKH tidak jadi merealisasikan penyertaan modal pada bisnis catering jemaah haji di Arab Saudi, karena resiko kontrak perjanjian dan kerugian .

Kebijakan dan aturan Arab Saudi adalah melindungi bisnis pribumi, karena itu, perusahaan-perusahaan asing yang ingin berbisnis di Arab Saudi harus menggandeng patner perusahaan lokal. Namun kebijakan dan aturan yang berubah seringkali menjadi hambatan suatu bisnis tidak aceptabel dan kompetitif. ¹⁰⁴

¹⁰⁴Imam Ni'matullah, *Kepala Divisi Investasi Langsung, Emas dan Lainnya di BPKH*, wawancara tgl 4 September 2019

BPKH telah melakukan negosiasi penyewaan hotel untuk jemaah haji di Arab Saudi. Memperhatikan regulasi yang sering berubah di Arab Saudi, BPKH

Memperhatikan regulasi yang sering berubah di Arab Saudi, BPKH merencanakan investasi di bidang property, baik tanah maupun bangunan untuk dipersewakan di Indonesia, khususnya Jakarta. Tahun 2019 ini, BPKH telah melakukan kajian pembelian asset property di Jakarta untuk dipersewakan maupun diperjualbelikan.

Investasi berikutnya di amanahkan oleh undang-undang BPKH adalah investasi langsung. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji menyebutkan bahwa yang dimaksud investasi lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok jenis investasi surat berharga, investasi emas, dan investasi langsung. Kategori investasi langsung di jelaskan pada ayat (2) yaitu investasi dalam produk perbankan selain giro, tabungan, dan deposito, produk instansi keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK, pasar uang, pasar modal, penyediaan jasa, dan sewa tanah dan bangunan.¹⁰⁵

BPKH telah merealisasikan investasi lainnya dalam bentuk produk perbankan selain deposito, tabungan, dan giro berupa penyaluran modal pada bank syariah pada produk non tabungan, yaitu pemberian modal pada bank syariah untuk disalurkan pada produk pembiayaan.

Jenis investasi lainnya yang sementara direncanakan BPKH adalah pembelian asset property dan bangunan untuk dipersewakan dan diperjualbelikan. BPKH telah melakukan kajian pada beberapa asset property di wilayah Jakarta. Kajian ini telah mendapat restu dari Badan Pengawas BPKH. Namun pemindahan ibu kota negara ke wilayah

¹⁰⁵ Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

provinsi Kalimantan menjadi hambatan yang harus dipikirkan secara matang oleh BPKH.¹⁰⁶

Salah satu organ organisasi badan pelaksana BPKH adalah bagian atau divisi kemaslahatan. Divisi ini merupakan anggota dari badan pelaksana BPKH. Fungsi dan kewenangannya diatur dalam peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH dapat membentuk divisi-divisi dalam struktur keanggotaan badan pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan BPKH Nomor 2 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji Dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 4 ayat (4) bagian j Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji Dan Hubungan Antar Lembaga menjelaskan tentang kewenangan dan tanggungjawab anggota dalam bidang kemaslahatan meliputi kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.¹⁰⁷

Bagian kemaslahatan BPKH merupakan divisi yang mengembangkan dana abadi umat dan menyiapkan program-program kemaslahatan yang sumber pendanaannya berasal dari pengembangan dana abadi umat. Dana abadi umat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat menjelaskan tentang definisi Dana Abadi Umat (DAU) sebagai sejumlah dana yang sebelum

¹⁰⁶Imam Ni'matullah, *Kepala Divisi Investasi Langsung, Emas dan Lainnya di BPKH*, wawancara tgl 4 September 2019

¹⁰⁷Pasal 2 ayat (4) point j Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji Dan Hubungan Antar Lembaga

berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan atau/sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

Program kemaslahatan BPKH dioperasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 10 point g Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Pasal 38 ayat (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
3. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
4. Rencana Strategis BPKH Tentang Program Kemaslahatan
5. Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Program Kemaslahatan.¹⁰⁹

Rencana strategi bidang kemaslahatan BPKH 2018-2022 terdiri dari 3 program kemaslahatan yang mencakup 4 item, yaitu program, kegiatan, output, dan outcome seperti terlihat dalam table berikut ini:

No	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1.	Perencanaan Kebijakan dan Pedoman	1. Menyusun perencanaan dan pedoman	Program kemaslahatan yang tepat	Peningkatana kesejahteraan umat

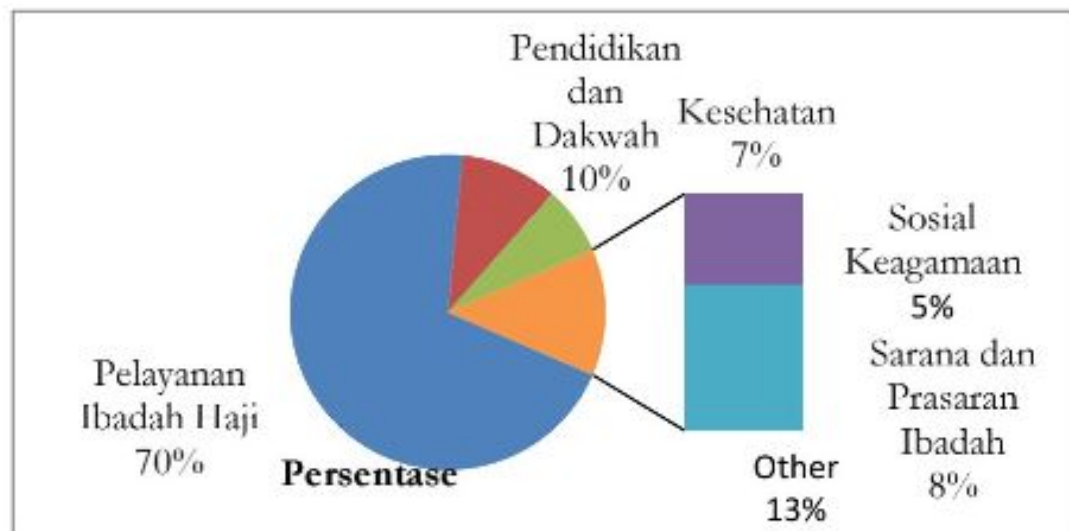
¹⁰⁸Pasal 1 angka 2 Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

¹⁰⁹Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan BPKH 2018-2019 Bidang Kemaslahatan

	Program	teknis pelaksanaan program	sasaran	
		2. Menyusun perumusan kebijakan hibah, waqaf, dan bantuan	Tersediannya kebijakan hibah, bantuan dan waqf kemaslahatan	Meningkatkan dana kelolaan DAU untuk meningkatkan kemaslahatan umat
2.	Pelaksanaan Program	1. Kerja sama program dengan mitra kemaslahatan	Dokumen Kerjasama	Peningkatan tata kelola dan efisiensi pelaksanaan program
		2. Peluncuran program dan pelaksanaan program kemaslahatan	Pelaksanaan program sesuai rencana	Peningkatan tata kelola dan transparansi program
3.	Monitoring dan Evaluasi Program	1. Visitasi, Kunjungan, Monitoring, dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi program	Pelaksanaan program yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermanfaat

Sumber: Renstra BPKH 2018-2022

Rencana strategis BPKH 2018-2022 mengklasifikasikan alokasi penyerapan hasil pengembangan dana DAU terhadap program kemaslahatan yang terdiri dari (1) Pelayanan ibadah haji sebesar 70%, (2) Pendidikan dan Dakwah sebesar 10%, (3) Kesehatan sebesar 7%, (4) Sosial Keagamaan sebesar 5%, (5) Sarana dan Prasarana Ibadah sebesar 8% komposisi ini dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa Dana Haji terdiri dari setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.¹¹⁰

Salah satu dana yang dikembangkan BPKH adalah Dana Abadi Umat (DAU), dana ini diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat yang sebelumnya telah di optimalkan oleh Direktorat Haji Kementerian Agama RI. 2017 Pasca peralihan kewenangan pengelolaan

¹¹⁰Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

dana haji dari Kementerian Agama kepada Badan Pengelola Keuangan Haji, maka semua dana haji termasuk DAU diserahkan pengelolaannya kepada BPKH berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Total dana DAU yang dikelola BPKH sebesar Rp. 3,1 triliun yang dikembangkan dalam instrument investasi. Imbal hasil pengelolaan DAU direalisasikan dalam program kemaslahatan BPKH.

Realisasi program kemaslahatan 2018 meliputi kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa/i sebanyak 864 orang di IAIN Palu yang terdampak bencana gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala sebesar Rp. 195.300.000,-, kegiatan pembersihan lahan dan land clearing pasca bencana di IAIN Palu sebesar Rp. 195.000.000,-, kegiatan penyediaan makanan sehat, peralatan kesehatan dan obat-obatan bagi pengungsi bencana gempa tsunami Palu, Sigi, Donggala sebesar Rp. 200.000.000,-

Secara umum, program kemaslahatan 2018 masih bersifat bantuan kemanusiaan dan bencana, belum menyentuh program pelayanan haji, karena pengelolaan dana DAU yang dilakukan BPKH belum efektif dan optimal, sehingga alokasi bantuan kemaslahatan belum menyentuh semua aspek yang menjadi sasaran program bidang kemaslahatan..¹¹¹

Tahun 2019 BPKH melalui divisi kemaslahatan mengabulkan proposal program kemaslahatan yang masuk sampai bulan Juni sebesar Rp. 15.213.016.000,- dari 14 provinsi di Indonesia dengan 5 program bantuan kemaslahatan, yaitu, (1) Pelayanan ibadah haji, (2) Pendidikan dan dakwah, (3) Kesehatan, (4) Sosial keagamaan, dan (5) Pembangunan sarana dan prasarana ibadah..¹¹²

¹¹¹Agung Sri Hendarsa, *Kepala Divisi Kemaslahatan BPKH*, wawancara tgl 4 September 2019 di Menara Bidakara I Lantai 8

¹¹²Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan BPKH 2018-2019

Sasaran program kemaslahatan pada aspek pelayanan haji 2019 terdistribusi pada 7 provinsi di Indonesia dan 1 lembaga sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

No	Provinsi	Nama Lembaga/Yayasan	Kategori Program	Besaran (Rp)
1.	Aceh	Asrama Haji 1 dan 2	Pelayanan Ibadah Haji	2,556.000.000,-
2.	Daerah Istimewa Yokyakarta	Asrama Haji 1 dan 2	Pelayanan Ibadah Haji	293,670,000,-
3.	DKI Jakarta	Asrama Haji 4 dan 5	Pelayanan Ibadah Haji	597,850,000,-
4.	Jawa Barat	1. Yayasan Ponpes an-Nur 2. Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami	Pelayanan Ibadah Haji Pelayanan Ibadah Haji	152,500,000,- 40,000,000,-
5.	Jawa Tengah	KBIH Armina	Pelayanan Ibadah Haji	83,090,000,-
6.	Nusa Tenggara Barat	Asrama Haji Lombok	Pelayanan Ibadah Haji	3,350,156,000,-
7.	Sumatera	1. Yayasan Darul	Pelayanan	123,700,000,-

	Utara	Hasan Kota Padangsidimpu an 2. Yayasan Ponpes al- Mukhtariyah 3. Yayasan Madrasah GUPPI Malintang	Ibadah Haji Pelayanan Ibadah Haji Pelayanan Ibadah Haji	123,700,000,- 123,700,000,-
8.	Lembaga	Dirjen PHU Kemenag	Pelayanan Ibadah Haji	120,000,000,000,-

Diola dari laporan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan BPKH 2018-2019

3. Pengelolaan Dana Haji pada Lembaga Tabung Haji Malaysia

Lembaga tabung haji memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Akta Nomor 535 tahun 1995 tentang Tabung Haji. Akta ini sekaligus menjadi dasar pijakan dan pedoman organisasi dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji di Malaysia. Seksyen 2, 6 (1) Lembaga hendaklah terdiri daripada anggota sebagai berikut:

Struktur organisasi bagian Pentadbiran atau Manajemen terdiri dari (1) Badan-badan utama yang bertugas merencanakan program strategis tabung haji. (2) Badan Pelaksana yang bertugas secara teknis operasional untuk meningkatkan kejayaan tabung haji. Badan Pelaksana memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Lembaga Pengarah
2. Majelis Penasihat Urusan Haji
3. Majelis Penasihat Pelaburan
4. Lain-lain Jawatankuasa
5. Ketua Eksekutif

Sedangkan bidang-bidang di lembaga tabung haji mencakup 4 jabatan utama, yaitu, *pertama*, jabatan sumber daya manusia, *kedua*, jabatan pelaburan, *ketiga*, jabatan keuangan, *keempat*, jabatan haji.

Jabatan Pelaburan atau Bagian Investasi merupakan divisi yang bertanggungjawab terhadap semua urusan investasi dan pelaburan dibidang ekonomi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fungsi bidang ini adalah merencanakan dan melaksanakan program investasi pada sektor-sektor yang diamanahkan oleh Akta Tabung Haji. Untuk efisiensi dan keefektifan perencanaan dan pelaksanaan program investasi, bagian pelaburan atau investasi Tabung Haji memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari, *pertama*, bagian pembangunan hartatanah, *kedua*, bagian pembangunan pelaburan, *ketiga*, bagian pengurusan pelaburan, *keempat*, bagian urusan niaga saham, *kelima*, bagian perundangan.

Tahun 2013 total dana haji yang dikelola tabung haji Malaysia mencapai RM 45,7 Miliar dengan jumlah penabung mencapai kurang lebih 9 juta calon jemaah haji. Tahun 2016 aset keuangan tabung haji mencapai RM 63,573 miliar dengan jumlah nasabah penabung sebanyak 9,3 juta nasabah. Tahun 2017 total dana haji yang dikelola tabung haji mengalami peningkatan, yaitu sebesar RM 64,429 miliar ekuivalen Rp. 217.383 triliun. Dana ini diinvestasikan pada sistem investasi pada lembaga tabung haji Malaysia yang terdiri 4 pilar utama, yaitu, (1) Equity, (2) Sekuritas Pendapatan Tetap, (3) Harta Tanah, (4) Pasar Uang.

Investasi tabung haji pada sektor equity merupakan alokasi investasi yang paling dominan berkisar 53% dari keseluruhan total aset tabung haji. Investasi pada sektor ini terbagi pada dua mekanisme, yaitu, *pertama*, investasi pada saham tersenarai atau saham yang termasuk kategori index gabungan yang terpublish, *kedua*, investasi pada saham tidak tersenarai atau saham no publik. Sektor utama investasi pada equity adalah perdagangan, perbankan, perkebunan, infrastruktur, hartatanah,

REITs, dan teknologi. Investasi pada pendapatan tetap mengambil porsi sekitar 27%. Investasi pada sektor hartatanah mengambil porsi sekitar 15%, dan investasi pada sektor tunai mengambil porsi sekitar 5% dari total aset tabung haji.¹¹³

Dana haji yang berjumlah sebesar RM 64,429 miliar ekuivalen Rp. 217.383 triliun tersebut sebagian diantaranya diinvestasikan ke berbagai sektor di pasar saham domestik seperti saham perkebunan, saham keuangan, saham telekomunikasi saham konstruksi, saham properti, dan saham minyak dan gas. Tahun 2016 tabung Haji Malaysia mampu menghasilkan keuntungan sebesar RM. 1,2 miliar atau setara Rp 3,7 triliun dari pasar saham domestik. Selain pasar saham domestik, Tabung Haji juga berinvestasi di pasar saham internasional. Seperti saham telekomunikasi, teknologi informasi, bahan mentah, consumer, dan properti. Laporan tahunan 2016, tabung haji mampu membubuhkan keuntungan mencapai Rp 9,3 triliun dari sector investasi di pasar saham internasional. Ttabung haji meginvestasikan dana haji pada 4 sektor utama, yaitu sector equity dengan investasi pada saham domestic (atau tersenarai), seperti saham keuangan, perkebunan, property, minyak dan gas, telekomunikasi dan kontruksi. Selain saham senarai, tabung haji juga investasi pada saham tidak senarai atau pasar saham internasional, seperti saham banan mentah, teknologi informasi, telekomunikasi, dan property”¹¹⁴.

Investasi tabung haji pada sektor pendapatan tetap yang mengambil porsi 27% dari total aset keuangan merupakan penyumbang imbal hasil kedua terbesar dalam investasi tabung haji. Instrumet investasi sektor pendapatan tetap terdiri dari sukuk berdasarkan prinsip syariah. Jenis sukuk yang dipilih adalah sukuk berdasarkan akad *musyarakah*, *murabahah*, *istisna'*, *ijarah*, dan *bai bitbaman ajil*.

¹¹³ www.tabunghaji.gov, Laporan Tahunan Tabung Haji Malaysia 2017

¹¹⁴ www.tabunghaji.gov, laporan Tahunan Tabung Haji Malaysia 2017

Realisasi investasi tabung haji pada sektor pendapatan tetap terdiri dari sukuk domestik maupun sukuk global. Sukuk domestik terdiri dari sukuk yang dikeluarkan pemerintah, sukuk korporat, instrumen pasar uang jangka pendek dan menengah, serta pembiayaan kepada anak syarikat. Investasi di sektor ini tetap memperhatikan faktor resiko rendah dan imbal hasil yang sesuai.

Investasi di sektor pelaburan hartatanah merupakan model investasi jangka panjang dengan aktif membeli portofolio hartatanah yang berlokasi di dalam negeri maupun luar negeri. Tabung haji eksis menginvestasikan dana haji pada sektor hartatanah dengan imbal hasil yang stabil untuk jangka panjang. Kategori investasi hartatanah meliputi bangunan menara dan tower, hotel, convention center, property, dan perkebunan sawit. Aset ini dikomersilkan melalui mekanisme sewa maupun jual beli.

Tabung haji telah memiliki aset hartatanah di Malaysia, diantaranya, menara *TH Uptown Tower* di Damansara Kuala Lumpur, *Tower TH* di Tun Razak Kuala Lumpur, *TH Perdana Tower*, *TH Selborn Tower*, *TH Tower Blok D Plaza Sentral*, Menara *TH D'Glomac*. Berupa hotel yaitu, *TH hotel Perdana* di Kuala Lumpur, *TH Morrick* di Bandar Nilai. Berupa Convencion center yaitu, *TH convencion center* di Bandar Nilai. Dan lokasi property yang tahap pembangunan yang terletak di sekitar Bandara Malaysia. Berupa Rumah sakit yang terletak di Kuala Lumpur. Sedangkan lokasi aset di luar negeri terdapat di United Kingdom, Arab Saudi, dan Australia.

Pasal 11 ayat (1) Akta Tabung Haji Nomor 535 Tahun 1995 menyebutkan bahwa lembaga pengarah memiliki kewenangan untuk membentuk divisi jawatan kuasa penasihat pelaburan atau yang dikenal dengan divisi pelaburan atau investasi. Keanggotaan divisi ini terdiri dari pakar dibidang ekonomi, investasi, dan hukum Islam. Tugas divisi ini adalah memberikan saran dan masukan kepada lembaga pengarah dan

pengurusan tabung haji berkenaan dengan aktifitas dan pengawasan investasi dalam hal pengembangan investasi dan peningkatan imbal hasil. Divisi lain yang dibentuk adalah divisi penilaian portofolio dan pengurusan risiko. Divisi ini memiliki andil yang signifikan dalam menganalisis resiko investasi secara profesional. Instrument investasi yang telah nilai dan diverifikasi aspek resikonya oleh divisi ini, maka proposal investasinya akan diajukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk di tindak lanjuti.¹¹⁵

Instrumen investasi lainnya yang menjadi tujuan investasi dana haji tabung haji adalah pasar uang. Penempatan dana haji pada instrument ini bersifat investasi jangka pendek dan menengah.

Investasi strategis tabung haji pada sektor riil dilakukan melalui anak perusahaan dengan berpedoman pada prinsip syariah. Anak perusahaan tabung haji mencakup bidang perkebunan melalui anak perusahaan TH Plantations Berhad, bidang keuangan islam melalui anak perusahaan BIMB Holdings Berhad, bidang hartatanah melalui anak perusahaan TH Properties Sdn Bhd, bidang perhotelan melalui anak perusahaan TH Hotel dan Residence Sdn Bhd, bidang teknologi informasi melalui anak perusahaan Theta Edge Berhad, bidang industri melalui anak perusahaan TH Marine Sdn Bhd, dan bidang perminyakan dan gas melalui anak perusahaan TH Heavy Engineering Berhad.¹¹⁶

Kebijakan pembatasan kuota ini berdampak pada antrian panjang jumlah pendaftar haji reguler, karena itu, kementerian agama menerapkan prinsip "*first come first served*" pada proses pendaftaran haji di seluruh kantor Kementerian Agama di Indonesia. Bertambahnya jumlah

¹¹⁵Perpustakaan Negara Malaysia, *al-Hajj the Malaysian Experience, In Conjunction With The 50th Anniversary of Lembaga Tabung Haji*, (Publisher: Islamic Arts Museum Malaysia, 2013)

¹¹⁶Perpustakaan Negara Malaysia, *al-Hajj the Malaysian Experience, In Conjunction With The 50th Anniversary of Lembaga Tabung Haji*, (Publisher: Islamic Arts Museum Malaysia, 2013)

pendaftar jemaah haji tidak berbanding lurus dengan jumlah kuota haji setiap tahun, sehingga setoran awal mengendap di rekening tabungan jemaah haji.

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, proses pendaftaran haji dilakukan sepanjang tahun melalui sistem Siskohat dengan prinsip first come first served.¹¹⁷ Dengan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000 untuk jemaah calon haji reguler, USD. 4,000 untuk jemaah calo haji khusus yang penyetorannya melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, baik bank umum syariah atau unit usaha syariah, serta bank umum nasional atas nama rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Bank penerima setoran awal BPIH reguler yaitu, BNI syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BJB Syariah¹¹⁸

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanahkan pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) dan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Pembentukan BPDAU bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana abadi umat. Sedangkan tujuan pembentukan KPHI untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

¹¹⁷Dokumen Manajemen Haji Indonesia Kementerian Agama RI

¹¹⁸Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018/2019*

Indonesia. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden.¹¹⁹ Namun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini tidak diikuti dengan Peraturan Pelaksana pembentukan BPDAU dan KPHI sehingga dua unit organisasi ini tidak terbentuk.¹²⁰

Pengelolaan dana abadi umat tetap menjadi kewenangan Direktorat Pengelolaan Dana Haji melalui Subdit. Pengelola dan Pengembangan Dana Haji. Sedangkan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menjadi kewenangan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri melalui Subdit. Fasilitas Komisi Pengawas Haji Indonesia Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sistem organisasi penyelenggaraan ibadah haji mencakup organisasi permanen, organisasi non permanen, dan pengawasan penyelenggaraan. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing unit penyelenggaraan ibadah haji ini sebagai berikut:

1. Unit Permanen Sistem. Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh unit fungsional sepanjang tahun terdiri dari, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai koordinator di tingkat Pusat, Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi sebagai koordinator tingkat provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sebagai koordinator Kabupaten, dan Kantor Teknis Urusan Haji Arab Saudi sebagai Koordinator Harian Konsul Jenderal RI di Jeddah.
2. Non Permanen Sistem. Kementerian Agama membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi dengan struktur; 1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal

¹¹⁹Pasal 1 angka 8 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹²⁰Sunaryo, *Kasubdit Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji Kementerian Agama Pusat*, wawancara Agustus 2019 Kantor Kemenag Jakarta.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2) PPIH Embarkasi dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi. 3) PPIH Arab Saudi dipimpin oleh Staf Teknis Urusan Haji Konsul Haji dengan pembagian wilayah, yaitu, a. Daerah Kerja Bandara membawahi beberapa sektor. B. Daerah kerja Makkah membawahi beberapa sektor. C. Daerah Kerja Madinah membawahi beberapa sektor. 4) Petugas Haji yang menyertai jemaah sejak di tanah air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi yang terdiri dari; a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).¹²¹

Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji.

Pelayanan haji yang dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia dan diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Agama No. 244 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan umrah serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam hal ini Departemen Agama dalam menjalankan pelayanan jamaah haji adalah memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh jamaah haji mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci Makkah, yang bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk oleh pemerintah.

1. Proses Pendaftaran

Proses pelayanan diawali dari tahapan pendaftaran haji yang dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip prioritas keberangkatan sesuai

¹²¹Dokumen Manajemen Haji Indonesia Kementerian Agama RI

dengan nomor urut pendaftaran atau nomor porsi. Mekanisme pendaftaran untuk berangkat haji melalui dua jalur, *pertama*, jalur haji reguler, penyelenggaraan jalur ini dikoordinir dan diselenggarakan oleh Pemerintah atau melalui Kementerian Agama. *kedua*, jalur haji khusus, penyelenggaraan jalur ini dikoordinir oleh biro perjalanan haji yang mendapat izin resmi Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan PMA Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler. Pola pendafatran disederhanakan menjadi 2 tahap yang sebelumnya melalui 4 tahap.

Proses pendaftaran haji reguler sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 PMA Nomor 29 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pendaftaran haji reguler melalui tahapan sebagai berikut:

1. Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal BPIH
2. BPS-BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH
3. BPS-BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar
4. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS-BPIH serta masing-masing diberi pas foto 3x4 cm
5. BPS-BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, kelima sebagai bukti setoran awal BPIH ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran awal setoran BPIH
6. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk

didaftarkan kedalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi

7. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹²²

Jumlah pendaftar jemaah calon haji setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pendaftar setiap tahun mencapai kurang lebih 550 ribu orang secara nasional. Peningkatan jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, yaitu hanya sebanyak 211.000.000 orang per musim haji (kuota dasar). Sejak tahun 2013 M/1434 H kuota haji Indonesia mendapat pengurangan sebanyak 20% atau 42.200 orang, sehingga total kuota berkisar 168.800 jemaah. Pada tahun 2019/1440 H, Indonesia mendapat tambahan kuota sebesar 10.000 orang. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah setoran awal jemaah calon haji yang tersimpan di rekening BPKH. Juga berdampak pada daftar tunggu yang semakin bervariasi setiap daerah jemaah calon haji. Diperkirakan waktu tunggu berkisar 5-15 tahun. Tahun 2016 daftar tunggu jemaah calon haji mencapai 3.080.122 orang.

Untuk mengetahui dan mengecek tahun keberangkatan, jemaah calon haji dapat mengakses website resmi urusan haji di alamat www.haji.kemenag.go.id dengan memasukkan nomor porsi jemaah calon haji. Nomor porsi diberikan bagi pendaftar haji reguler yang telah membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- di BPS-BPIH yang telah tersambung dengan SISKOHAT secara online. Sedangkan jemaah calon haji khusus menyeter setoran awal sebesar USD 40000,-.

Bank penerima setoran awal jemaah calon haji berjumlah 17 bank BPS-BPIH dan 3 bank transito yang telah ditunjuk oleh Menteri

¹²²Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan PMA Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler

Agama. 5 diantaranya bank umum syariah, 13 unit usaha syariah, yaitu, bank BNI syariah, bank Mandiri syariah, bank BRI syariah, bank muamalat Indonesia, bank Mega syariah, unit usaha syariah bank BTN, unit usaha syariah bank Permata, unit usaha syariah bank CIMB, unit usaha syariah bank Aceh, unit usaha syariah bank Sumut, unit usaha syariah bank Nagari, unit usaha syariah bank Riau KEPRI, unit usaha syariah bank Sumsel Babel, unit usaha syariah bank DKI, unit usaha syariah bank Jateng, unit usaha syariah bank Jateng. Sedangkan 3 diantaranya merupakan bank transito, yaitu bank berhak melakukan pelayanan penerimaan pembayaran setoran awal BPIH pada wilayah yang tidak terdapat bank syariah, yakni bank BRI, bank Mandiri, dan bank BNI¹²³

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tahunnya menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Menteri Agama akan mengusulkan biaya BPIH yang telah diputuskan bersama DPR kepada Presiden untuk ditetapkan peraturan pemerintah tentang besaran biaya BPIH tahun berjalan.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 menetapkan biaya perjalanan ibadah haji yang terdiri dari:

- a. Biaya *Direct Cost* (biaya yang dibayar oleh jemaah haji) rata-rata sebesar RP. 35,235,602,00,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Komponen penerbangan sebesar Rp. 30.079.285,00 dengan rincian Rp. 29.555.597,00,- dibayar oleh calon jemaah haji, sedangkan sisanya Rp. 523.688,00,- dibebankan pada hasil optimalisasi dana haji yang dikelola BPKH.

¹²³ Dokumen Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama RI

- 2) Biaya pemondokan di Makkah sebesar SAR. 4.350,-
- 3) Biaya pemondokan di Madinah sebesar SAR. 1.200,-
- 4) Living cost yang diserahkan kembali kepada jemaah calon haji sebesar SAR. 1.500,- ekuivalen dengan Rp. 5.680.005,-
- b. Biaya perjalanan haji berupa *indirect cost* sebesar Rp. 7.039,801.971.254,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Biaya pelayanan jemaah haji di Arab Saudi sebesar Rp. 6.767.795.750.978,-
 - 2) Biaya pelayanan jemaah haji di dalam negeri (Indonesia) sebesar Rp. 235.115.509.384,-
 - 3) Biaya operasional haji di Arab Saudi sebesar Rp. 726.586.240,-
 - 4) Biaya operasional haji di dalam negeri sebesar Rp. 16.164.124.652,-
 - 5) Biaya *safeguarding* sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- c. Biaya penundaan pengalokasian komponen gelang GPS
- d. Memindahkan biaya haji tahun mendatang yang masih dibiayai oleh BPIH untuk dibiayai oleh APBN.¹²⁴

2. Akomodasi

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mendefinisikan akomodasi sebagai perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi.¹²⁵

Perumahan atau pemondokan jemaah haji dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu, *pertama*, perumahan yang disediakan

¹²⁴Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

¹²⁵Pasal 1 Angka 12 UU Np. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

pemerintah untuk jemaah haji selama di embarkasi, *kedua*, perumahan yang disediakan pemerintah untuk jemaah haji selama menetap musim haji di Arab Saudi, *ketiga*, perumahan yang disediakan pada waktu kedatangan di Tanah Air.

Penyiapan dan penetapan pelayanan akomodasi didasarkan atas Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tahun 2019, keputusan ini mengatur beberapa standar sebagai berikut:

1. Standar Kualitas Akomodasi. Dimana akomodasi yang disiapkan harus memiliki kualitas bangunan dengan kondisi baik dan layak, tersedia fasilitas lift yang bagus, ruang lobi, tersedia lampu penerangan yang cukup, mesin genset sebagai cadangan listrik, dan fasilitas tangga darurat.
2. Fasilitas teknis akomodasi pemondokan berupa a) Ruang lobi dengan fasilitas ac, meja resepsionis, dan tv. b) Fasilitas kamar tidur berupa ac, ranjang, kasur tebal, bantal, seprai, dan selimut. c) Fasilitas kamar mandi berupa kloset dan perlengkapan mandi. d) Fasilitas mushalla berupa ac, karpet, tempat wudhu, dan pengeras suara. e) Fasilitas ruang makan berupa meja dan kursi makan, tempat cuci tangan, dan tempat sampah.¹²⁶

Standar fasilitas akomodasi pemondokan direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI dengan melakukan kajian dan survey langsung terhadap pemondokan jemaah haji sebelum ditetapkan dalam suatu keputusan Dirjen.

Fasilitas pemondokan yang ditawarkan setara dengan hotel bintang 3 di Indonesia. Pemondokan di Mekkah memiliki fasilitas yang

¹²⁶Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

nyaman, layak, dan sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan jemaah haji. Hotel di Mekkah berjarak pemondokan dengan mesjid haram kurang lebih 4 kiloan, fasilitas pemondokan setara dengan bintang 4 yang terdiri ruang loby, lift sebanyak 4 dapat menampung 12 orang sekali angkut. Fasilitas kamarnya juga dilengkapi dengan air conditioner, 1 kamar ada yang terdiri dari 3 ranjang dan ada juga 4 ranjang, dilengkapi bantal dan selimut. Selain itu, setiap orang diberikan 5 dos air mineral botol selama tinggal di hotel. Kamar mandi dilengkapi shower dengan air dingin dan hangat.. fasilitas lainnya yang disiapkan adalah mesin cuci sebanyak 4 buah dengan daya cuci sebanyak 7 kilo.¹²⁷

Pelayanan hotel, baik di Mekkah dan Medinah telah memiliki unsur layak dan nyaman dilengkapi fasilitas setara hotel bintang 3 dan 4 hotel Indonesia. Pelayanan haji untuk jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi semakin baik dan optimal.

3. Katering

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi ditetapkan bahwa penyediaan konsumsi jemaah haji terdiri dari konsumsi selama berada di kota Madinah, Jeddah, Mekkah, dan ARMUZNA. Penyediaan layanan konsumsi dilaksanakan oleh perusahaan yang telah diseleksi oleh tim Penyedia Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi, perusahaan yang telah terseleksi akan mengadakan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan Perusahaan Katering Jemaah Haji. Tahun 2019 perusahaan katering yang melayani konsumsi jemaah haji di Arab Saudi terdiri dari 15 perusahaan di Medinah, 36 perusahaan di Mekkah, dan 2 perusahaan di Jeddah. Sedangkan layanan katering selama ARMUZNA ditangani oleh muassasah sebanyak 55

¹²⁷H. Ahmad Abd. Mutalib, *Jemaah Haji Kloter 22 Embarkasi Makassar*, wawancara via handpone tgl 11 Septmer 2019

Maktab dan Muta'ahidin sebanyak 18 Maktab.¹²⁸ Pelayanan konsumsi untuk jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Wilayah	Jumlah Layanan	Jenis Layanan	Lokasi Distribusi	Waktu Layanan	Waktu Distribusi
1.	Madinah	18 Kali	Makan Siang	Hotel Jemaah haji	Siang dan Malam	10.00-13.00 WAS
			Makan Malam			19.00-22.00 WAS
			Snack Pagi			Saat pembagian makan malam
		1 Kali	Paket			2 hari setelah jemaah tiba di hotel

¹²⁸Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

2.	Mekkah	40 Kali	Makan siang	Hotel Jemaah haji	Siang dan Malam	08.00-11.00 WAS
			Makan malam			19.00-22.00 WAS
			Snack pagi			Saat pembagian makan malam
		1 Kali	Paket			2 hari setelah jemaah tiba di hotel
3.	Jeddah	1 Kali	Paket	Bandara		Masa kedatangan dan kepulangan
			Makan pagi			06.00-08.00 WAS

4.	ARMUZ NA	15 Kali	Makan Siang	Tenda	Pagi, Siang, Malam	11.00- 14.00 WAS
			Makan Malam			18.00- 21.00 WAS
		1 Kali	Paket Snack Muzda lifah			Distri busi di Arafa h sblm ke Muzd alifah

Jemaah haji tahun 2019 mendapatkan pelayanan konsumsi selama di Arab Saudi, yaitu selama di kota Mekkah sebanyak 40 kali dengan porsi makan siang, malam, dan snack pagi. Menu yang disiapkan bervariasi setiap harinya, sedangkan rasa makanan disesuaikan dengan asal provinsi jemaah haji. Porsi makanan yang disiapkan telah memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah, dan air minum. Pelayanan konsumsi diberikan sebanyak 20 hari atau 40 kali jatah porsi makan, makan siang, malam, dan snack untuk pagi. Menu yang disiapkan juga bervariasi dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna, ada buah dan air mineral yang melimpah. Hanya saja yang menjadi sorotan jemaah adalah penghentian konsumsi 3 hari menjelang wukuf, padahal justru saat kondisi 3 sebelum wukuf jemaah butuh asupan gizi. Juga menjelang wukuf tanah haram disterilkan dari penjual makanan ala Indonesia yang sering mangkal di sekitar hotel, karena itu, kami sarankan

supaya ada baiknya jatah makan tetap diteruskan sampai jemaah diberangkatkan ke Arafah.¹²⁹

4. Transportasi Darat

Salah satu bentuk pelayanan haji selama di Arab Saudi adalah penyediaan sarana transportasi darat selama berada di Arab Saudi. Ketentuan penyediaan sarana transportasi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tahun 2019. Keputusan ini menetapkan tiga jenis layanan transportasi darat untuk jemaah haji selama di Arab Saudi, yaitu transportasi antar kota perhajian, transportasi shalawat, dan transportasi Armuzna.¹³⁰

Layanan transportasi antarkota perhajian melayani rute, yaitu, 1) Bandara Madinah-Pemondokan Madinah, 2) Madinah-Mekkah, 3) Jeddah-Mekkah, 4) Mekkah-Jeddah, 5) Mekkah-Madinah, 6) Pemondokan Madinah-Bandara Madinah. Transportasi darat menggunakan bus pembuatan tahun 2015 ke atas, kapasitas 47 kursi, dilengkapi ac, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam, ban anti bocor, bagasi, toilet, kulkas, kotak P3K, pengeras suara dan GPS.¹³¹

Pelayanan transportasi bus antarkota perhajian rute perjalanan diatur dalam suatu jadwal yang dioperasikan selama musim haji. Adapun jadwalnya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Masa Operasional	Waktu
----	----------	------------------	-------

¹²⁹II. Surahman Amin, Jemaah haji kloter 21 Papua Embarkasi Makassar, wawancara tgl 12 September via handpone

¹³⁰Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

¹³¹Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

1.	Bandara-Madinah	7-19 Juli	13 Hari
2.	Madinah-Mekkah	16-26 Juli	13 Hari
3.	Jeddah-Mekkah	20 Juli-05 Agustus	17 Hari
4.	Mekkah-Jeddah	17-29 Agustus	13 Hari
5.	Mekkah-Medinah	20 Agustus-06 September	17 Hari
6.	Medinah-Bandara	30 Agustus-15 September	17 Hari

Jarak pemondokan atau hotel jemaah haji di Mekkah berkisar antara kurang lebih 1000m sampai 5000m dari mesjid Haram, karena itu jemaah haji yang jarak hotelnya berada dalam radius tersebut ditetapkan mendapat layanan angkutan darat berupa bus yang mengantar jemaah haji dari pemondokan ke mesjid Haram PP. Jenis transportasi ini dikenal dengan bus shalawat yang beroperasi selama 24 jam. Untuk memudahkan mengakses layanan bus shalawat, maka jarak tempuhnya ditetapkan 9 rute dengan 56 halte dan 3 terminal akhir.

Panitia Pelayanan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, khususnya daerah kerja Mekkah menetapkan jadwal layanan transportasi yang secara umum terlihat dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Masa Operasional	Waktu
1.	Masa Kedatangan	16 Juli-06 Agustus 2019	22 Hari

2.	Masa Armina (Tidak Beroperasi)	07-15 Agustus	9 Hari
3.	Masa Kepulangan	16 Agustus-06 September 2019	22 Hari
	Total Masa Operasional		44 Hari

Pelayanan transportasi selama jemaah haji berada di Arafah-Muna-Muzdalifah (Armuzna) menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Arab Saudi yang operasionalnya dilaksanakan oleh *Naqabah 'Ammah Lissayyarat* dengan rute Mekkah-Arafah yang dibagi dalam 3 trip, diawali dari pukul 07.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00-24.00, setiap *Maktab* mendapat jatah 21 unit bus. Rute Arafah-Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah di mulai pukul 18.00 WAS sampai selesai dengan jumlah layanan sebanyak 7-9 bus per *Maktab*. Rute Muzdalifah-Mina yang dilaksanakan tanggal 9-10 Dzulhijjah dimulai pukul 23.00 WAS sampai selesai dengan jumlah layanan sebanyak 5 bus per *Maktab*. Rute Mina-Mekkah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Dzulhijjah dengan dua tahapan, yaitu, 1) Jemaah haji yang mengambil *nafar awal* (tanggal 12 Dzulhijjah) pemberangkatan pertama di mulai pukul 08.30 WAS sampai 16.00 WAS, 2) Jemaah dengan *nafar tsani* (tanggal 13 Dzulhijjah) pemberangkatan pertama mulai pukul 06.30 WAS dan terakhir pukul 16.00 WAS sampai selesai dengan jumlah layanan sebanyak 21 bus per *Maktab*.¹³²

5. Aspek Kesehatan

Penanggung jawab terhadap pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, maka Kementerian Kesehatan RI berkomitmen untuk

¹³²Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

mengwujudkan sistem pelayanan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan secara holistik yang dilakukan kepada orang perorang dan atau kelompok calon jemaah haji mulai proses pendaftaran sampai kembali ke tanah air.

Sistem pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu, *tahap pertama*, pemeriksaan dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas atau Rumah Sakit pada saat calon jemaah haji mendaftarkan diri dan mendapat nomor porsi. Pemeriksaan pertama akan ditetapkan apakah calon jemaah berstatus resiko tinggi atau rendah. *Tahap kedua*, pemeriksaan tahap kedua dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas dan atau Rumah Sakit setelah ditetapkan kepastian keberangkatan bagi calon jemaah. Aspek-aspek penilaian kesehatan pada tahap kedua meliputi aspek memenuhi syarat *istithba'a* kesehatan haji dan dikategorikan aktif dalam kegiatan promotive dan preventif, atau memenuhi aspek *istithba'a* kesehatan haji dengan pendampingan, atau tidak memenuhi aspek *istithba'a* kesehatan haji untuk sementara, dan atau tidak memenuhi aspek *istithba'a* kesehatan haji, seperti jemaah dengan kondisi klinis yang mengancam jiwa, gangguan jiwa berat, dan jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.

3. Pelayanan Haji Lembaga Tabung Haji Malaysia

Sistem pelayanan haji di Malaysia dikoordinir dalam satu atap, yaitu melalui lembaga tabung haji Malaysia. sejak tahun 1995 pasca berlakunya Akta 535 Tabung Haji. Sebelumnya berdirinya lembaga urusan tabung haji atau tabung haji terdapat dualisme kewenangan penanganan haji di Malaysia, yaitu pengelolaan dana haji yang sebelumnya ditangani oleh Badan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji (PWSBH) dan pelayanan haji yang dikoordinir oleh Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji. Pasca tahun 1969 setelah terbentuknya Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH) yang kemudian berlain nama menjadi Tabung Haji

melalui akta 539 Tahun 1995 Tentang Tabung Haji, maka kewenangan penanganan haji Malaysia di koordinir dalam satu atap, baik sistem pengelolaan dana maupun sistem pelayanannya melalui Tabung Haji. Karena itu, kewenangan tabung haji tidak hanya mengelola dan menginvestasikan dana haji, namun memiliki kewenangan tambahan berupa menkoordinir pelayanan jemaah haji Malaysia, sebelum keberangkatan, proses keberangkatan, dan pasca keberangkatan.

a. Proses Pendaftaran

Sejak tahun 1995 sistem pendaftaran haji pada lembaga tabung haji Malaysia menggunakan konsep sistem pendaftaran haji terbuka berdasarkan konsep “Mendaftar Dahulu, Didahulukan”. Karena itu, jemaah calon haji yang mendaftar berlaku sistem waiting list atau daftar tunggu. Tahun 2019 jumlah kuota jemaah haji Malaysia mencapai 30,200 orang pertahun. Masa tunggu calon jemaah haji Malaysia berdurasi 100 tahun sejak pendaftaran awal. Biaya perjalanan ibadah haji melalui Malaysia berkisar RM. 22,900,- ekuivalen Rp. 77,264,600,- dengan setoran awal jemaah calon haji berkisar RM 9,980,- ekuivalen Rp. 33.672,520,- biaya yang disubsidi tabung haji terhadap setiap jemaah calon haji tahun 2019 berkisar RM. 12,920,- ekuivalen 43,592,080,- biaya ini termasuk kategori *ideret cost* dengan rincian, yaitu, (1) Biaya penerbitan buku dan risalah haji, (2) Biaya kursus haji atau manasik haji, (3) Biaya petugas haji dan perubatan, (4) Biaya operasional haji dalam negeri (di Malaysia), (5) Biaya pelayanan haji selama di Arab Saudi, (6) Biaya pelayanan kesehatan.¹³³

Tahun 2018 total jumlah pendeposito yang menabung pada lembaga tabung haji mencapai 9,3 juta orang. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan jumlah pendeposito pada tahun 2017. Namun kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan data tahun 2015 total

¹³³www.tabung.haji.gov.my, diakses tgl 16 September 2019

nasabah pendeposito berjumlah 8,8 juta orang. Kenaikan jumlah nasabah pendeposito tidak terlepas dari tawaran imbal hasil yang ditawarkan tabung haji diatas bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah di Malaysia.

Tabung haji Malaysia tidak hanya menerima setoran jemaah calon haji, namun juga membuka peluang kepada masyarakat Muslim Malaysia yang ingin menyimpan uangnya di tabung haji. Karena itu masyarakat Muslim Malaysia yang pernah berhaji dan ingin berangkat haji melalui tabung haji Malaysia tidak mendapat subsidi dari hasil pengelolaan dana haji. Namun membayar biaya operasional haji secara utuh di tambah dengan biaya pengurusan visa haji, besarnya berkisar RM 22,900+ RM 2,200 (biaya visa haji) ekuivalen Rp. 77,264,600,- tambah Rp. 7,422,800,- Tabung haji Malaysia tidak hanya menerima setoran awal dana haji daripada calon haji, tapi dapat menerima pendeposito dari masyarakat Muslim Malaysia, dikarenakan bagi hasil yang diberikan tabung haji sedikit lebih tinggi daripada bank syariah di Malaysia.¹³⁴

Masyarakat Muslim Malaysia yang menyimpan uangnya melalui produk deposito tabung haji dan hendak mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji dapat menempuh jalur Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan ketentuan telah memiliki simpanan berkisar RM 1300,- umur pada saat mendaftar berkisar 14-55 tahun.

Minimnya kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Diraja Malaysia membuat antrian daftar tunggu haji semakin lama, namun pihak tabung haji memberikan kebebasan bagi jemaah calon haji yang cukup uang untuk mendaftar pada sejumlah travel haji dengan layanan haji khusus. Terdapat sejumlah travel haji yang bekerjasama dengan tabung haji untuk memberangkatkan jemaah calon

¹³⁴Hafidz, *Eksekutif Corporate Responsibility Tabung Haji Malaysia*, wawancara 1 September 2019

haji dengan biaya yang sedikit lebih mahal daripada haji reguler. Cara ini ditempuh untuk menanggulangi antrian daftar tunggu haji yang terbilang cukup lama di Malaysia. Daftar tunggu calon jemaah haji di Malaysia terbilang lama yaitu berkisar 100 tahun, akibat kuota haji yang terbatas yang dijatahkan pemerintah Saudi Arabia. Untuk menanggulangi daftar tunggu yang panjang, pihak tabung haji menyarankan jemaah calon haji yang cukup uang untuk mendaftar melalui jalur haji khusus yang ditangani travel haji yang bekerjasama dengan tabung haji.¹³⁵

Kuota haji Malaysia 2019 sebanyak 30.200 orang yang terbagi dalam haji reguler dengan kuota sebanyak 24.160 orang atau 80% dari total kuota, dan haji khusus sebanyak 6.040 orang atau 20% dari total kuota jemaah haji Malaysia. jemaah calon haji yang memilih jalur khusus dapat mendaftar pada travel-travel yang telah mendapat lisensi dari tabung haji Malaysia, terdapat kurang lebih 23 perusahaan travel berlisensi tabung haji di Malaysia.

b. Akomodasi atau Hotel

Tabung haji Malaysia menyiapkan 19 hotel untuk akomodasi jemaah haji Malaysia selama di Arab Saudi, 19 hotel di Mekkah, dan 5 hotel di Madinah. Fasilitas hotel yang disewa setara bintang 4 dan 5 dengan lokasi yang berjarak dekat dengan mesjid Haram dan mesjid Nabawi. Bahkan hotel di Madinah, jarak paling jauh berkisar 300 m dan yang terdekat sekitar 100 m.

Salah satu hotel yang berjarak 100 m dari mesjid Nabawi adalah hotel Anwar al-Madinah Movenpick merupakan hotel terbesar di Madinah dengan jumlah kamar mencapai 1.295 kamar dilengkapi dengan ac dan akses internet, kamar yang luas untuk keluarga, dan rombongan. Selain menjadi hotel terdekat dengan Masjid Nabawi, hotel ini juga dekat dengan semua tempat wisata utama di Madinah, yaitu akses mudah ke mesjid Nabawi, pemakaman al-Baqi', dan gunung Uhud. Hotel ini

¹³⁵Rashidi, wawancara

terhubung langsung ke pusat perbelanjaan dengan parkir bawah tanah. Hotel ini memiliki fasilitas pendukung, seperti lift, resepsionis 24 jam, dry cleaning, penukaran mata uang asing, staf multi bahasa, kotak penyimpanan aman, ATM, portir, Ruang rapat, pertokoan, tempat penitipan tas/barang, toko suvenir, dan internet tersedia. Fasilitas kamar dengan double dengan kamar mandi yang dilengkapi dengan shower pengaturan air panas dan dingin. Para tamu hotel dapat menikmati sarapan pagi di al-Rehab Restaurant dan makan malam di al-Salam Restaurant.

Hotel al-Haram al-Rawdah Madinah merupakan hotel yang diperuntukkan bagi jemaah haji Malaysia. Hotel ini setara dengan bintang 4 dengan lokasi yang berjarak sekitar 200 m dengan durasi tempuh sekitar 15 menit dari dan ke mesjid Nabawi. Hotel ini memiliki 596 kamar dengan fasilitas hotel terdiri dari kamar yang dilengkapi dengan ranjang double, triple, dan quadruple, tv, ac, wifi, kamar mandi dilengkapi shower air panas dan dingin, toilet. Jemaah haji Malaysia dapat tinggal dalam kamar secara kelompok, baik empat, lima, dan delapan orang. Hotel berlantai 14 ini dihuni oleh jemaah haji Malaysia kurang lebih 3.030 orang jemaah. Hotel ini juga dilengkapi dengan layanan laundry, pembersihan harian, brankas diresepsionis, ruang konferensi, dan took cemilan. Untuk kegiatan konsumsi, hotel ini dilengkapi dengan 3 restoran dengan menu berstandar internasional. Obyek penting disekitar hotel ini adalah mesjid Nabawi ditempuh kurang lebih 10 menit jalan kaki, mall bin Dawood 8 menit jalan kaki, akses ke pemakaman Baqi, medan perang Uhud dapat ditempuh 10-40 menit jalan kaki. Terdapat dua hotel di Medinah, yaitu hotel Anwar al-Madinah Movenpick dan al-Haram Madinah Hotel, keduanya setara bintang 5 dan 4 yang dilengkapi fasilitas serba lux dan nyaman untuk dihuni oleh jemaah haji selama di Arab Saudi.

Tabung haji memberikan pelayanan pada setiap hotel yang ditempati jemaah haji Malaysia. Tahun 2019, terdapat 750 orang petugas

haji yang terdiri dari 363 rombongan kebajikan, 264 petugas perobatan dengan 61 dokter yang 23 di antaranya adalah dokter spesialis. Selebihnya petugas katering, petugas siaga, dan media

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan jamaah, mereka bekerja sama dengan 5 perusahaan katering di Madinah dan 7 perusahaan di Mekkah.

BAB IV

Aspek Maqashid dalam Pengelolaan dan Pelayanan Haji

Pengertian Masalah secara bahasa, yaitu kata masalah diambil dari kata bahasa Arab dengan akar kata " **أصلح – يصلح** " yang bermakna baik. Kata tersebut bermasdar " **إصلاح** " yang bermakna kemanfaatan. Karena itu, Masalah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik melalui proses mendatangkan manfaat maupun melalui menolak mudarat layak disebut masalah.¹³⁶

Pengelolaan dana haji dapat dianalisis dengan pendekatan kemaslahatan dan teori masalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Tahir Ibn Asyur. Cakupan teori maslahahnya, sebagaimana berikut

1) Ar-Rawāj

Rawaj secara kebahasaan berarti lari, laku, beredar dan tersedia.³⁸ *Rawaj* dalam konteks ini adalah bagaimana kedua institusi haji ini menginvestasikan dana hajinya. Lembaga tabung haji Malaysia secara konsisten telah mengalokasikan dananya pada 4 pilar utama, yaitu, (1) Equity, (2) Sekuritas Pendapatan Tetap, (3) Harta Tanah, (4) Pasar Uang. Sedangkan di Indonesia, Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tersebut, BPKH memiliki kewenangan menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan investasi dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu, *pertama*, mekanisme penempatan. *Kedua*, mekanisme investasi.

Industry keuangan syariah, baik perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan BPKH yang memiliki kelebihan likuiditas dapat

¹³⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buty, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Cet. VI; Beirut: 1992, h. 27

memanfaatkan SBSN dengan ragam pilihan jangka waktu investasi, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemerintah menerbitkan sukuk negara dalam berbagai tenor, seperti Surat Pembendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dengan tenor 6 bulan, maupun seri PBS dengan tenor sampai 25 tahun.¹³⁷

BPKH mendapat mandat dari jemaah calon haji berdasarkan akad wakalah untuk menginvestasikan dana haji pada instrument investasi berbasis underlying transaksi dan berdasarkan prinsip syariah sebagai wujud dari pada *tarwiy amwal* (investasi kekayaan) dengan tujuan distribusi kekayaan secara merata agar supaya kekayaan tidak hanya dikuasai segelintir orang atau kapitalisasi kekayaan dan kartel (لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم Q.s.....distribusi kekayaan bagian dari tujuan syariat. Distribusi kekayaan dilakukan melalui mekanisme jual beli dan kerjasama atau patnership (mudharabah atau musyarakah). Untuk memudahkan distribusi kekayaan secara luas dan merata, syariat mengakomodir dan memaafkan transaksi yang mengandung unsure *gharar* yang tidak mengarah kepada tipu muslihat.

Investasi sukuk merupakan suatu proses kepemilikan aset yang dipindahkan kepada sejumlah investor melalui surat berharga yang umum dikenal dengan istilah *sanadat*, sertifikat, sukuk atau instrumen lain yang menggambarkan proporsi dari nilai aset yang relevan. Namun penerapannya belum sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu masih terdapat unsur *gharar* seperti diberlakukannya jual beli diskoun, imbalan atau kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada tanggal jatuh tempo.¹³⁸

Investasi dana haji yang dilakukan oleh fund manager atau profesional dibidangnya merupakan wujud dari *maqashid al-syariah* yang

¹³⁷ Darsono, dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, cet. I; Jakarta: Tazkia Publishing, 2017, h. 301

¹³⁸ Hulwati, *Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 94

berkaitan dengan *hifdzu al-mal* atau menjaga dan merawat kekayaan agar supaya tidak *idel* dan mengendap, bahkan berpotensi mendatangkan mudharat yang lebih besar, yaitu menjadi lahan basah bagi koruptor dan orang yang bermental bejat. Investasi dana haji pada sektor sukuk berbasis riil dan berpatokan pada prinsip syariah lebih memiliki kemaslahatan, karena tingkat resiko terkendali dan aman, serta menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari produk instrument investasi lainnya. Berdasarkan kaedah fikih sesuatu yang mengandung kemaslahatan lebih besar didahulukan daripada sesuatu yang mengandung mudarat.

2) Transparansi

Transparansi atau kejelasan harta maksudnya ialah harta yang menjadi objek kekayaan dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannya sehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atas harta dimaksud. Indikator transparansi meliputi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Perwujudan bentuk transparansi terealisasi dalam format *taut'siq* (perjanjian dan perikatan autentik) dan dipersaksikan (*isyhad*).¹³⁹

Kedua lembaga ini sama-sama telah menerapkan transparansi sesuai dengan indikator di atas. Lembaga tabung haji secara konsisten menyediakan dokumen dan informasinya melalui financial statement dan annual report yang bisa diakses langsung melalui laman webnya. Customer service juga menyediakan layanan 24 jam bagi siapapun yang menginginkan informasi tambahan. BPKH melakukan kontrak dengan jemaah calon haji berdasarkan akad wakalah. BPKH juga menerbitkan virtual account yang dapat diakses oleh calon jemaah haji setiap saat

¹³⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sistatis Fikih dan Ekonomi*, cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo PErsada, 2019, h. 66

untuk mengetahui posisi dana haji terhadap hasil investasi yang diperoleh.

Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran Negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian Negara Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.¹⁴⁰

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa Negara memiliki peran aktif demi tercalisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi bangsa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian seperti para pemikir muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bahwa dalam Islam pemenuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan moral dan agama. Selanjutnya Al-Mawardi berpendapat bahwa Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Menurutnya,

“Jika hidup di kota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum, atau rusaknya tembok kota, maka Negara harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan, jika tidak memiliki dana, Negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya”

Al-Mawardi menegaskan bahwa Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena

¹⁴⁰ Azfarinaz Amran, *Ilmuwan Islam al-Mawardi* (Scribd: Newspaper), h. 3.

setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (fardh kifayah) dan harus bersandar kepada kepentingan umum.¹⁴¹ Pernyataan Al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk mengadakan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, Negara dapat menggunakan dana Baitul mal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Lebih jauh ia menyebutkan tugas-tugas Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara sebagai berikut :

- 1) Melindungi agama
- 2) Menegakkan hukum dan stabilitas
- 3) Memelihara batas Negara Islam
- 4) Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- 5) Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
- 6) Mengumpulkn pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya
- 7) Membelanjakan dana Baitul mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibanya.¹⁴²

Seperti yang telah disebutkan, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Sebagai

¹⁴¹ Azfarinaz Amran, *Ilmuwan Islam Al-Mawardi* (Scribd: Newspaper), h. 3.

¹⁴² Muhammad Syafi'ie WS, *Pemikiran Politik Al-Mawardi* (Scribd: Jurnal Ilmiah), h. 9.

konsekuensinya, Negara harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut. Berkaitan dengan hal ini, al-Mawardi menyatakan bahwa kebutuhan Negara terhadap pendirian kantor lembaga keuangan negara secara permanen muncul pada saat terjadi transfer sejumlah dana Negara dari berbagai daerah lalu dikirimkan kepusat.

Al-Mawardi sependapat dengan pemikir Muslim abad klasik yang menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan Negara Islam terdiri dari Zakat, Ghanimah, Kharaj, Jizyah, dan Ushr. Terkait dengan pengumpulan harta zakat, al-Mawardi membedakan antara kekayaan yang tampak dengan kekayaan yang tidak tampak. Pengumpulan zakat atas kekayaan yang tampak, seperti hewan dan hasil pertanian, harus dilakukan langsung oleh Negara, sedangkan pengumpulan zakat atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum muslimin.¹⁴³

3) Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan

Akad muamalat terhadap harta kekayaan disyariatkan untuk melindungi harta yang menjadi objek kekayaan agar tidak berpindah tangan dengan cara-cara yang batil dan mengintimidasi pemiliknya. Ini dipahami dari firman Allah [hari orang-orang yang beriman janganlah kakmu memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang saling kamu ridai..] juga dari sejumlah hadis, seperti sabda Rasulullah [sesungguhnya darah, harta dan kehormatan sesama kalian haram atas kalian seperti haramnya pada hari ini di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini..] demikian juga sabda beliau, [tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridaan dirinya]. Rasulullah saw juga membenarkan mempertaruhkan nyawa untuk membela harta bahkan matinya dikategorikan mati syahid, [orang yang terbunuh karena

¹⁴³Muhammad Syafi'ie WS, *Pemikiran Politik Al-Mawardi* (Scribd: Jurnal Ilmiah), h. 11.

mempertahankan hartanya maka dia syahid]. Oleh karena itu setiap individu wajib menghormati hak milik orang lain, sehingga perbuatan merusak milik orang lain disanksi dengan kewajiban mengganti tanpa memperhatikan niat sengaja atau tidaknya perbuatan itu dilakukan. Perlindungan dimaksud tidak terbatas pada kekayaan pribadi seperti tersebut dalam nas-nas di atas tetapi mencakup dan berlaku juga untuk kekayaan kolektif umat, oleh karena itu pemimpin atau yang berwenang berkewajiban menetapkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan umat baik dalam transaksi internal maupun dengan pihak luar.

Sistem perlindungan terhadap harta telah diimplementasikan oleh BPKH sebagai mana yang tertuang pada salah satu program kerja strategis yakni perlindungan dan pencadangan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Program Kerja Strategis Bidang Investasi BPKH

No	Program	Kegiatan	Output	Outcome
3.	Perlindungan dan Pencadangan Investasi	3. Melakukan Pencadangan risiko Investasi.	Pembentukan Pencadangan Minimal 1% dari Nilai Investasi Langsung	Memberikan Perlindungan dan Kepastian Investasi
		4. Melakukan External Counsel fee Investasi Langsung	Kerjasama dengan Jasa Konsultan Hukum untuk Pelaksanaan	Memberikan Perlindungan dan Kepastian Investasi

			Rencana Investasi Langsung	
--	--	--	----------------------------------	--

Diolah dari Dokumen Renstra BPKH 2018-2022

System perlindungan ini juga dipertegas dalam sub kegiatan bidang pengawasan BPKH mencakup enam aspek bidang pengawasan dan penempatan yang tergambar dalam table berikut ini:

No	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1.	Pengawasan Bidang Investasi	Pemeriksaan Lapangan Terkait Investasi	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Dana Haji	4. Pengawasan atas Pelaksanaan dan Pengeluaran Dana dan Investasi Dana Haji 5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat atas Fungsi dan Tugas BPKH 6. Meningkatkan Pelayanan Jemaah
2.	Pengawasan Bidang Investasi	Konsinyering Pembahasan Persetujuan Investasi BPKH	Persetujuan atas Investasi BPKH	Optimalisasi Investasi BPKH Prinsip Kehati-hatian atas Investasi

3.	Pengawasan Bidang Investasi	Konsiyering Raker Dewan pengawas Tentang Pemeriksaan Nilai Manfaat	Laporan Kinerja Penempatan dan Investasi Terhadap Kenaikan atau Penurunan Nilai Manfaat	3. Pengawasan Terhadap Penempatan dan Investasi untuk Mengoptimalkan Nilai Manfaat 4. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan nilai manfaat
4.	Pengawasan Bidang Investasi	Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Investasi	Pemetaan risiko Investasi, Komite Laporan Kinerja Investasi dan Pemetaan Profil Investasi	3. Meningkatkan Orientasi pada Instrumen Syariah 4. Mengembangkan Instrumen Keuangan Syariah
5.	Pengawasan Bidang investasi	Konsiyering Pembahasan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Investasi Bulanan, Triwulan, dan Semeste dan	Meningkatkan Dana Kelelaan	Meningkatkan Kepercayaan Menjalin Kerjasama dengan Membangun Sinergi

		Tahunan		
6.	Pengawasan Bidang Investasi	Penyusunan Peraturan dan SOP Investasi	3. SOP Pedoman Kerja Komite Investasi 4. SOP Pedoman Kerja Komite Lainnya	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Bidang Investasi

Diolah dari Renstra BPKH 2018-2022

System perlindungan pada tabung Haji Malaysia tertuang pada Pasal 11 ayat (1) Akta Tabung Haji Nomor 535 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa divisi penilaian portofolio dan pengurusan risiko memiliki andil yang signifikan dalam menganalisis resiko investasi secara profesional. Instrument investasi yang telah nilai dan diverfikasi aspek resikonya oleh divisi ini, maka proposal investasinya akan diajukan kepada Menteri di jabaratan Perdana Menteri untuk di tindak lanjuti.¹⁴⁴ Selain itu dana investasi juga dilindungi system Takaful oleh subsidiary dari LTH.

Mitigasi resiko bagian dari prinsip maqashid syariah berkaitan perlindungan terhadap kekayaan, seperti praktek Ibn Abbas ketika memberikan modal kepada pengelola usaha dalam bisnis mudharabah, namun disertai syarat tertentu dari pemilik modal. Karena itu akad mudharabah sebagai akad kerjasama mengandalkan kepercayaan, namun

¹⁴⁴Perpustakaan Negara Malaysia, *al-Haj the Malaysian Experience; In Conjunction With The 50th Anniversary of Lembaga Tabung Haji*, (Publisher: Islamic Arts Museum Malaysia, 2013)

kondisi social masyarakat modern yang moralnya sudah tergradasi sehingga bisnis mudharabah harus diikuti dengan jaminan.

Resiko bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, *pertama*, risiko investasi yang tidak dapat dihindarkan yang terbagi dalam tiga criteria, 1) Resiko yang dapat diabaikan (*al-gharar yasir*), yaitu bisnis berpotensi mengandung unsure *gharar yasir* yang mafsadatnya ringan, ketimbang mengabaikan maslahata yang lebih besar. 2) Resiko yang tidak dapat dihindarkan, 3) dan resiko yang diinginkan atau sengaja. *kedua*, Mitigasi resiko untuk spekulasi.¹⁴⁵

Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.¹⁴⁶ Ekonomi islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu.

Dalam konsep ekonomi syariah uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods*. Oleh karena itu dalam Islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang untuk melakukan penimbunan. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan

¹⁴⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 213

¹⁴⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 267.

modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.¹⁴⁷ Adapun ciri-ciri uang yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- 2) Mudah dibawa-bawa
- 3) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- 4) Tahan lama
- 5) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
- 6) Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa. Menurut Syah Wali Allah ad-Dahlawy, (ulama besar asal India yang hidup pada abad 18 M), pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem barter ini merupakan sistem pertama kali dikenal dalam sejarah perdagangan dunia. Hal ini terjadi jauh sebelum abad VII M (sebelum masa Nabi Muhammad Saw). Dalam sejarah kuno, binatang ternak pernah menjadi medium pertukaran yang dominan. Tetapi dalam hal ini timbul masalah (kendala), karena ternak adalah barang yang tidak awet dan terlalu besar dijadikan sebagai alat tukar. Tanpa mata uang sebagai standar harga dan alat tukar maka proses pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sulit. Dalam ekonomi barter, transaksi terjadi bila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama

¹⁴⁷Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 239.

membutuhkan barang yang dimiliki pihak kedua dan begitu sebaliknya. Misalnya seseorang mempunyai sejumlah gandum, dan membutuhkan onta yang tidak dimilikinya. Sementara orang lain mempunyai onta dan membutuhkan gandum. Maka, terjadilah barter. Tetapi dalam hal ini, berapa banyak gandum yang akan ditukarkan dengan seekor onta, ukurannya belum jelas, harus ada standar

Dari penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan fungsi uang dalam islam ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Uang sebagai perantara tukar-menukar

Dengan adanya uang seseorang yang menginginkan sesuatu barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Adanya uang telah memungkinkannya untuk memperoleh barang yang diinginya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan kemudian memperoleh barang tersebut. Penjual barang tersebut selanjutnya dapat menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli barang yang diingini dari orang lain.

2. Uang sebagai satuan nilai

Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Ada kemungkinan orang lebih suka

menerima pembayaran yang tertunda dalam bentuk barang atau menghindari tukar menukar dengan pembayaran yang ditunda. Keadaan seperti itu selalu terjadi pada waktu harga-harga barang mengalami kenaikan yang cepat dari waktu ke waktu

4) Jaminan Hukum

Syariat mengatur agar transaksi perniagaan dan sejenisnya dengan maksud agar pemindahtanganan kepemilikan memiliki kekuatan hukum. Hal itu dapat dipahami dengan disyariatkannya saksi dan akta tertulis. Allah berfirman, (dan hadirkanlah saksi jika kalian berjual beli)⁵⁸ dalam ayat yang sama Allah perintahkan [jika kalian melakukan suatu transaksi hutang piutang hingga waktu tertentu maka tuliskanlah]⁵⁹ Baik BPKH maupun LTH sama memiliki landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan keuangannya.

Badan pengelola keuangan haji Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Pasal 1 angka 4 UU No. 34 Tahun 2014 Tentang {Pengelolaan Dana Haji menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.¹⁴⁸ Lahirnya Undang-undang ini memberikan kewenangan absolut pengelolaan dana haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebelumnya pengelolaan dana haji menjadi kewenangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Secara manajemen, adanya dua kewenangan yang berbeda fungsi pengelolaan berdampak pada inefisiensi, sehingga diperlukan distribusi kewenangan. Pengelolaan dana haji tidak optimal jika dipadukan dengan kewenangan yang berorientasi pelayanan publik, karena itu, kewenangan pengelolaan dana haji ini didistribusikan pada badan yang berorientasi korporasi dan nirlaba.

¹⁴⁸Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji Pasal 1 angka 4

Organisasi dan tata kelola badang pengelola keuangan haji terdiri dari dua pilar utama, yaitu, *pertama*, Badan Pelaksana (BP), *kedua*, Dewan Pengawas (DP). Badan pelaksana memiliki struktur organisasi yang terdiri dari; 1. Bidang hukum dan kepatuhan, 2. Bidang Renbang, 3. Bidang Keuangan, 4. Bidang Investasi, 5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemaslahatan, 6. Bidang Operasional, 7. Bidang Manajemen Resiko. Sedangkan Dewan Pengawas memiliki perangkat yang terdiri dari; 1. Bidang Audit, 2. Bidang Investasi dan Resiko, 3. Bidang Syariah.¹⁴⁹ Struktur organisasi BPKH sebagai berikut:

Pasal 22 dan 23 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji, BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Sedangkan fungsinya mencakup Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji; Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji; Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji; dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tersebut, maka BPKH memiliki kewenangan menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji memberikan tugas dan kewenangan Badan Pelaksana dibidang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan fungsi Badan Pengawas diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 34 Tahun 2014, yaitu memberikan

¹⁴⁹www.bpkh.co.id, *Struktur Badan Pengelola Keuangan Haji*, diakses Agustus 2019

penilaian dan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Badan pelaksana dan Dewan pengawas diberikan kewenangan pengelolaan dan penginvestasian dana haji dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip syariah dan apabila terjadi resiko yang diakibatkan atas kelalaian dalam pengelolaan dan investasi, maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.¹⁵⁰

Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji berdasarkan enam asas, yaitu, *pertama*, harus sesuai dengan prinsip syariah, *kedua*, mengedepankan prinsip kehati-hatian, *ketiga*, memiliki nilai manfaat, *keempat*, bertujuan nirlaba, *kelima*, dikelola secara transparan, *keenam*, dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji menyebutkan bahwa BPKH berfungsi sebagai badan pengelola dana haji dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, penggunaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang rasional dan efisien, hasil pengelolaan dana haji memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.¹⁵¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 ini merupakan payung hukum kerangka strategis arah kebijakan BPKH.

Pelaksanaan teknis atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH melakukan penyusunan sejumlah peraturan pelaksanaan yang rumuskan oleh BPKH terdiri dari; (1)

¹⁵⁰Pasal 50 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji

¹⁵¹Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji

Penyusunan Peraturan, (2) Kelembagaan, (3) GCG dan Kode Etik, (4) BPS-BPIH, (5) Penempatan, (6) Investasi, (7) Pengadaan Barang dan Jasa, (8) Perencanaan, Penyusunan, Revisi, Pelaksanaan, dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Anggaran, (9) Operasional, Belanja Barang, Belanja Modal, Pengelolaan Kekayaan, (10) Kemaslahatan dan Penggunaan DAU, (11) Pengawasan dan Pemantauan, (12) Whistblowing, (13) Laporan Barang dan Jasa Luar Negeri, (14) Tatacara Pemberian Penilaian dan Persetujuan Penempatan dan Investasi oleh Dewan Pengawas, (15) Tatacara Pemberian Penilaian Persetujuan Renstra, RKAT, Laporan Pertanggungjawaban BPKH oleh Dewan Pengawas.¹⁵²

5) Keadilan

Keadilan dalam berharta atau *al-'adālah fil māl* maksudnya ialah bahwa pemerolehan harta kekayaan tidak merugikan pihak lain dan kepentingan umum, baik pemerolehan yang berupa imbalan dari suatu kerja yang dilakukan, atau kompensansi dari harta yang diberikan, atau donasi, atau warisan. Privasi pemilik harta dalam memanfaatkan hartanya pada kondisi tertentu akan dibatasi jika merugikan pihak lain baik individu maupun umum. Distribusi pendapatan yang dilakukan oleh kedua lembaga ini telah dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing.

BPKH memiliki divisi kemaslahatan. Divisi ini bertugas mengembangkan dana abadi umat (DAU). Hasil optimalisasi DAU didistribusikan pada lembaga-lembaga social masyarakat, seperti ormas, pesantren, mesjid, serta bantuan kemanusiaan. Program-program kemaslahatan BPKH telah menjangkau wilayah Indonesia yang perlu mendapat porsi bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan, seperti pada bantuan gempa di Kabupaten Palu. Distribusi program kemaslahatan dilakukan secara transparan dan berkeadilan kepada semua lembaga dan ormas-ormas keagamaan. Hal ini bagian dari amanah undang-undang

¹⁵² Badan Pengelola Keuangan Haji, *Rencana Strategis BPKH 2018-2022*

bahwa hasil optimalisasi program kemaslahatan diperuntukkan pada kemaslahatan umat Islam.

BAB V

Implikasi Investasi Dana Haji Terhadap Pelayanan Haji

A. Pelayanan Haji oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji Kemenag RI

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi; pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah haji kepada jemaah calon haji atau jemaah haji di tanah air maupun di Arab Saudi.

Berdasarkan Undang-undang di atas, penyelenggaraan haji merupakan kewenangan Pemerintah. Kewenangan tersebut mencakup pembinaan, pelayanan, perlindungan dengan tersedianya layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, perlindungan asuransi, dan keamanan terhadap jemaah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI terbagi dalam dua sistem kuota, yaitu, *pertama*, kuota haji reguler, *kedua*, kuota haji khusus. Sistem pendaftaran haji reguler melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT), sedangkan pendaftaran haji reguler melalui pihak swasta atau biro perjalanan haji dan umrah dengan izin resmi dari Kementerian Agama.¹⁵³

Tahun 1987 melalui rapat menteri luar negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap negara sebanyak 1:1000 orang dari total jumlah penduduk yang beragama Islam. Namun sejak tahun 1997 jumlah jemaah haji Indonesia melebihi

¹⁵³Dokumen Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Kementerian Agama RI

kuota resmi setiap tahunnya, sehingga sejak tahun 1997 berlaku sistem daftar tunggu. Pada tahun 2013 M/1434 H ditetapkan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 211.000 orang berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Indonesia beragama Islam.

Tahun 2013 Pemerintah Arab Saudi merenovasi dan memperluas area mesjid Haram Mekkah, kebijakan ini berdampak pada pengurangan kuota jemaah haji Indonesia. Semua negara yang memberangkan calon jemaah haji mendapat pengurangan kuota mencapai 20% dari total 211.000 jemaah menjadi 168.800 jemaah. Masing-masing 155.200 orang jemaah haji reguler, dan 13.600 orang jemaah haji khusus. Berdasarkan hal ini, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia tahun 1435 H/2014 sebanyak 168.800 orang jemaah terdiri dari 155.200 orang jemaah haji reguler dan 13.600 orang jemaah haji khusus. Pembatasan kuota ini berlangsung sampai tahun 2016 M.¹⁵⁴ Pelayanan Haji dalam Perspektif Maqashid, yaitu:

1) Menjaga Agama

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam. Untuk melaksanakannya, dibutuhkan badan khusus sebagai penyelenggara. Di Indonesia, Penyelenggaraan ibadah haji menjadi kewenangan absolute Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Kewenangan tersebut mencakup aspek penyelenggaraan haji, pengelolaan dana haji dan dana abadi umat. Sedangkan pada aspek pelaksanaan ibadah haji mencakup, (1) pembinaan calon jemaah haji sebelum dan pasca keberangkatan. (2) pelayanan meliputi transportasi, akomodasi, dan pemondokan selama di tanah suci Madinah-Mekkah. (3) perlindungan jemaah haji dari aspek perlindungan hukum dan perlindungan jiwa melalui asuransi jiwa ketika jemaah

¹⁵⁴Dokumen Manajemen Haji Indonesia Kementerian Agama RI

meninggal dunia dalam masa pertanggung. UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji menjadikan kewenangan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji menjadi relative. Amanah Undang-undang tentang Pengelolaan Dana Haji mengharuskan pengelolaan dana haji dikelola oleh suatu badan hukum public mandiri dan independen bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan ini dinamakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tugas dan fungsi badan ini adalah mengelola dan mengembangkan dana haji yang bersumber dari setoran awal jemaah haji dan dana abadi umat (DAU) secara optimal untuk dipergunakan pada peningkatan pelayanan haji, efisiensi dan rasionalitas dalam penggunaan biaya pelaksanaan ibadah haji, dan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat Islam.

Sedangkan penyelenggara ibadah Haji di Malaysia merupakan tanggungjawab Lembaga Tabung Haji (LTH).LTH merupakan lembaga berbadan hukum yang tertuang di bawah Akta Lembaga Tabung Haji, 1995 (Akta 535). Tujuan utama TH adalah penyelenggaraan dan pelayanan urusan Haji Malaysia, serta pengelolaan dana haji yang bersumber dari tabungan jemaah calon haji Malaysia. Dana setoran awal tersebut diinvestasikan pada sektor perladangan, hartanah, pembinaan, perbankan, teknologi maklumat, minyak & gas asli, pelancongan atau biro travel, perkhidmatan dan makanan halal

2) Menjaga Jiwa

Jiwa dalam hal ini adalah terpenuhiya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, papan dan pangan.Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Tabung haji Malaysia menyiapkan 19 hotel untuk akomodasi jemaah haji Malaysia selama di Arab Saudi, 19 hotel di Mekkah, dan 5 hotel di Madinah.Fasilitas hotel yang disewa setara bintang 4 dan 5 dengan lokasi yang berjarak dekat dengan mesjid Haram dan mesjid Nabawi. Bahkan hotel di Madinah, jarak paling jauh berkisar 300 m dan yang terdekat sekitar 100 m. Tabung haji memberikan pelayanan pada setiap hotel yang

ditempati jemaah haji Malaysia. Tahun 2019, terdapat 750 orang petugas haji yang terdiri dari 363 rombongan kebajikan, 264 petugas perobatan dengan 61 dokter yang 23 di antaranya adalah dokter spesialis. Selebihnya petugas katering, petugas siaga, dan media. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan jemaah, mereka bekerja sama dengan 5 perusahaan katering di Madinah dan 7 perusahaan di Mekkah.

Penyiapan dan pencetakan pelayanan akomodasi didasarkan atas Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tahun 2019, keputusan ini mengatur beberapa standar. Akomodasi yang disiapkan harus memiliki kualitas bangunan dengan kondisi baik dan layak, tersedia fasilitas lift yang bagus, ruang lobi, tersedia lampu penerangan yang cukup, mesin genset sebagai cadangan listrik, dan fasilitas tangga darurat. Fasilitas teknis akomodasi pemondokan berupa a) Ruang lobi dengan fasilitas ac, meja resepsionis, dan tv. b) Fasilitas kamar tidur berupa ac, ranjang, kasur tebal, bantal, seprai, dan selimut. c) Fasilitas kamar mandi berupa kloset dan perlengkapan mandi. d) Fasilitas mushalla berupa ac, karpet, tempat wudhu, dan pengeras suara. e) Fasilitas ruang makan berupa meja dan kursi makan, tempat cuci tangan, dan tempat sampah.¹⁵⁵

Standar fasilitas akomodasi pemondokan direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI dengan melakukan kajian dan survey langsung terhadap pemondokan jemaah haji sebelum ditetapkan dalam suatu keputusan Dirjen. Penyediaan layanan konsumsi dilaksanakan oleh perusahaan yang telah diseleksi oleh tim Penyedia Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi, perusahaan yang telah terseleksi akan mengadakan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Urusan Haji

¹⁵⁵Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

Indonesia di Jeddah dengan Perusahaan Katering Jemaah Haji. Tahun 2019 perusahaan katering yang melayani konsumsi jemaah haji di Arab Saudi terdiri dari 15 perusahaan di Medinah, 36 perusahaan di Mekkah, dan 2 perusahaan di Jeddah. Sedangkan layanan katering selama ARMUZNA ditangani oleh muassasah sebanyak 55 Maktab dan Muta'ahidin sebanyak 18 Maktab.¹⁵⁶

3) Menjaga Akal

Indicator terjaminnya akal bisa dilihat dari kegiatan penyelenggaraan atau alokasi dana ke sector pendidikan dan pembinaan. Salah satu program kemaslahatan yang dialokasikan oleh BPKH adalah pendidikan dan Dakwah sebesar 10%. Selain itu, BPKH juga menyelenggarakan program pembinaan, baik kepada pembimbing maupun kepada calon jemaah haji

4) Menjaga Harta

Pada BPKH, Ada 4 poin yang bisa dianalisis terkait harta dalam perspektif maqashid yakni, Peningkatan Imbal hasil, peningkatan dana kelola, terjaminnya ketersediaan likuiditas dan meningkatnya kontribusi positif bagi kemaslahatan umat. Adapun peningkatannya, bisa kita lihat:

Dimensi Harta	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	2019
Imbal Hasil	Meningkatnya imbal hasil	6.38 %	6.78 %
Dana Kelola	Meningkatnya dana kelola	111.8	121.3

¹⁵⁶Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

Likuiditas	terjaminnya ketersediaan likuiditas	2x	2x
Kontribusi Umat	meningkatnya kontribusi positif bagi kemaslahatan umat	Pelayana n ibadah haji (20%), Pendidik an dan Dakwah (25%), Kesehat an (10%), Sosial Keagam aan (5%), Pember dayaan Ekonom i Umat (20%), Pemban gunan Sarana dan Prasaran a Ibadah (20%)	Pelayanan ibadah haji (20%), Pendidika n dan Dakwah (25%), Kesehata n (10%), Sosial Keagamaa n (5%), Pemberda yaan Ekonomi Umat (20%), Pembang unan Sarana dan Prasarana Ibadah (20%)

Badan pengelola keuangan haji dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji. Secara resmi badan ini memiliki kewenangan penuh mengelola dan mengembangkan dana haji pada sector-sektor bisnis yang diamanahkan oleh undang-undang haji. Total dana haji berkisar Rp. 113 triliun merupakan sumber dana segar untuk dikelola pada instrument investasi. Pengelolaan dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia.

B. Dimensi Jihad dalam Ibadah Haji Perspektif Hadis

Dalam kitab *tuhfatul al-ahwaziy* syarh Tirmidzi disebutkan bahwa jihad untuk wanita tidak wajib berdasarkan hadis 'Aisyah yang bertanya kepada Nabi saw perihal apakah wanita dibolehkan berangkat berperang, Nabi menjawab cukup bagi mereka melaksanakan kewajiban haji dan umrah. Alasannya, perang butuh tenaga ekstra dan kemampuan fisik, wanita kurang memiliki kemampuan untuk itu, namun pada kesempatan lain disebutkan dalam hadis Ummu 'Athiyah yang menjelaskan bahwa mereka kadang pergi ke medan perang dengan tugas menyiapkan makanan, mengobati orang sakit, dan pasukan yang terluka.¹⁵⁷ Dengan mempertemukan dua hadis yang berbeda maknanya, maka dapat disimpulkan bahwa jihad berperang tidak wajib bagi wanita, namun mereka dapat melaksanakan tugas itu sebagai team kesehatan dan menyiapkan perbekalan perang yang hukumnya juga bersifat anjuran, bukan kewajiban.

Ibadah haji merupakan ibadah yang menuntut kesiapan fisik, mental dan materi. Jemaah haji akan melalui serangkain aktifitas atau prosesi haji yang begitu padat dan melelahkan, mereka akan mengerahkan kemampuan dan upaya maksimal untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa wanita yang telah berniat ikhlas dan mengerahkan segala kemampuannya untuk berhaji, maka pada hakekatnya telah mendapatkan pahala yang sebanding dengan berperang menegakkan kalimat Tauhid.

¹⁵⁷ Kitab *Tuhfatul Ahwaziy*, CID Room Maktabah Syamilah

Salah satu bentuk jihad adalah menyuarakan kebenaran atau keadilan terhadap pemimpin zalim atau otoriter. Dalam kitab *'aunul ma'bud* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyuarakan kebenaran adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, baik melalui lisan maupun tulisan. Dikatakan bahwa menyeruh kepada kebenaran dihadapan penguasa otoriter dianggap sebagai bagian dari jihad, karena dalam berjihad akan muncul perasaan khawatir apakah dapat menang dalam peperangan atau justru sebaliknya, perasaan itu juga dirasakan ketika menyuarakan kebenaran terhadap penguasa otoriter, sehingga bagi yang melakukan hal itu, berarti telah merelakan dirinya untuk disiksa.¹⁵⁸

Keadilan dan kebenaran merupakan prinsip-prinsip agama yang sangat mulia yang seharusnya dapat menghiasi para pemimpin, sebab salah satu prasyarat bagi seorang pemimpin adalah mampu bertindak adil dan berkata benar. Meskipun keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan sulit untuk diwujudkan secara pasti, tapi paling tidak dengan standar dan ukuran yang umumnya diketahui oleh masyarakat serta aturan dan etika, maka keadilan itu tidak mustahil dapat direalisasikan.

Keadilan dapat melahirkan perdamaian dan ketentraman, sehingga perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam berbagai aspek dianggap sebagai jihad. Lawan dari perdamaian adalah kekerasan, yaitu kekerasan yang diakibatkan oleh dua hal, *pertama*, kekerasan horisontal, yaitu kekerasan antar pribadi dan, kelompok, dan *kedua*, kekerasan struktural atau vertikal, yaitu kekerasan yang diakibatkan oleh kekuasaan lebih mendahulukan dan melindungi dirinya, dimana seringkali kekerasan jenis ini tidak dirasakan karena tidak tampak.¹⁵⁹ Kekerasan struktural sangat efektif dalam melakukan pengrusakan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak bernuansa keadilan dan

¹⁵⁸ kitab *'Aunul Ma'bud*, CD Room Maktabah Syamilah

¹⁵⁹ John C. Raines, *Perdamaian dan Keadilan dalam Perspektif Global*, dalam *Islam dan Perdamaian Global*, (Cet. 1; Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 46

pro rakyat, sehingga menimbulkan kekerasan horisontal yang berakibat benturan antar pribadi dan kelompok.

Jenis jihad yang lain dapat ditemukan pada berbakti pada kedua orang tua, yaitu hadis يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جُنْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ وَالْدَارَ "الْآخِرَةَ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا" yang berarti seorang sahabat menghadap Nabi sambil berkata wahai Rasul saya ingin berjihad bersamamu mengharap ridha Allah dan akhirat, sungguh aku telah datang untuk itu, akan tetapi orang tuaku menangisiku, nabi bersabda kembalilah kepada keduanya, ceriakanlah mereka berdua sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis". Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan oleh beberapa mukharrij, diantaranya oleh Bukhari, Muslim, an-Nasai, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal.

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Usman bin Affan bahwa siapa yang ingin berangkat berperang, lalu ibunya memintanya untuk tinggal menemaninya, hendaknya tetap menemani ibunya. Atas dasar itu, Imam Syafi'I, Malik, Ahmad dan 'Auzai berpendapat bahwa wajib meminta izin orang tua ketika hendak berangkat berjihad menegakkan kalimat Allah.¹⁶⁰

Substansi hadis di atas sejalan dengan perintah Allah dalam al-Qur'an untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Isra ayat 23-24:

"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا"

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika seseorang diantara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya

¹⁶⁰ Kitab *Syarh an-Nawawi*, CID Room Maktabah Syamilah.

*perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*¹⁶¹

Ayat di atas juga didukung dengan hadis-hadis yang lain yang menguraikan tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga bagi yang melakukan hal itu dianggap telah mendapatkan pahala sebanding dengan pahala jihad. Menjaga dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka berdua memasuki usia lanjut, perhatian dan kasih sayang seorang anak sangat dibutuhkan, untuk itu, ketika seorang sahabat meminta izin untuk berjihad bersamanya, dan dia mengatakan bahwa orang tuanya sangat mengharapkannya tinggal dirumah menemani mereka berdua, Nabi pun tidak mengizinkan sahabat itu, tapi menyarankan untuk merawat kedua orang tuanya, yang perbuatannya itu dianggap sebagai jihad.

Berdasarkan hadis-hadis yang menguraikan tentang bentuk-bentuk jihad, maka dapat disimpulkan bahwa jihad tidak saja berkonotasi perang, tapi juga memiliki makna lain, yaitu pentingnya berhaji dan umrah, menyuarakan keadilan pada pemerintah zalim, dan berbakti kepada kedua orang tua dianggap sebagai jihad.

Haji termasuk rukun islam yang kelima. Pelaksanaannya menuntut kesiapan fisik, ekonomi, dan mental. Karena itu, para calon jemaah haji telah mempersiapkan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah Swt. Persiapan itu dilakukan bertahun-tahun lamanya dengan menyetor uang porsi sebanyak Rp. 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Sejak beberapa tahun belakang ini, jumlah kuota haji Indonesia berkurang dari sekitar 200 ribuan calon jemaah haji, sehingga daftar tunggu hampir disemua kabupaten kota diseluruh Indonesia mencapai 10-20 tahun masa tunggu. Karena itu, perjuangan untuk berangkat berhaji merupakan bagian dari salah satu bentuk jihad.

¹⁶¹ Departemen Agama, *Syaamil al-Qur'an, The Miracle*, (Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 65 dan 369

1. Hadis tentang pahala jihad

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكْفُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَزِدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ

Artinya: “Allah Yang Maha Perkasa menjamin bagi yang berjihad di jalan Nya, yaitu orang tidak keluar (dari rumahnya) kecuali senantiasa berjihad di jalan-nya dan membenarkan kalimat Allah (yaitu tauhid), maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga...”

Dijelaskan dalam kitab *al-Muntaqi syarh al-Muatta*, bahwa Allah menjamin bagi orang yang berangkat berjihad di jalan Allah dengan pahala yang melimpah. Kata "تكفل" yang artinya “menjamin” menunjukkan bahwa jihad itu sangat penting sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dengan syarat jihad dilakukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mengejar harta rampasan atau mencari popularitas. Apabilah jihad dilakukan untuk menegakkan kalimat tauhid, maka dijanjikan pahala surge apabila syahid di medan perang dan sama sekali tidak dikurangi haknya untuk memperoleh pahala itu.¹⁶² Hadis ini termasuk disepakati kesahihannya, sebab diriwayatkan dari berbagai sumber, diantaranya dari Abu Hurairah dari jalur Abi Zanad dan selainnya.¹⁶³ Kandungan hadis Nabi ini sejalan dengan firman Tuhan yang dipaparkan dalam surah at-Taubah ayat 111 yang berbunyi:

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri dan harta maupun harta mereka

¹⁶² Kitab *Muntaqi Syarah al-Muatta*, CD Room Makatabah Syamilah.

¹⁶³ Imam al-Baqawiy, *Syarh as-Sunnah*, Juz X, (cet. I; Beirut: Maktabah Islami, 1983), h. 350

dengan memberikan surge untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, demikian itulah kemenangan yang agung.¹⁶⁴

Berdasarkan kandungan hadis di atas yang memberikan pahala bagi yang berjihad di jalan Allah dengan janji surga adalah merupakan balasan yang agung. Namun balasan itu mencakup semua bentuk jihad, bukan saja jihad dalam pengertian berperang di jalan Allah, tapi mencakup juga bentuk jihad yang lain, dengan syarat bahwa semua aktifitas itu dilaksanakan untuk mencari ridha Allah swt.

2. Hadis tentang sanksi bagi yang melalaikan jihad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غُنَيْمَةَ أَنَّنَا أَبُو جَنْبَابٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ خُوْشَبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ تَرْكُزُوا الْجِهَادَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ
لِيُزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ لَا تَنْفُكُ عَنْكُمْ حَتَّى تَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ

Artinya: "Seandainya kalian meninggalkan jihad dan telah mengambil ekor sapi, dan menjual dengan sistem ainiyah, pasti Allah akan menetapkan atas kalian kehinaan yang tidak akan terlepas dari diri kalian, sehingga kalian bertobat kepada Allah, dan kembali menjalani sikap seperti sebelumnya"

Disebutkan dalam kitab 'aunul ma'bud syarh sunan Abu Daud bahwa penyebab Allah menghinakan orang yang meninggalkan jihad karena menganggap remeh jihad yang merupakan sarana untuk syiar dan memuliakan Islam, sehingga kehinaan itu ditimpahkan, kemudian

¹⁶⁴ Departemen Agama, *Syaamil al-Qur'an, The Miracle*, (Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 65 dan 369

diperumpamakan seperti orang yang berjalan dibelakang sapinya setelah sebelumnya ditunggangi.¹⁶⁵

Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam merupakan ajaran universal yang salah satu misinya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. karena itu, ajaran-ajarannya melampaui batas geografis, kesukuan, etnis, bangsa dan bahasa. Sebagai agama samawi yang terakhir turun yang berfungsi sebagai pelengkap agama-agama samawi sebelumnya, maka secara instristik jangkauan dakwah Islam juga harus melampaui batas-batas geografis, negara, dan bangsa, sehingga dakwah Islam harus mendunia, tidak parsial, kesukuan dan rasial sebagai perwujudan dari misi *rahmatan li al-alamin* itu.

Sejak revolusi teknologi dan informasi yang berimplikasi pada semakin tipisnya jarak antara satu negara dengan negara lain dan semakin tipisnya sekat-sekat geografis antara suatu bangsa dengan bangsa lain, sehingga menimbulkan akses yang begitu dahsyat terhadap kehidupan manusia secara global. Akses itu menimbulkan pertukaran informasi terjadi begitu cepat, interaksi antara sesama terjalin secara intens dan menglobal, strata kehidupan masyarakat juga semakin plural, demikian juga dengan tingkat pendidikan dan kesadaran berpartisipasi dalam percaturan global semakin tinggi dan terbuka. Sehingga secara sosiologis dakwah Islam juga harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan tingkat pengetahuan masyarakat serta harus menembus batas geografis.

Kemajuan zaman beserta segala fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan menjadikan manusia berkompetisi dan bersaing untuk menggapai harapan-harapan itu. Manusia saling mengejar kepentingan-kepentingannya masing-masing. Hubungan yang begitu terbuka dan intens di satu sisi dapat menimbulkan konflik-konflik kepentingan, sehingga secara kultural dapat mengarah pada terjadinya tindakan

¹⁶⁵ Kitab '*Aunul Ma'bud*, CID Room Maktabah Syamilah

kekerasan yang bernuansa agama, suku, dan fanatisme. Sadar atau tidak, umat Islam telah memasuki arena percaturan global, baik dalam konteks pertarungan teologi, politik, ekonomi, dan budaya yang dibingkai dalam kerangka globalisasi.

C. Hikmah Haji

Ibadah haji memiliki rangkaian proses yang didalamnya mengandung berbagai ajaran penting yang patut untuk dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri dan social masyarakat, diantaranya, sebagai berikut:

1. Ibadah haji mengokohkan kekuatan aqidah dan keimanan kepada Allah swt. Nabi Ibrahim as telah mencontohkan kepada kita tentang aqidah dan prinsip yang beliau miliki dan begitu melekat pada jiwanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "

Artinya: "Sesungguhnya Telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia; ketika mereka Berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan Telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja".¹⁶⁶

Salah satu dampak positif dari aqidah yang kuat adalah membuat hati seorang mukmin untuk selalu memegang prinsip yang tegas dalam setiap keadaan, tidak lupa diri pada saat senang, baik ketika sedang

¹⁶⁶ Departemen Agama, *Syaamil al-Qur'an, The Miracle*, cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 549

memiliki harta (ketimbang rezki), diberikan jabatan, popularitas, maupun kekuatan jasmani dan juga tidak putus asa pada saat mengalami penderitaan, baik karena sakit, bencana alam, kekurangan harta maupun berbagai ancaman yang tidak menyenangkan.

Akidah yang kuat akan menanamkan rasa keimanan yang tinggi dan kuat. Karena dengan keimanan yang kuat bertujuan mendorong dan memotivasi seseorang untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Selain itu, dengan keimanan yang kuat juga mampu menjadi alat kontrol bagi seseorang untuk menghalangi dirinya berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Melalui aktifitas ibadah haji dan penghayatan serta kontemplasi yang mendalam terhadap prosesi berhaji menimbulkan konsistensi dan istiqamah melaksanakan ajaran dan perintah Tuhan, sebab pada dasarnya keimanan setiap orang dapat saja *yazid wa yanquus* (bertambah dan berkurang). Karena itu, hanya melalui aktifitas ibadah kekuatan iman dapat senantiasa kita tingkatkan. Termasuk ibadah haji dan berkurban.

“tidaklah seorang anak adam melakukan amalan pada hari nahr yang lebih disukai oleh Allah dari menumpahkan darah (kurban). Sesungguhnya kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Dan sungguh darahnya akan jatuh di suatu tempat di sisi Allah sebelum darah itu jatuh ke bumi, maka laksanakanlah kurban itu dengan senang hati”
HR Ibnu Majah

2. Berhaji melahirkan perilaku akhlak yang mulia.

Manusia menurut Muhammad Iqbal seorang pemikir muslim berkebangsaan Pakistan dikatakan sebagai puncak kesempurnaan ciptaan Allah. Kesempurnaan itu terwujud dengan ditiupkannya ruh Allah dalam diri manusia. atas dasar itulah, manusia pada hakikatnya memiliki dimensi ilahiyah (ketuhanan) dalam dirinya, yaitu manusia dapat memancarkan sifat-sifat keTuhanan dalam berfikir dan berperilaku. Karena itu, pada

hakikatnya manusia cinta kebaikan, kesucian, kedamaian dan ketenangan yang pada hakikatnya kesemuanya itu merupakan bagian dari sifat-sifat keTuhanan.¹⁶⁷

Namun, seiring pergulatan manusia dalam kehidupan dunia ini, terkadang sifat-sifat suci ini terbenam dan tertimbun oleh pengaruh-pengaruh nafsu dan godaan setan. Dan dengan segala upaya dan jurus maut, setan menggoda manusia melalui pintu hawa nafsu dan tipu muslihat yang berbentuk keserakahan, mau menang sendiri, menyakiti orang lain, dengki dan suka menfitnah untuk menjauhkan manusia dari sifat-sifat keTuhanannya itu.. itu sebabnya manusia sulit berdialog dengan nuraninya dan menangkap cahaya kebaikan dari dalam dirinya sendiri. Sengaja atau tidak, ia telah meninggalkan dan membiarkan nurani ini terpuruk ke dalam lumpur kehidupan materialisme, hedonisme dan individualisme. Akhirnya, ia berada pada posisi pinggiran atau marginal dan terus bergerak menjauh dari titik sentral atau Allah Swt. Manusia telah jauh melangkah ke pinggir lingkaran eksistensinya, sehingga ia hanya mampu menyaksikan sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Ibadah qurban mengajarkan kita untuk melepaskan sifat-sifat kebinatangan, yaitu sifat-sifat yang meruntuhkan kesucian manusia dan menjauhkan diri kita dari pusat orbitnya yaitu Allah Swt.

Fenomena sosial yang marak berkembang sekarang ini akibat efek kemajuan teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi seharusnya memberikan dampak positif bagi kita, namun sebagian diantara kita memanfaatkannya secara negatife dengan manghalalkan cara-cara kotor dan rendah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lewat fasilitas media social, orang dengan mudahnya saling mencurigai dan menuduh akibat informasi dan berita hoaks. Kredibilitas seseorang dapat dengan mudahnya jatuh akibat informasi dan berita bohong yang

¹⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Jamuan Ramadhan, Menyeberangi simbol-simbol Ritual Agama*, cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 259

dilayangkan di media social. dengan kecepatan akses informasi yang tersedia dimedsos membuat sebagian orang diantara kita menjadikannya sebagai lahan bisnis yang bertujuan utk merusak citra dan membunuh karakter orang lain. Pola fikir dan pola sikap kita seakan berubah drastis akibat ketidakmampuan kita memilah-milah budaya-budaya asing yang merasuk dalam lingkungan kita lewat akses informasi yang berlebihan tanpa control.

3. Nilai penting yang diperoleh setekah berhaji adalah menghormati ilmu.

Pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi memberikan penghargaan kepada orang yg senantiasa menuntut ilmu. Bahkan Nabi memberikan kesempatan yang sama bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. karena itu menuntut ilmu tidak hanya diwajibkan, tapi diberi keutamaan yang amat besar dan banyak. Generasi Ibrahim adalah generasi yang cinta akan ilmu, karena itu ia mencarinya, dimanapun ilmu itu berada, tanpa ada perasaan puas dalam mendapatkannya, bahkan ilmu yang didapatnya menyatu kedalam jiwa, sikap dan tingkah lakunya.

Salah satu tujuan syariat adalah bagaimana manusia menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan hal itu, maka kita perlu menjaga lima unsure, salah satu diantaranya adalah menjaga akal yang merupakan potensi besar yang Allah berikan kepada kita umat manusia. potensi akal ini harus dirawat dan dijaga dari segala hal yang dapat merusaknya, termasuk mengkonsumsi zat-zat yang dapat merusak akal kita, seperti minuman keras, narkoba, dll. Zat-zat itu secara langsung akan menurunkan daya fikir dan kemampuan kerja akal kita. Narkoba yang kita konsumsi pada hakikatnya sama dengan minuman keras bahkan lebih dasyat dari minuman keras itu.

Perkiraan pengguna narkoba dari kalangan anak muda saat ini mencapai jutaan orang. Dari jumlah tersebut sebagian diantaranya

terinfeksi HIV. Dampak yang ditimbulkan tentunya tingkat kriminalitas anak jalanan meningkat, hubungan antara orang tua dan anak semakin renggang dan kurang harmonis, hal ini tentunya berdampak buruk bagi perkembangan psikologis seorang anak. Pada sisi yang lain orang tua juga dituntut utk memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar anak-anak yang ketika mereka pada fase remaja cenderung berperilaku konstruktif dan premanisme, karena sejak kecil mereka kehilangan kasih sayang dan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Salah satu faktornya karena kedua orang tua tersita waktunya untuk dunia karir. Hampir sebagian masyarakat kota melimpahkan urusan anak-anaknya kepada pembantu rumah tangga atau tempat penitipan anak, akibatnya anak kehilangan kehangatan ayah dan ibunya.

Pendidikan kita sepertinya kehilangan unsure spritualismenya dalam proses belajar mengajar, padahal para ulama kita hanya sedikit yang mereka berikan kepada para santrinya, tapi karena diiringi niat dan unsure spritual dalam proses belajar itu sehingga nilai keberkahannya membekas sepanjang masa. Karena itu ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah saw adalah perintah "bacalah dengan nama 'Tuhan'". Kalimat perintah membaca diiringi dengan nama Tuhan. Artinya selain aspek kognitif anak disentuh, aspek spritualismenya juga harus dipupuk. Karena dimensi kita adalah dimensi jasmani dan rohani. Seperti ungkapan para Sufi: " العلم نور ونور الله لا يعطي للعاصي " "ilmu itu secerca cahaya yang bersumber dari 'Tuhan, dan cahaya 'Tuhan itu tidak akan diberikan kepada orang yang gemar berbuat maksiat dan kedurhakaan".

Pelajaran berharga dari pelaksanaan ibadah haji adalah bagaimana calon haji membangun akhlaq dan moral setelah pulang dari berhaji. Awal menancapkan niat haji, maka pd saat itu telah diharamkan dari segala bentuk keburukan dan kejahatan, mulai dari berkata-kata kotor, berbantah-bantahan, dan menyakiti orng lain, binatang, maupun lingkungan alam sekitar, semuanya itu haram dilakukan setelah berikrar.

"*Labbaikallahumma Hajjan/Labbaikallahumma Umrah*". Juga sebagaimana firman Allah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya: "(Musim haji) adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats (perkataan maupun perbuatan yang bersifat seksual), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal".¹⁶⁸

4. Ibadah Haji Mengajarkan Nilai Persaudaraan

Dalam ibadah haji, kaum muslimin dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa bertemu, berkumpul dan beribadah di tempat yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama. Ini semua seharusnya sudah cukup untuk memberi pelajaran betapa persaudaraan antar sesama kaum muslimin memang harus kita bangun. Bila ukhuwah Islamiyah terwujud dalam kehidupan kita, maka sebagai umat kita punya kekuatan dan kewibawaan, berbagai persoalan umat bisa dipecahkan, kualitas umat bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Karena itu kita harus sadar bahwa kita ini adalah bagian dari umat Islam sedunia dan merupakan salah satu anggota masyarakat Islam sedunia yang tidak boleh berlepas diri dari persoalan-persoalan dunia Islam. Begitulah yang kita peroleh dan resapi dari makna ibadah haji yang kita lakukan.

Islam mengajarkan bagaimana merajut persaudaraan, baik itu persaudaraan yang didasari atas keyakinan yang sama, yaitu *ukhuwwah*

¹⁶⁸ Departemen Agama, *Syaamil al-Qur'an, The Miracle*, (Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 31

Islamiyah, Ini semua seharusnya sudah cukup untuk memberi pelajaran betapa persaudaraan antar sesama kaum muslimin memang harus kita bangun. Bila ukhuwah Islamiyah terwujud dalam kehidupan, maka sebagai umat akan punya kekuatan dan kewibawaan, berbagai persoalan umat bisa dipecahkan, kualitas umat bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Karena itu, kesadaran persaudaraan ini akan memberikan sugensti bahwa umat Islam Indonesia adalah bagian dari umat Islam sedunia dan merupakan salah satu anggota masyarakat Islam sedunia yang tidak boleh berlepas diri dari persoalan-persoalan dunia Islam. Dengan modal ini, maka perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menjadi perpecahan. Prinsip ukhuwah ini menjadikan hubungan antar sesama umat Islam menjadi harmonis dan mampu menjadi sebuah kekuatan besar untuk bersama-sama membumikan nilai-nilai Islam. Ukhuwah Islamiyah menjadi sebuah ikatan, tidak saja secara emosional, namun juga secara spritual. .

Selain persaudaraan seiman, ibadah haji mengajarkan juga terkait rasa persaudaraan atas dasar sesama manusia, atau *ukhuwah basyariyah*, bahwa meskipun setiap orang berbeda suku, agama, dan warna kulit, namun semuanya hidup dalam dunia yang sama yang tujuan hidup di dunia adalah untuk memakmurkan dan membangun bumi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak generasi. Hubungan persaudaraan ini merupakan kunci dari semua persaudaraan, terlepas dari status agama, suku bangsa atau pun sekat geografis, karena nilai utama dari persaudaraan ini adalah kemanusiaan. Hal ini mengingatkan kembali pada Sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa “dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan.” Artinya, bahwa kemanusiaan adalah nilai tertinggi dalam posisinya sebagai manusia.

Realitas Indonesia sebagai bangsa yang plural merupakan sebuah fitrah yang harus disyukuri keberadaanya. Kekayaan akan khazanah budaya, agama, ras, bahasa dan lainnya merupakan bukti bahwa manusia memiliki keanekaragaman dan memang harus hidup dalam

kemajemukan. Rasulullah hidup dalam kemajemukan suku dan agama di Madinah, namun dapat membangun kehidupan yang harmonis antar suku dan agama yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah atau yang disebut dengan Madina Charter ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk saling menghargai kemajemukan

Selanjutnya adalah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air atau *ukhuwah wathaniyah*. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, mungkin saja setiap orang akan berbeda-beda suku dan bangsa, organisasi sosial dan politik, bahkan dalam kelompok-kelompok aliran atau pemahaman keagamaan, tapi semua itu seharusnya tidak membuat setiap orang untuk fanatik lalu merasa benar sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah. Harus diingat bahwa persaudaraan merupakan bukti keimanan dan bila ini belum diwujudkan, maka pertanda lemahnya keimanan yang dimiliki

5. Berhaji Mengajarkan Mencari Rezeki Halal

Pelajaran yang bisa kita ambil dari proses mansasik haji seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim as adalah berusaha untuk mencari rizki yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Kesulitan hidup tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara dalam mencari harta. Keyakinan bahwa Allah punya maksud baik dan rizki di tangan-Nya membuat manusia seharusnya mau berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siti Hajar berusaha mencari rizki yang dalam rangkaian ibadah haji disebut dengan sa'i. (yg artinya berusaha) sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari bukit safa (bersih) kemudian berakhir dibukit marwah (berarti kesempurnaan). Pada intinya bahwa ketika kita memulai usaha kita, memulai mencari rezki dan karunia Tuhan, maka berniatlah untuk mencari yg bersih dan halal, yang nantinya akhir dari pencarian rezki dan karunia itu menjadikan kita manusia-manusia yg sempurna, yaitu org-org yg memiliki kepedulian dan rasa empati terhadap sesama kita yg di wujudkan dlm bentuk tolong menolong. Karena itu Allah swt senang kepada siapa saja yang berusaha secara halal meskipun

harus dengan susah payah, Rasulullah saw bersabda: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى تَعَبًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ**
Artinya: "Sesungguhnya Allah cinta (senang) melihat bantunya lelah dalam mencari yang halal" (HR. Ad Dailami).

Usaha yang halal meskipun sedikit yang diperoleh dan berat memperolehnya merupakan sesuatu yang lebih baik daripada banyak dan mudah mendapatkannya, tapi cara memperolehnya dengan mengemis, korupsi, mencuri, merampas hak orang lain, agen obat-obat terlarang dll, yang tentunya kesemua itu hanya akan menjatuhkan martabat pribadi dan keluarga kita.

D. Peluang Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

- a. Dukungan pemerintah dengan penerbitan regulasi berupa undang-undang pengelolaan keuangan haji dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Tawaran imbal hasil investasi pada sector portofolio dan sukuk di Indonesia cukup progresif dan relative aman.
- c. Setiap tahun jumlah jemaah calon haji terus bertambah. Proyeksi pendaftar calon haji setiap tahun mencapai 600 ribu orang, sehingga potensi dana haji akan terus berkembang. Tahun 2020 diproyeksikan BPKH akan mengelola dana haji mencapai Rp. 150 triliun,-. Peningkatan jumlah calon jemaah umrah juga cenderung meningkat, tahun 2030 diprediksi jemaah umrah Indonesia naik mencapai 3 juta orang pertahun. Peningkatan ini dipicu regulasi dan tata kelola dan pelayanan umrah yang dikembangkan pemerintah Arab Saudi. BPKH dapat memanfaatkan peluang ini dalam bentuk kerjasama bisnis dibidang konsorsium travel umrah dengan menawarkan paket penyewaan pesawat terbang, provider visa, layanan jasa catering, dan penyewaan hotel.
- d. Peningkatan kesadaran muslim kelas menengah ke atas untuk mengkonsumsi *food*, kosmetik dan obat-obatan halal, *fashion*, pariwisata halal yang ditopang dengan model sistem bisnis syariah

yang berbasis riil memungkinkan BPKH investasi langsung pada sector ritel, perhotelan syariah, dan kosmetik dan obat-obatan berlabel halal.

- e. Core bisnis BPKH terdiri dari investasi pada sector surat berharga syariah (Sukuk dan SBSN), investasi pada emas (rekening emas dan emas batangan), investasi langsung (infrastruktur, jasa, dan ritel), dan investasi lainnya (permodalan pembiayaan pada industry keuangan syariah)
- f. Permintaan label halal untuk kosmetik dan obat-obatan terhadap Majelis Ulama Indonesia semakin meningkat. Isu tentang campuran bahan baku non halal pada industry kosmetik dan obat-obatan mengindikasikan kuatnya permintaan masyarakat muslim Indonesia, bahkan dunia akan produk berbahan baku halal. Sehingga BPKH berpotensi penetrasi sebagai penyedia modal investasi langsung dalam bentuk kerjasama musyarakah dengan komposisi saham diatas 50% untuk BPKH

E. Tantangan Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

- a. Pandangan pesimis masyarakat terhadap pengelolaan dana haji yang diinvestasikan pada sector infrastruktur, seperti perhotelan, sarana pendidikan, peningkatan sarana pelayanan perhajian, investasi pada sukuk pemerintah dan korporasi.
- b. Keperpihakan regulasi pemerintah Arab Saudi terhadap investor asing belum maksimal. Masih kuatnya monopoly bisnis pelayanan haji oleh pemerintah Arab Saudi dan pihak swasta diberbagai sector, seperti hotel, jasa catering, dan jasa transportasi.
- c. Prinsip tanggung renteng yang terdapat pada regulasi undang-undang pengelolaan keuangan haji membuat BPKH ekstra hati-hati dalam menginvestasikan dana haji pada sector investasi emas, langsung, dan investasi lainnya.
- d. Potensi pasar industry keuangan syariah masih kecil. Meskipun tumbuh dan berkembang, tetapi market sharenya tidak loyal dan

cenderung stagnan. Akibatnya total asset yang dikuasai hanya berkisar 5% dari total industry keuangan nasional.

- e. Cost penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat, biaya perjalanan haji Indonesia berkisar Rp. 73-75 juta per orang. Sementara jemaah calon haji hanya menyetor sekitar Rp. 35-39 juta, sehingga BPKH harus mensubsidi sekitar Rp. 35-40 juta per orang. Total besaran subsidi BPKH mencapai Rp. 7 triliun. Karena itu, investasi BPKH harus menghasilkan imbal hasil di atas 7 triliun setiap tahun, karena BPKH berhak atas 5% dari total imbal hasil yang diperoleh untuk biaya operasional BPKH.
- f. Investasi jangka panjang butuh modal besar dan masa panen yang relative lama, sementara musim pelaksanaan ibadah haji yang diawali tahapan persiapan sudah berlangsung enam bulan sebelum musim haji tiba.
- g. Tekanan inflasi yang terus naik dan tuntutan pelayanan haji yang harus optimal dari masyarakat.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbankan syariah merupakan mitra Badan Pengelola Keuangan Haji dalam menerima setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Selain itu, Perbankan Syariah bagian dari penempatan dana haji untuk dikelola pada produk giro, deposito, dan tabungan. Porsi dana haji yang ditempatkan pada perbankan syariah sebanyak 65% dari total dana haji. Porsi ini akan terus berkurang sesuai amanah undang-undang pengelola keuangan haji.
2. Badan Pengelola Keuangan Haji mengembangkan dan mengoptimalkan dana haji melalui mekanisme penempatan dan mekanisme investasi. Mekanisme penempatan, yaitu menempatkan dana haji pada produk perbankan syariah seperti giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan mekanisme investasi terdiri dari, investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Mekanisme ini sesuai dengan peraturan perundangan dibidang pengelolaan keuangan haji. Indonesia juga memberikan pelayanan haji, seperti proses pendaftaran, transportasi, akomodasi, catering, dan kesehatan. Hanya saja, berbeda dengan LTH yang memberikan layanan satu atap, yaitu lewat LTH. Sedangkan di Indonesia melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Ibadah Haji (BPIH).
3. Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia mengembangkan dana haji melalui anak perusahaannya, LTH mengalokasikan dananya sebagian besar ke sector investasi. Di Malaysia, Pelayanan Haji juga diberikan oleh Lembaga Tabung Haji. Pelayanan haji diberikan mulai dari proses pendaftaran, sampai berpulang ke tempat tinggal jamaah masing-masing. Makanan, Transportasi

dan Akomodasi menjadi tanggungjawab penuh LTH. Perlindungan melalui asuransi serta layanan kesehatan tidak luput dari layanan tabung haji. Tidak jauh berbeda dengan LTH.

4. Pengembangan dan optimalisasi dana haji bersesuaian dengan prinsip maqashid sharia Ibn Asyur yang terdiri dari al-rawaj, 'Transparansi, perlindungan terhadap harta, Jaminan Hukum dan Keadilan. Sedangkan aspek pelayanan haji kedua lembaga tersebut telah bersesuaian dengan prinsip maqashid syariah al-Syatibi, yaitu meliputi aspek penjagaan agama, jiwa, akal, dan Harta.. Peluang berkembangnya Pelayanan Haji bisa kita dari beberapa aspek, seperti dukungan pemerintah, animo calon jamaah, potensi keuangan syariah dan lain-lain. Adapun tantangannya sendiri, bisa dilihat dari factor regulasi dari Arab Saudi yang cenderung berubah-ubah. Belum lagi cost haji yang semakin mencekik karena tekanan inflasi.

B. Saran

1. Bagi para akademisi, penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Salah satu yang urung dibahas dalam penelitian ini, adalah optimalisasi sector investasi yang dicanangkan oleh BPKH. Olehnya, peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya yang focus pada optimalisasi investasi oleh BPKH.
2. Bagi Para Pemegang Kebijakan regulasi agar sekiranya membentuk system satu atap seperti yang telah dijalankan Oleh Lembaga Tabung Haji terkait pengelolaan dan pelayanan haji.
3. Bagi pemerintah agar kiranya terus memberikan perhatian dan dukungannya terkait optimalisasi dana haji di Indonesia
4. Bagi Penyelenggara Ibadag haji agar sekiranya tetap menjaga dan meningkatkan kualitas layanannyam baik sejak dalam proses pendaftaran sampai setiba di kediaman jamaah masing-masing.

Daftar Pustaka

- Abu Ishak Ibrahim Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Cet. Kairo: Daar el-I'ikr Publishing, t.th
- Abd. Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Aslikhah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer, Jurnal Malia, Vol. 8 Nomor 2 Juni 2017
- Abd. Al-Fattah Husaini Sykeh, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Cet. I; Kairo: Daar al-Jailiy Press, 1993
- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Bagian Ibadah (Puasa, Zakat, Haji, Kurban)*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
- Abdul Wahab, Muhibb, *Asuransi dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits*. Jakarta: PBB UIN, 2003
- Abdul Jawwad, Muhammad, *Menjadi Manajer Sukses*. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Abimayu, Anggito, *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19, Alokasi Nilai Manfaat 2019*, Webinar Syawalan dan Seminar Ikatan Ahli Ekonomi Islam DPW DI Yokyakarta dengan BPKH, 2019
- A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern*, Cet. IV; Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005
- Atho' Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Editor Budhy Munawar Rachman, Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina
- Ambo Masse, Rahman, Jurnal Diktum, Volume 16 No. 2 (2018)
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), *Pedoman Penyusunan Kompetensi Kerja*, Jakarta, Cet., 2005

CD Room Makatabah Syamilah

Darsono, dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Tazkia Publishing, 2017

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*

Divisi Compliance PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah bidang Umum dan Operasional*, 2008

Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an, The Miracle*, Cet. I; Bandung: PT. Sygma Eamedia Arkanleema, 2009

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Fani Firmansyah Putri Kurnia Widiati, "Analisis Non Performing Loan Dan Pencrapan Restrukturisasi Kredit Pada Perbankan Syariah Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Malang (Study Kasus pada Perbankan Syariah dan Pedagang Kecil di Kota Malang)," *Iqtisoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 117

Handayani, Disfa Lidian, "Hukum Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah" *Jurnal Al-Manahij*, IX, No.2, (2015): 340.

Haliding, Safri, *Peluang dan Tantangan Pengelola BPKH*, blog ekonomi syariah, keuangan syariah, diakses tgl 18 Agustus 2018

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *{Pengantar Manajemen Syariah*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2019

Herdiana Abdurrahman, Nana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013

- Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Hulwati, *Investasi Sukuk: Perpektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islan (JEBI), volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017
- [http://pelayanan.jamaah haji dan umrah.com](http://pelayanan.jamaah.haji.dan.umrah.com)
- <http://www.dpd.go.id/artikel-komite-iii-dpd-masalah-klasik-ibadah-haji-dan-pendidikan-agama-perlu-segera-diperbaiki>
- Imam Syaukani, Manajemen Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan, 2009
- Imam al-Baqawy, *Syarb as-Sunnah*, Juz. . Cet. I; Beirut: Maktabah Islami, 1983
- Iqbal, Muhammad, *Jamuan Ramdhan, Menyeberangi Simbol-simbol Agama*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Ismal, Rifki, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Jilid IV, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002
- Kasmir, *Etika Customer Service*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Kementerian Agama RI, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019*, Cet. I; Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M*, Jakarta: Komisi Pengawas Haji Indonesia, 2013
- Kotler dan Keller, *Marketing Management Edisi 14*, (Global Edition: Pearson Prentice Hall, 2012
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan BPKH 2018-2019 Bidang Kemaslahatan
- Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi II, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, cet. I; Jakarta; Erlangga, 2010
- Muhammad Thàhir Ibn'Asyur, 'Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Islâmiyah', Dâr Al-Salam, Kairo, 2009.
- Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, Jurnal Bisnis, Vol 3, No. 2, Desember 2015
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta, Ekonosia, 2005
- Marthon, Said Sa'ad, *al-Madkhal li al-Fikri al-Iqtisad fi al-Islamy*, dalam, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2001
- Muhammad Abdul Jawwad, Menjadi Manajer Sukses. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Nafis Irkhami, Analisis Risiko dalam Investasi Islam, Jurnal Muqtasid Vol. I No. 2 Desember 2010
- Nurhasanah, Tabung Haji Malaysia PERSpektif Ekonomi, Jurnal al-Iqtishad, Volume III No 2 Juli, 2011

- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif*. Jakarta: Kencana, 2010
- Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Complience) Dalam Industri Keuangan Syari'ah," *Jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 3, No.1, (2016): 37.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Statistik Perbankan Syariah*", Situs Resmi OJK. www. OJK. go.id. 3 April 2014
- Perpustakaan Negara Malaysia, al-Haj the Malaysian Experience; In Conjunction With The 50th Anniversary of Lembaga Tabung Haji, Publisher: Islamic Arts Museum Malaysia, 2013
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ryan Ariefiansyah dan Miyosi Ariefiansyah, *Investasi Emas, Cara Kaya untuk Semua Umur dan Semua Kalangan*
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008
- Rodani, Ahmad, dkk, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet. I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2019
- Said Ramadhan al-Buty, Muhammad, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Cet. VI; Beirut: 1992
- S. Gultom, Miranda, *Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar "Strategy Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"*
- Sahroni Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sistetis Fikih dan Ekonomi*, cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019

- Sukino, Sadono, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Sri Imaniyati Neni, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2013
- Summa, M.Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Syaukani, Imam, *Manajemen Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan, 2009
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Tjiptono, Fandy, *Prinsip-prinsip Total Quality Service* (Yogyakarta: Andi, 2001
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartaba*
- Team Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan*, cet. I; Surabaya: Anfaka Perdana, 2012
- Team Penyusun Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2008
- Team Penyusun, *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Bidang Umum dan Operasional Bank Muamalat*, (Jakarta: Bank Muamalat Tbk, 2011
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji Pasal 1 angka 4
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. I; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012

- Usman, Husaini, *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-undang RI No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Yuke Rahmawati Resosialisasi Investasi Keuangan Syari'ah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cct. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- www.tabunghaji.gov, Laporan Tahunan Tabung Haji Malaysia 2017
- www.bpkh.co.id, Struktur Badan Pengelola Keuangan Haji,
- www.Bank Indonesia.com,” Statistik iBI 2013, akses 15 Juni 2014
- Yusuf Wibisono, “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16, No. 2, (2009)

Wawancara

- H. Ahmad Abd. Mutalib, Jemaah Haji Kloter 22 Embarkasi Makassar, wawancara via handpone tgl 11 Septmer 2019
- H. Syahrudin Sainur, Ketua Kloter 03 UPG Embarkasi Makassar, wawancara tgl 12 September 2019 via handpone
- H. Surahman Amin, Jemaah haji kloter 21 Papua Embarkasi Makassar, wawancara tgl 12 September 2019
- Hafidz, Eksekutif Corporate Responsibility Tabung Haji Malaysia, wawancara 1 September 2019

Imam Ni'matullah, Kepala Divisi Investasi Langsung, Emas dan Lainnya di BPKH, wawancara tgl 4 September 2019

Muhammad Khafidz bin Aini, Eksekutif Hal Ehwal Awam dan Komunikasi Korporat Tabung Haji Malaysia, wawancara tgl 29 Agustus 2019 di kantor Tabung Haji Malaysia

Sunaryo, Kasubdit Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji Kementerian Agama Pusat, wawancara Agustus 2019 Kantor Kemenag Jakarta

Biografi Penulis

1. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. Lahir di Ujung Pandang, 25 September 1973, Penulis meniti pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Nabire Papua, dan tamat 1986. Melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Mangkoso kab. Barru Sulsel. Kemudian melanjutkan pendidikan Tingkat Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mangkoso Kab. Barru. Pada tahun 1993 melanjutkan pendidikan Strata (S1) Jurusan Syariah pada Universitas Al-Azhar Mesir dan selesai pada tahun 1998. Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan ke jenjang Starata 2 (S2) Konsentrasi Ekonomi Islam pada Universitas Muslim Indonesia. Penulis merupakan Dosen tetap IAIN Parepare. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan studi Strata 3 (S3) Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar. Kajian disertasi berkaitan dengan perbankan syariah. Pernah menjadi petugas haji pada kedutaan Konsulat RI di Jeddah (1998). Tahun 2015 penulis berkesempatan berkunjung ke Kairo Mesir untuk program Academic Researching for Islamic Studies. Tahun 2019 mendapatkan hibah penelitian kolaborasi internasional. Karya buku (1) Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual (2016) (2) Arbitrase Syariah; Upaya Formalisasi Syariah dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (2017); Ceruk Pasar Muslim Milenial Perbankan Syariah (2020)
2. Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA. Lahir di Macanre, 5 Maret 1970. Penulis merupakan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2019-2023. Alumni Al-Azhar Kairo ini selain aktif dibidang akademik, juga aktif dibidang social kemasyarakatan. Jabatan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Alumni Timur-Tengah periode 2020-2024.



PENGURUS WILAYAH
Nahdlatul Ulama
SULAWESI SELATAN

<https://pwnusulsel.or.id>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN ALAUDDIN
MAKASSAR – INDONESIA

Pengelolaan Dana Haji Indonesia-Malaysia

Ekspektasi masyarakat terhadap kehadiran perbankan syariah sangat tinggi, hal ini berimplikasi pada regulasi sebagai payung hukumnya. Karena itu, laju pertumbuhan perbankan syariah tidak cukup hanya diatur dalam suatu bab atau pasal tertentu dalam suatu perundang-undangan. Akan tetapi, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur karakteristik perbankan syariah. Berdasarkan realitas empiris dan desakan dari masyarakat Muslim Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang Undang-undang tentang Perbankan Syariah yang resmi diundangkan oleh Presiden pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Badan Pengelola Keuangan Haji mengembangkan dan mengoptimalisasi dana haji melalui mekanisme penempatan dan mekanisme investasi. Mekanisme penempatan, yaitu menempatkan dana haji pada produk perbankan syariah seperti giro, deposito, dan tabungan. Sementara, mekanisme investasi terdiri dari investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia mengembangkan dana haji melalui anak perusahaannya, LTH mengalokasikan dananya sebagian besar ke sektor investasi. Di Malaysia, Pelayanan Haji juga diberikan oleh Lembaga Tabung Haji. Pelayanan haji diberikan mulai dari proses pendaftaran, sampai berpulang ke tempat tinggal jamaah masing-masing. Makanan, transportasi, dan akomodasi, menjadi tanggung jawab penuh LTH. Perlindungan melalui asuransi, serta layanan kesehatan tidak luput dari layanan tabung haji, tidak jauh berbeda dengan LTH.

Pengembangan dan optimalisasi dana haji bersesuaian dengan prinsip *maqashid syariah* Ibn Asyur yang terdiri dari *al-rawaj*, Transparansi, perlindungan terhadap harta, Jaminan Hukum dan Keadilan. Aspek pelayanan haji kedua lembaga tersebut, telah bersesuaian dengan prinsip *maqashid syariah* al-Syatibi, yaitu meliputi aspek penjagaan agama, jiwa, akal, dan harta. Peluang berkembangnya pelayanan haji bisa kita dari beberapa aspek, seperti dukungan pemerintah, animo calon jemaah, potensi keuangan syariah dan lain-lain. Adapun tantangannya sendiri, bisa dilihat dari faktor regulasi dari Arab Saudi yang cenderung berubah-ubah. Belum lagi cost haji yang semakin mencekik karena tekanan inflasi.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwisungung No. 112
Kel. Leuwisungung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id



Alauddin University Press

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

